



Kajian Ekonomi Regional Banten

Triwulan II – 2008

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahuwata'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penyusunan buku Kajian Ekonomi Regional (KER) Banten yang secara rutin triwulanan dilakukan dapat diselesaikan. Buku kajian Ekonomi regional berisi potret perkembangan ekonomi dan perbankan di Banten yang di era otonomi daerah keberadaannya dirasakan semakin penting. Tujuan dari penyusunan buku laporan triwulanan ini adalah untuk memberikan informasi kepada *stakeholder* tentang perkembangan ekonomi dan perbankan di Banten, dengan harapan informasi tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu sumber referensi bagi pembuat kebijakan, akademisi, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya yang membutuhkan dan memiliki perhatian terhadap perkembangan ekonomi di Banten.

Cakupan kajian di dalam buku KER cukup luas, yaitu meliputi kajian perkembangan ekonomi regional, inflasi, perbankan, keuangan daerah, perkembangan kesejahteraan dan outlook perekonomian satu triwulan ke depan. Berdasarkan asesmen pada triwulan II-2008, pertumbuhan ekonomi Banten melambat, inflasi meningkat tinggi namun demikian fungsi intermediasi perbankan tumbuh sedikit meningkat. Sementara itu, perbaikan kesejahteraan masyarakat belum cukup optimal.

Kami menyadari bahwa publikasi ini masih belum sempurna. Masih banyak hal yang harus dilakukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kualitas kajian buku ini. Untuk itu masukan dan terutama supply data terkini, serta kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan. Selanjutnya, pada kesempatan ini kami juga mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan buku ini.

Jakarta, 5 Agustus 2008

BAB V. KEUANGAN DAERAH	halaman 59
Perkembangan Keuangan Daerah	halaman 59
Arah Pembangunan Banten	Halaman 62
BAB VI. OUTLOOK KONDISI EKONOMI DAN	halaman 65
INFLASI	
Pertumbuhan Ekonomi	halaman 65
Inflasi	halaman 74
BAB VII. KESIMPULAN DAN USULAN TINDAK	Halaman 79
LANJUT	
LAMPIRAN	Halaman 83

Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi :
Biro Kebijakan Moneter
Direktoral Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter
Bank Indonesia
Gedung Sjafruddin Prawiranegara Lt. 18
Kompleks Bank Indonesia
Jl. MH. Thamrin No. 2 Jakarta
Ph. 021 – 381 – 8868, 381 – 8199
Fax. 021 – 386 – 4929, 345 – 2489
Email : BKM_TEM@bi.go.id
Web site : www.bi.go.id

Ringkasan Eksekutif

Berlanjutnya perlambatan pertumbuhan ekonomi global berpengaruh terhadap kondisi perekonomian nasional yang juga tercermin pada perkembangan perekonomian Banten. Pada triwulan II 2008 perkembangan beberapa indikator makro ekonomi regional di Banten kembali melemah. Pertumbuhan ekonomi Banten tumbuh sedikit melambat dan disisi lain tingkat inflasi relatif tinggi. Kualitas pertumbuhan ekonomi masih tetap belum seperti yang diharapkan karena pertumbuhan ekonomi masih didorong oleh pertumbuhan konsumsi sementara investasi tumbuh relatif rendah. Hal ini juga tercermin di sisi penawaran, sektor yang tumbuh tinggi adalah sektor yang relatif padat modal sehingga penyerapan tenaga kerja terbatas dan kesenjangan pendapatan meningkat. Disisi harga-harga, di triwulan laporan tekanan masih tinggi, antara lain disebabkan oleh kenaikan harga BBM dan ekpektasi yang muncul. Inflasi di triwulan laporan (q-t-q) meningkat dan berada di level yang masih cukup tinggi. Perkembangan beberapa indikator ekonomi utama yang kurang menggembirakan tersebut diperkirakan memberi dampak pada perkembangan kesejahteraan yang belum optimal, walaupun sebagian indikator kesejahteraan masih mengalami sedikit perbaikan. Indikator kesejahteraan yang membaik antara lain adalah jumlah pengangguran dan kemiskinan yang menurun, sementara indikator yang memburuk antara lain adalah upah riil (daya beli) yang terganggu oleh inflasi yang tinggi, kesenjangan meningkat dan indeks kesengsaraan dipengaruhi oleh inflasi yang tinggi memburuk. Sementara itu, ditengah-tengah perekonomian yang melemah, ternyata kegiatan di sektor keuangan, khususnya fungsi intermediasi perbankan menunjukkan perkembangan dan kinerja yang sedikit meningkat dan diikuti oleh perkembangan pembayaran non tunai yang membaik.

Perkembangan Makro Regional

Perekonomian Banten pada triwulan II 2008 tumbuh sekitar 5,9%, sedikit melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (6,0%). Perlambatan pertumbuhan ini terutama didorong oleh perlambatan pertumbuhan konsumsi dan investasi yang tumbuh rendah. Sementara pertumbuhan kegiatan ekspor impor juga tercatat sedikit menurun.

Konsumsi Banten tumbuh 6,6%, sedikit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya (6,7%). Faktor yang mempengaruhi perlambatan pertumbuhan konsumsi antara lain adalah daya beli masyarakat yang relatif turun dan keyakinan konsumen yang relatif pesimis. Perlambatan tersebut dikonfirmasi oleh beberapa prompt indikator. Prompt indikator dimaksud seperti hasil survei, pembelian barang-barang tahan lama, konsumsi semen, konsumsi BBM, informasi anekdot. Hasil survei konsumen dan survei penjual eceran yang menurun, mengkonfirmasi perlambatan konsumsi. Indeks keyakinan konsumen relatif di bawah batas angka normal.

Investasi tumbuh sebesar 5,0%, sedikit melambat dibandingkan triwulan I 2008 (5,1%). Iklim investasi yang belum optimal, kondisi infrastruktur yang masih terbatas, dan perkembangan ekonomi global dan domestik yang melambat diperkirakan menahan perkembangan investasi di triwulan laporan. Perlambatan investasi dikonfirmasi dari beberapa survei dan prompt indikator. Survei kegiatan dunia usaha (SKDU) menunjukkan keyakinan dunia usaha terhadap kondisi berusaha yang melemah. Sementara itu, beberapa prompt indikator yang lain, seperti konsumsi semen, pendaftaran truk dan alat berat, dan impor barang modal menunjukkan pertumbuhan yang melambat.

Ekspor Banten pada triwulan II 2008 tumbuh 7,8%, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (7,9%). Faktor yang mempengaruhi ekspor tumbuh melambat terutama adalah perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional maupun pertumbuhan ekonomi dunia, khususnya untuk produk manufaktur. Sementara impor di triwulan II 2008 diperkirakan tumbuh 8,1%, turun tipis dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (8,4%). Faktor utama yang mempengaruhi perlambatan impor antara lain adalah perlambatan di sektor industri yang dalam proses produksinya kandungan impor bahan baku/mentahnya masih tinggi.

Dari sisi penawaran, seiring perlambatan di sisi permintaan, beberapa sektor utama, yaitu sektor perdagangan, industri dan pertanian terjadi penurunan pertumbuhan. Di sektor industri, perlambatan pertumbuhan selain disebabkan oleh melambatnya permintaan juga dihadapkan pada tekanan kenaikan biaya produksi sebagai akibat dari kenaikan harga BBM dunia dan kenaikan harga bahan baku/mentah. Sedangkan sektor listrik, bangunan, transportasi-komunikasi dan jasa-jasa sedikit meningkat. Secara keseluruhan perekonomian Banten di triwulan II 2008 sedikit melambat namun masih pada level yang tinggi. Sektor ekonomi yang tumbuh relatif tinggi merupakan sektor yang padat modal, sementara sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja tumbuh rendah.

Kinerja di sektor pertanian pada triwulan II 2008 tumbuh 2,6%, melambat dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya (5,6%). Faktor utama yang mempengaruhi relatif melambatnya pertumbuhan di sektor pertanian terutama adalah luas lahan tanam yang relatif menurun karena memasuki musim kering sehingga ketersediaan air relatif terbatas.

Sektor industri tumbuh 2,1 % (y-o-y), sedikit menurun dibandingkan dengan triwulan I 2008 (2,5%). Beberapa faktor yang diduga mempengaruhi perlambatan pertumbuhan di sektor industri Banten, antara lain adalah permintaan domestik dan internasional terhadap produk industri di Banten yang melemah. *Prompt* indikator yang mendukung antara lain adalah, penurunan pertumbuhan indeks produksi beberapa industri penting di Banten, penurunan pertumbuhan ekspor, penurunan pertumbuhan konsumsi listrik dan penurunan pertumbuhan jumlah pelanggan listrik oleh industri.

Sektor perdagangan hotel dan restoran pada triwulan II 2008 tumbuh sebesar 12,5% (y-o-y), melambat dibandingkan dengan

triwulan I 2008 (13,7%). Faktor yang mempengaruhi perlambatan di sektor perdagangan diperkirakan adalah pertumbuhan daya beli masyarakat yang relatif masih terbatas, bahkan menurun. Beberapa prompt indikator yang mendukung adanya perlambatan pertumbuhan di sektor ini antara lain adalah: perkembangan arus barang di pelabuhan Banten dan penurunan pertumbuhan konsumsi listrik sektor bisnis seperti mal, pasar, toko dan pusat bisnis lainnya.

Perkembangan Inflasi Regional

Kestabilan harga di Banten pada triwulan II-2008 sedikit membaik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, walaupun masih pada level yang tinggi. Kenaikan harga BBM dan dampak lanjutannya, ekspektasi negatif konsumen dan meningkatnya harga beberapa komoditas penting yang di impor menyebabkan Inflasi di Banten pada triwulan II-2008 masih berada di level yang tinggi (3,4%, q-t-q), namun lebih rendah dibandingkan dengan inflasi triwulan sebelumnya sebesar 4,5%. Sementara itu, secara tahunan inflasi di Banten pada triwulan II-2008 adalah sebesar 13,8% (y-o-y) lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 9,0%. Inflasi triwulan II-2008 ini merupakan inflasi tertinggi sejak triwulan keempat 2006 baik dihitung secara triwulanan (q-t-q) maupun tahunan (y-o-y).

Perkembangan Perbankan

Perkembangan kegiatan usaha perbankan di Banten sampai dengan Mei 2008 masih tumbuh tinggi. Penghimpunan dana masyarakat dan penyaluran kredit oleh kantor bank yang berlokasi di Banten secara triwulanan meningkat. Faktor yang mempengaruhi antara lain adalah kebutuhan transaksi kas yang relatif menurun. Sementara itu faktor yang mempengaruhi peningkatan *outstanding* kredit antara lain adalah suku bunga yang naik dan kebutuhan masyarakat dipenuhi dengan mengambil kredit. Namun demikian, akselerasi pertumbuhan DPK lebih cepat, sehingga rasio penyaluran kredit terhadap dana yang dihimpun bank (LDR) di Banten relatif turun dari 78,2% pada Maret 2007 menjadi 77,9% pada Mei 2008, dan di atas angka LDR Nasional 72,8%. Peningkatan LDR tersebut diikuti dengan *performance* kredit yang relatif baik dibandingkan dengan periode waktu yang sama pada tahun sebelumnya, sebagaimana tercermin pada angka NPLs Gross yang rendah. Perkembangan *performance* kredit tersebut dipengaruhi antara lain oleh berlanjutnya langkah-langkah restrukturisasi kredit terhadap beberapa debitor besar dan penyaluran kredit yang lebih berhati-hati. Secara keseluruhan, resiko likuiditas dan resiko pasar masih dapat tertangani dengan baik.

Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat

Kualitas pertumbuhan ekonomi Banten yang masih belum optimal berdampak pada belum tingginya perbaikan beberapa indikator kesejahteraan masyarakat Banten. Indikator dimaksud antara lain adalah upah/gaji, angka indeks kesengsaraan (*miseri indeks*) dan kualitas hidup yang tercermin pada angka indeks pembangunan manusia (IPM), bahkan kesenjangan pendapatan (gini ratio) sedikit meningkat. Namun demikian angka kemiskinan dan angka pengangguran sedikit menunjukkan perbaikan. Angka pengangguran di Banten turun 15,8% pada tahun 2007 menjadi 14,2% pada tahun 2008, namun masih lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pengangguran nasional (8,6%). Tingkat kemiskinan relatif turun tipis, yaitu 8,2% dari 9,1% dan lebih rendah dibandingkan dengan nasional (15,4%). Faktor yang mempengaruhi relatif lambatnya perbaikan indikator kesejahteraan antara lain adalah kinerja perekonomian Banten yang walaupun dari sisi kuantitas pertumbuhannya cukup tinggi, namun demikian dari sisi kualitas masih belum optimal, yaitu pertumbuhan lebih didorong oleh konsumsi, sementara investasi tumbuh relatif lambat. Dari sisi sektoral hal ini juga tercermin pada lambatnya pertumbuhan di sektor ekonomi yang banyak menyerap tenaga kerja, seperti industri. Hal ini juga berdampak pada kesenjangan pendapatan yang meningkat, yaitu dari 0,356 pada tahun 2005 menjadi 0,365 pada tahun 2007 (Maret). Sementara itu, indikator kesejahteraan yang lain, yaitu Indeks Pembangunan Manusia relatif membaik. Perbaikan Indeks Pembangunan Manusia dipengaruhi oleh perekonomian yang membaik dan di sisi lain alokasi anggaran untuk pendidikan dan jaminan sosial juga meningkat. Sedangkan, indeks kesengsaraan, dengan tingginya tekanan inflasi di triwulan II 2008 diperkirakan meningkat.

Perkembangan Keuangan Daerah

Perkembangan realisasi APBD 2008 Provinsi Banten hingga triwulan II 2008 cukup optimal. Pencapaian realisasi penerimaan mencapai Rp 1,03 triliun (52,0%), naik dibandingkan dengan periode sebelumnya (46,6%). Peningkatan realisasi pendapatan terutama bersumber dari realisasi pendapatan asli daerah Rp 0,79 triliun (57,7%), sementara realisasi dana perimbangan baru Rp 264,9 triliun (46,6%). Disisi belanja, realisasinya mencapai 31,5%, lebih tinggi dari pencapaian pada periode waktu yang sama tahun sebelumnya (24,8%). Dengan perkembangan tersebut di atas, APBD Banten sampai dengan Triwulan II masih mencatat surplus Rp 0,38 triliun. Secara keseluruhan pencapaian APBD 2008 Banten cukup bagus. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh relatif cepatnya pengesahaan Perda APBD dan penyusunan anggaran yang relatif realistis. Perda APBD 2008 disahkan dengan Perda No. 10/2008 pada tanggal 18 Februari 2008. Sementara itu, besaran angka APBD 2008 relatif realistis yang dibandingkan dengan realisasi APBD 2007 perubahannya tidak cukup signifikan.

Outlook Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi

Pada triwulan III-2008 di tengah-tengah pertumbuhan ekonomi dunia dan domestik yang melambat, pertumbuhan ekonomi di Banten diperkirakan kembali tumbuh melambat. Perekonomian diproyeksikan tumbuh pada kisaran angka 5,3% (y-o-y), melambat dibandingkan dengan periode sebelumnya (5,9%). Perlambatan tersebut terutama dipengaruhi oleh konsumsi dan kegiatan investasi yang mengalami sedikit tekanan. Konsumsi menurun dipengaruhi oleh daya beli yang belum berubah signifikan, ekspektasi konsumen yang melemah, inflasi yang masih tinggi dan disisi lain belanja pemerintah masih rendah. Investasi sejalan dengan pelemahan ekonomi internasional dan domestik diperkirakan masih tumbuh rendah, walaupun disisi lain tingkat suku bunga masih cukup rendah. Sementara itu, seiring dengan penurunan permintaan dunia, kegiatan ekspor sedikit tumbuh melambat. Impor diperkirakan tumbuh lebih melambat yang dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan konsumsi dan produksi yang melambat.

Inflasi regional Banten (q-t-q) pada triwulan III-2008 diperkirakan lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, namun masih di level yang tinggi. Secara triwulanan angka inflasi diperkirakan mencapai 3,7% (q-t-q) dan secara tahunan 14,3% (y-o-y). Masih tingginya inflasi di triwulan III-2008 diperkirakan berasal dari masih tingginya tekanan inflasi di kelompok bahan makanan, makanan jadi, perumahan, dan pendidikan. Ekspektasi konsumen, kenaikan biaya produksi dan masuknya tahun ajaran baru, serta memasuki hari besar keagamaan yang pada umumnya akan diikuti dengan peningkatan permintaan diperkirakan menjadi faktor pemicu inflasi.

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB I KONDISI MAKRO EKONOMI REGIONAL

Ketidakpastian ekonomi global mempengaruhi kondisi perekonomian nasional yang juga tercermin pada perkembangan perekonomian Banten. Perekonomian Banten pada triwulan II 2008 tumbuh 5,9% (y-o-y), turun dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan I 2008 sebesar 6,0 %. Dari sisi permintaan, perlambatan pertumbuhan ekonomi terutama didorong oleh perlambatan pertumbuhan konsumsi dan investasi. Faktor yang mempengaruhi perlambatan pertumbuhan konsumsi antara lain adalah daya beli masyarakat yang turun dan keyakinan konsumen yang relatif pesimis. Sementara perlambatan investasi masih dipengaruhi oleh iklim investasi dan permasalahan infrastruktur seperti sarana energi (listrik), jalan dan pelabuhan. Perlambatan juga dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi dunia dan domestik. Ekspor dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi dunia diperkirakan tumbuh relatif lebih rendah. Impor dipengaruhi oleh permintaan domestik dan internasional yang melemah diperkirakan tumbuh melambat. Dari sisi penawaran, perlambatan pertumbuhan terjadi pada hampir semua sektor, kecuali pada sektor listrik, bangunan, transportasi-komunikasi dan jasa-jasa.

A. SISI PERMINTAAN

Perekonomian Banten pada triwulan II 2008 tumbuh sekitar 5,9%, sedikit melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (6,0%) (Tabel I.1). Konsumsi dan investasi yang tumbuh melambat, sementara kontribusinya relatif tinggi, sehingga mendorong pelemahan kinerja perekonomian. Sementara pertumbuhan kegiatan ekspor impor juga tercatat sedikit menurun.

Tabel I. 1 Pertumbuhan Ekonomi Banten Sisi Permintaan (% y-o-y)

Banten	Q2-2007	Q1-2008*	Q2-2008*	Kontribusi Q2-2008
Konsumsi	7.1	6.7	6.6	4.0
Investasi	4.9	5.1	5.0	1.5
Ekspor	7.6	7.9	7.8	5.6
Impor	7.9	8.4	8.1	-5.2
PDRB	6.1	6.0	5.9	5.9

Sumber : BPS

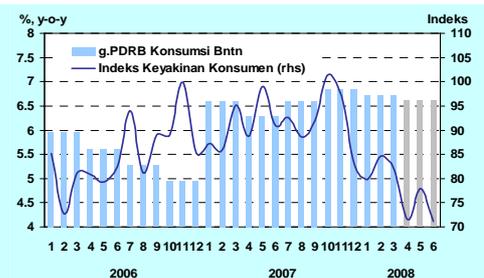
* angka sementara

1. Konsumsi

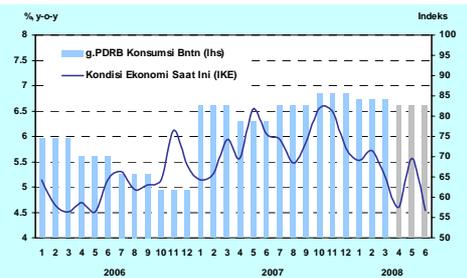
Pada triwulan II 2008, konsumsi Banten tumbuh 6,6%, sedikit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya (6,7%), namun demikian pertumbuhan tersebut masih pada level yang tinggi. Faktor yang mempengaruhi perlambatan pertumbuhan konsumsi antara lain adalah daya beli masyarakat yang relatif turun dan keyakinan konsumen yang relatif pesimis. Perlambatan tersebut dikonfirmasi oleh beberapa prompt indikator. Prompt indikator dimaksud seperti hasil survei, pembelian barang-barang tahan lama,

konsumsi semen, konsumsi BBM, informasi anekdotal. Sementara pembiayaan konsumsi dari bank tercatat masih tinggi.

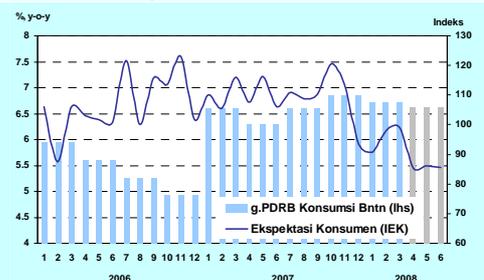
Hasil survei konsumen dan survei penjual eceran yang menurun, mengkonfirmasi perlambatan konsumsi. Indeks keyakinan konsumen relatif di bawah batas angka normal. Rendahnya indeks tersebut didorong oleh keyakinan konsumen terhadap kondisi saat ini maupun ekspektasi terhadap kondisi ekonomi ke depan. Perlambatan juga tercermin pada pertumbuhan indeks survei penjualan eceran yang menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan barang-barang relatif tidak setinggi triwulan sebelumnya (Grafik 1.1 – 4).



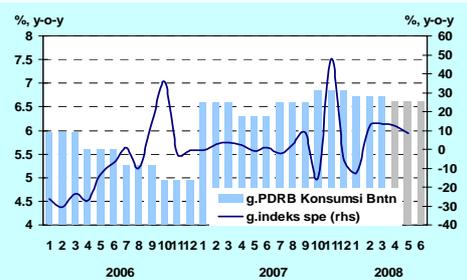
Grafik 1.1 Indeks Keyakinan Konsumen (SK-BI)



Grafik 1.2 Kondisi Ekonomi Saat ini (SK-BI)

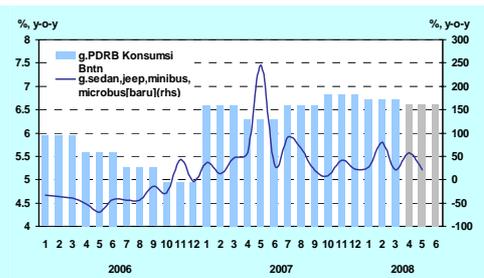


Grafik 1.3 Ekspektasi Konsumen (SK-BI)

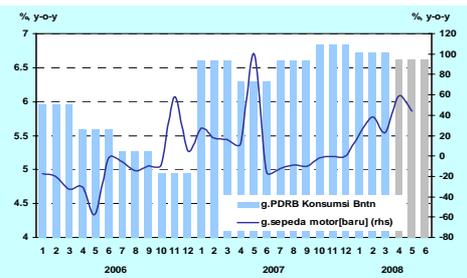


Grafik 1.4 Survei Penjualan Eceran

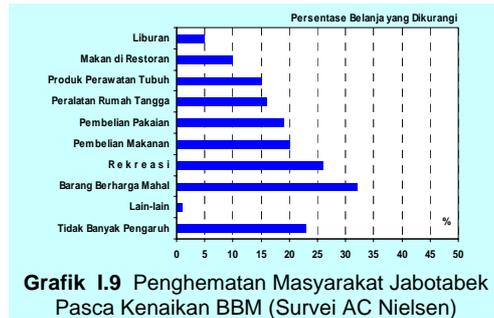
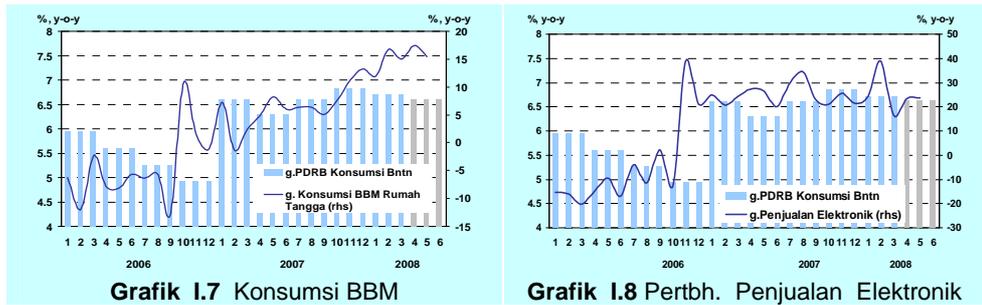
Konsumsi barang tahan lama yang tergolong barang mewah, seperti mobil, motor dan elektronik cenderung menurun, seiring penghematan yang dilakukan masyarakat pasca kenaikan harga BBM. Pendaftaran mobil dan motor baru yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah, pertumbuhannya relatif menurun. Demikian pula penjualan barang-barang elektronik pertumbuhannya relatif moderat. Sementara itu, konsumsi BBM masih relatif tinggi karena minat masyarakat untuk menggunakan kendaraan pribadi relatif tidak terpengaruh dengan kenaikan harga BBM.



Grafik 1.5 Pendaftaran Mobil di Banten



Grafik 1.6 Pendaftaran Motor di Banten

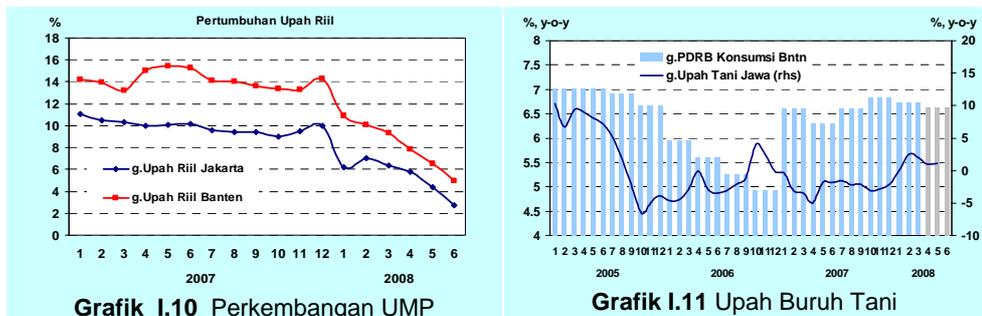


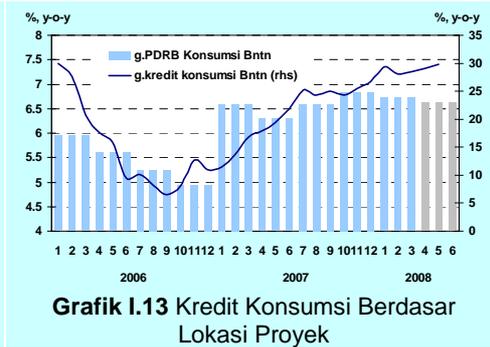
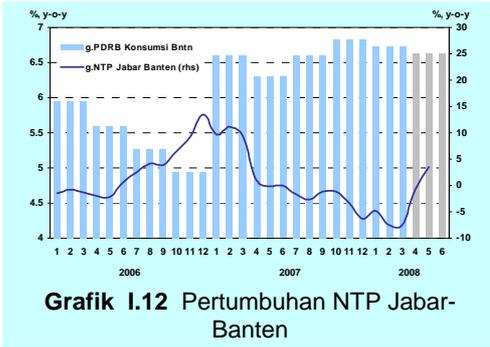
Daya beli yang dipantau dari pendapatan riil masyarakat tetap tumbuh terbatas. Pelemahan daya beli terutama terjadi pada golongan berpendapatan menengah ke bawah yang diindikasikan oleh perkembangan UMP riil, upah buruh tani dan nilai tukar petani yang tumbuh rendah, juga tercermin pada tingginya jumlah orang yang melakukan penghematan (Survei AC Nielsen). Jumlah penduduk golongan menengah kebawah (pendapatan di bawah Rp 1,5 juta) di Banten cukup tinggi, yaitu mencapai 83%.

Tabel I. 2 Strata Penghasilan

Strata	Penghasilan (Rp ribu)	Banten (%)
A1	> 3.000	2
A2	2.000 - 3.000	5
B	1.500 - 2.000	11
C1	1.000 - 1.500	23
C2	700 - 1.000	32
D	500 - 700	17
E	< 500	11

Sumber : AC Nielsen, 2007

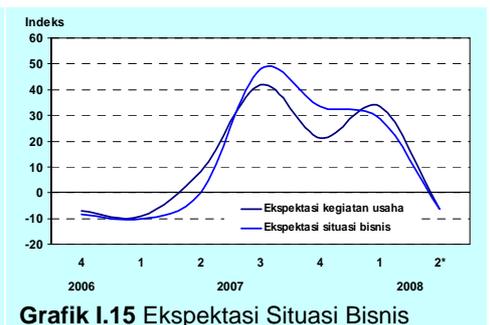
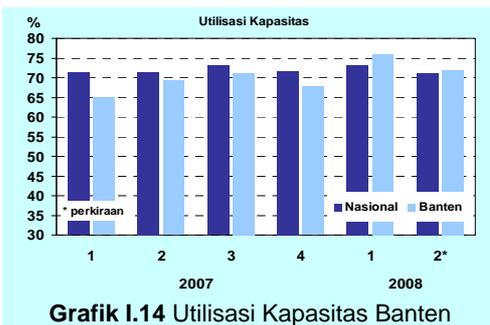




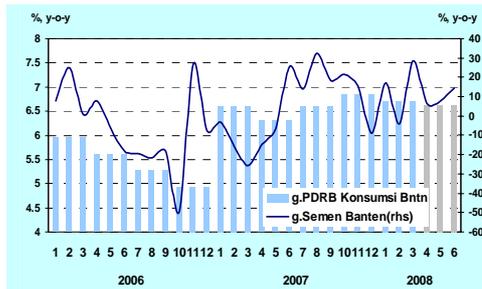
Walaupun secara keseluruhan konsumsi melambat, namun pembiayaan konsumsi tercatat masih tinggi. *Outstanding* kredit konsumsi perbankan sampai dengan Mei 2008 tumbuh 23,9 % (y-o-y) atau mencapai Rp 14,8 triliun. Masih tingginya permintaan kredit tersebut diduga dipengaruhi oleh persepsi sebagian masyarakat yang menganggap tingkat suku bunga masih relatif rendah.

2. Investasi

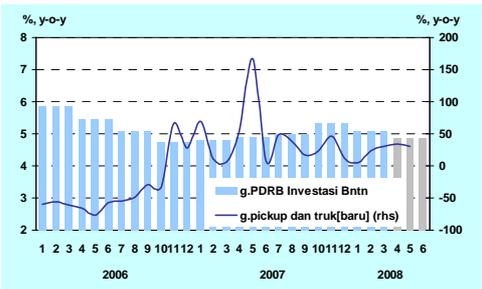
Pada triwulan II 2008, investasi diperkirakan tumbuh sebesar 5,0%, sedikit melambat dibandingkan triwulan I 2008 (5,1%). Iklim investasi yang belum optimal dengan kondisi infrastruktur yang masih terbatas, dan perkembangan ekonomi global dan domestik yang melambat diperkirakan menahan perkembangan investasi di triwulan laporan. Ditengah-tengah perkembangan investasi yang masih relatif rendah, Pemerintah Daerah tetap berupaya untuk memperbaiki iklim investasi melalui langkah-langkah, seperti sistem pelayanan satu atap yang ditujukan untuk memberikan kemudahan penyelesaian ijin dunia usaha dan sekaligus untuk mengurangi ekonomi biaya tinggi. Upaya ini juga telah dilakukan hingga sampai ke tingkat Pemda Kabupaten dan Kota.



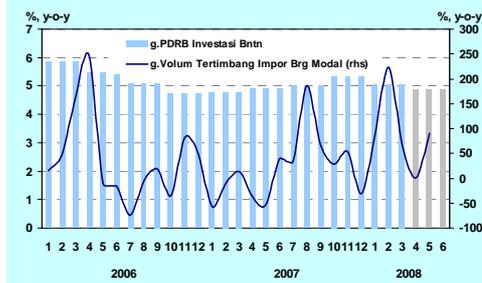
Perlambatan investasi dikonfirmasi dari beberapa prompt indikator. Beberapa *prompt* indikator tersebut antara lain adalah survei kegiatan dunia usaha (SKDU) dan penurunan beberapa prompt indikator yang lain. SKDU menunjukkan kondisi bisnis dan usaha ke depan relatif pesimis, kalangan usaha relatif memilih untuk mengoptimalkan kapasitasnya karena *share capacity*-nya masih tinggi. *Prompt* lain seperti konsumsi semen, pendaftaran truk dan alat berat, dan impor barang modal juga tumbuh terbatas, dan tidak setinggi triwulan sebelumnya (Grafik I.16-19).



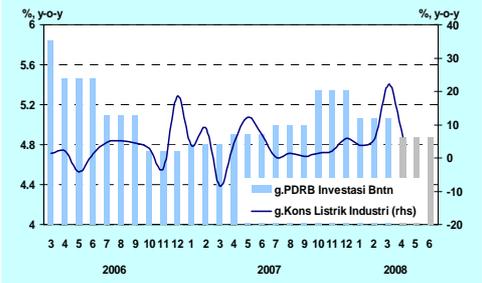
Grafik I.16 Konsumsi Semen Banten



Grafik I.17 Pendaftar Truk dan Alat Berat

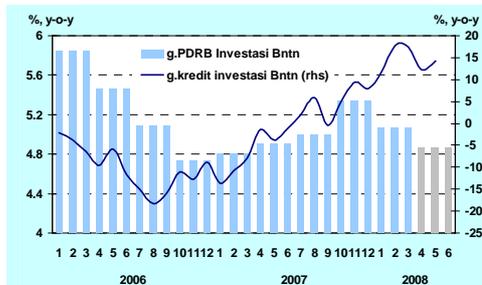


Grafik I.18 Impor Barang Modal

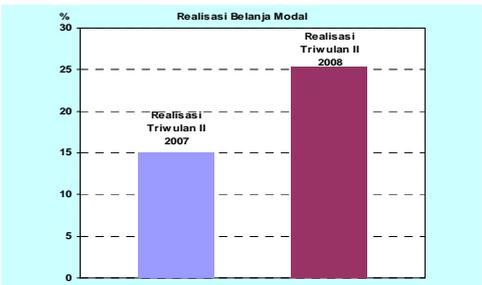


Grafik I.19 Konsumsi Listrik Industri Tangerang – Jakarta

Dari sisi pembiayaan, pembiayaan dari pemerintah relatif terbatas sedangkan kredit investasi perbankan masih tumbuh tinggi. Pembiayaan investasi yang berasal dari pemerintah sesuai dengan siklus anggaran diperkirakan masih belum optimal, terkendala masalah teknis karena relatif terlambatnya pengesahan RAPBD 2008, yaitu pada Februari 2008. Sementara itu, pembiayaan investasi yang berasal dari bank trendnya masih meningkat, tumbuh 42,5% (y-o-y).



Grafik I.20 Kredit Investasi Berdasar Lokasi Proyek

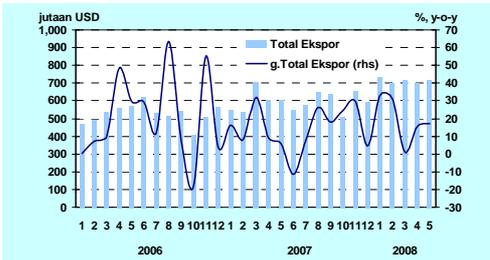


Grafik I.21 Perbandingan Realisasi APBD

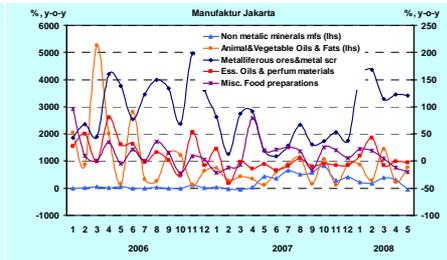
3. Kegiatan Ekspor-Impor

Ekspor Banten pada triwulan II 2008 tumbuh 7,8%, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (7,9%). Faktor yang mempengaruhi ekspor melambat terutama adalah perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional maupun pertumbuhan ekonomi dunia, khususnya untuk produk manufaktur. Dominasi Amerika Serikat sebagai negara tujuan ekspor, sementara negara tersebut perekonomiannya sedang melambat, berdampak terhadap pertumbuhan ekspor manufaktur Banten. Komoditi utama Banten antara lain adalah produk barang kimia, mesin dan perlengkapan

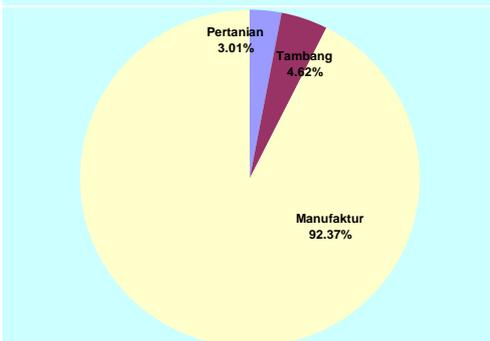
transportasi, pakaian dan sepatu serta barang-barang manufaktur lainnya.



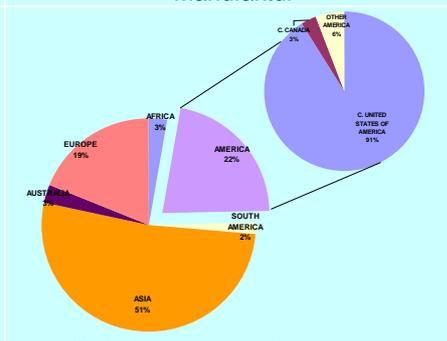
Grafik I.22 Perkembangan Nilai Ekspor



Grafik I.23 Perkemb. Vol. Ekspor Manufaktur

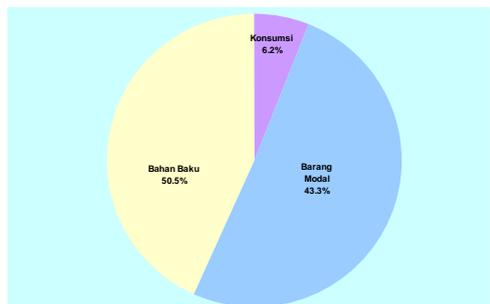


Grafik I.24 Proporsi Ekspor Berdasar Kelompok Komoditi

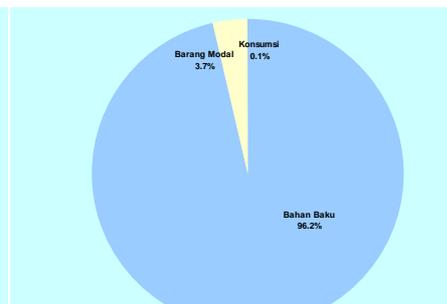


Grafik I.25 Proporsi Ekspor Berdasar Negara Tujuan

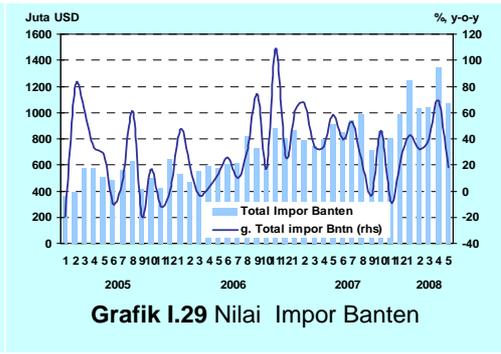
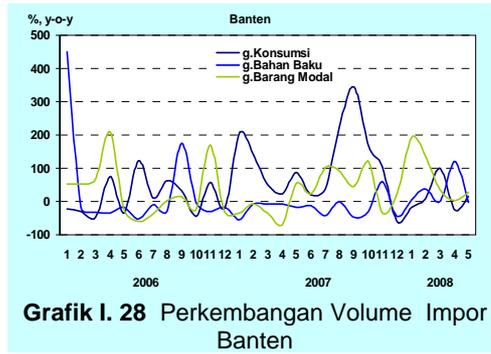
Sementara impor di triwulan II 2008 diperkirakan tumbuh 8,1%, turun tipis dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (8,4%). Faktor utama yang mempengaruhi perlambatan impor antara lain adalah perlambatan di sektor industri yang dalam proses produksinya kandungan impor bahan baku/mentahnya masih tinggi. Pada beberapa kelompok industri, seperti industri kimia misalnya, ketergantungan pada impor bahan baku yang tinggi menjadi salah satu penyebab terhambatnya ekspansi di kelompok industri ini.



Grafik I. 26 Proporsi Nilai Impor Banten



Grafik I. 27 Proporsi Vol. Impor Tertimbang Banten



B. SISI PENAWARAN

Dari sisi penawaran, seiring perlambatan sisi permintaan, beberapa sektor utama, yaitu sektor perdagangan, industri dan pertanian terjadi penurunan pertumbuhan. Di sektor industri, selain mengalami perlambatan pertumbuhan karena melambatnya permintaan juga dihadapkan pada tekanan kenaikan biaya produksi sebagai akibat dari kenaikan harga BBM dunia dan kenaikan harga bahan baku/mentah. Sedangkan sektor listrik, bangunan, transportasi-komunikasi dan jasa-jasa sedikit meningkat. Secara keseluruhan perekonomian Banten di triwulan II 2008 sedikit melambat namun masih pada level yang tinggi. Sektor yang tumbuh relatif tinggi merupakan sektor yang padat modal, sementara sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak tumbuh rendah.

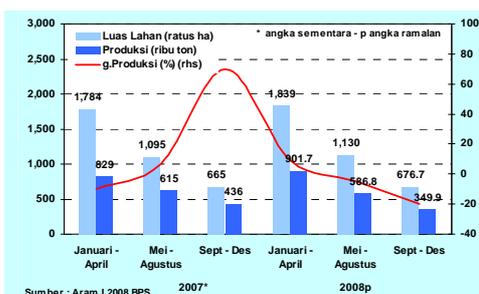
Tabel I. 3 Pertumbuhan Ekonomi Banten Sisi Penawaran (% , y-o-y)

Banten	Q2-2007	Q1-2008*	Q2-2008*	Kontribusi Q2-2008
Pertanian	5.4	5.6	2.6	0.2
Pertambangan	15.6	13.1	7.6	0.0
Industri	4.0	2.5	2.1	1.0
Listrik	4.2	3.1	4.6	0.2
Bangunan	9.2	10.6	15.0	0.4
Perdagangan	10.0	13.7	12.5	2.3
Pengangkutan	5.8	6.0	6.1	0.5
Keuangan	13.0	13.6	13.2	0.4
Jasa-jasa	8.7	7.9	13.0	0.6
PDRB	6.1	6.0	5.9	5.9

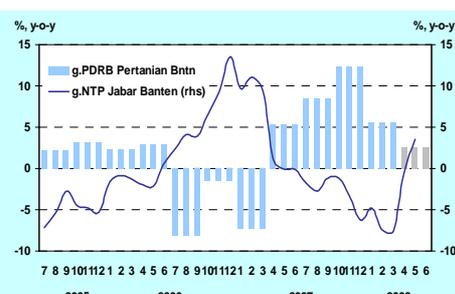
Sumber : BPS
* angka sementara

1. Pertanian

Kinerja di sektor pertanian pada triwulan II 2008 tumbuh 2,6%, melambat dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya (5,6%). Faktor utama yang mempengaruhi relatif melambatnya pertumbuhan di sektor pertanian terutama adalah luas lahan tanam yang relatif menurun karena memasuki musim kering, sehingga ketersediaan air relatif terbatas. Sehingga diperkirakan produksi padi relatif menurun dari 902 ribu ton menjadi 567 ribu ton.



Grafik I.30 Luas Lahan dan Produksi Beras Banten



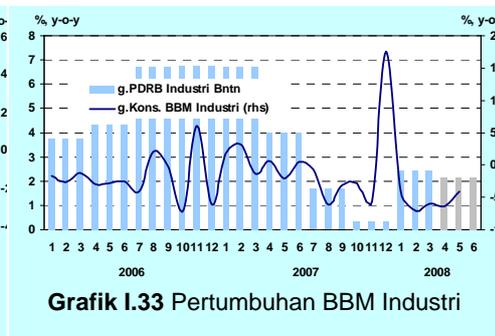
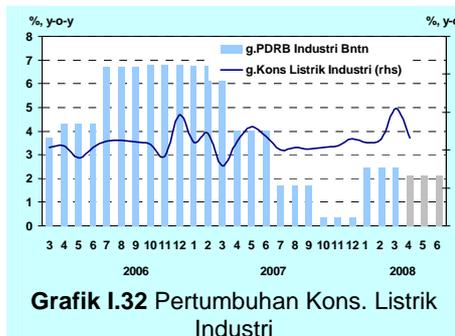
Grafik I.31 Nilai Tukar Petani

Hasil panen padi yang rata-rata dijual ke luar Banten, patut diwaspadai ketersediaan bagi masyarakat Banten. Kebutuhan dan stok masyarakat Banten yang tercukupi kiranya menjadi prioritas sebelum dijual ke luar daerah. Terutama terkait penurunan produksi beras yang diperkirakan terjadi hingga triwulan terakhir 2008. Hal tersebut kiranya perlu koordinasi antara petani, Pemda dan instansi terkait guna mencukupi ketersediaan bahan makanan Banten.

Harga jual produk pertanian relatif naik dibandingkan peningkatan biaya tanam seperti harga pupuk, biaya tenaga kerja dan peralatan, sehingga nilai tukar petani relatif naik. Kenaikan harga jual diperkirakan juga didorong oleh upaya Pemerintah menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah dan Beras yang diatur melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2008 tentang Kebijakan Perberasan, yang mulai berlaku 22 April 2008. Harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani yang sebelumnya ditetapkan senilai Rp 2.000 per kilogram (kg) berdasar Inpres Nomor 3/2007 naik menjadi Rp 2.200 per kg. Harga Gabah Kering Giling (GKG) di gudang Bulog naik dari Rp 2.600 per kg menjadi Rp 2.840 per kg. Sementara, harga beras di gudang Bulog juga naik dari Rp 4.000 per kg menjadi Rp4.300 per kg. Petani hendaknya menghindari sistem ijon yang merugikan karena harga jual produk pertanian menjadi lebih rendah. Di sisi lain upaya ketersediaan stok untuk menghindari kenaikan harga produk pertanian, karena bobotnya yang relatif tinggi dalam keranjang inflasi.

2. Industri

Pada triwulan II 2008, sektor industri tumbuh 2,1 % (y-o-y), sedikit menurun dibandingkan dengan triwulan I 2008 (2,5%). Beberapa faktor yang diduga mempengaruhi pertumbuhan di sektor industri Banten, antara lain adalah permintaan domestik dan internasional terhadap produk industri di Banten yang melemah. Indikator menunjukkan bahwa ekspor produk manufaktur Banten tumbuh melambat, demikian pula impor bahan baku. *Prompt* indikator lain yang mendukung antara lain adalah penurunan pertumbuhan konsumsi listrik dan pertumbuhan jumlah pelanggan listrik oleh industri yang mencerminkan bahwa kegiatan produksi relatif menurun.

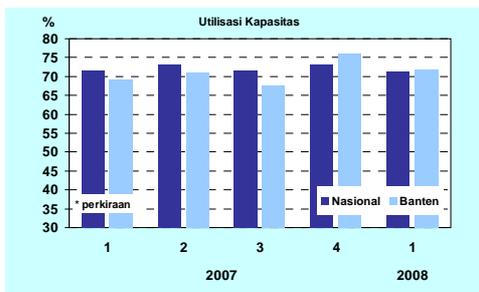


Dari sisi survei, perlambatan di sektor industri juga tercermin pada penggunaan kapasitas Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) dan juga perkembangan indeks produksi industri (IPI). Hasil SKDU menunjukkan bahwa penggunaan kapasitas oleh industri-

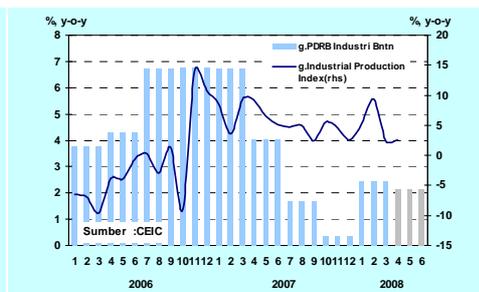
industri yang berlokasi di Banten turun (71,9%) dari sebelumnya 76,1%. Kemudian dikonfirmasi dengan indeks produksi industri, beberapa industri besar di Banten, seperti industri kimia, industri mesin, logam dasar memperlihatkan bahwa indeks produksinya juga tumbuh relatif menurun.

Tabel I. 4 Penggunaan Kapasitas Banten

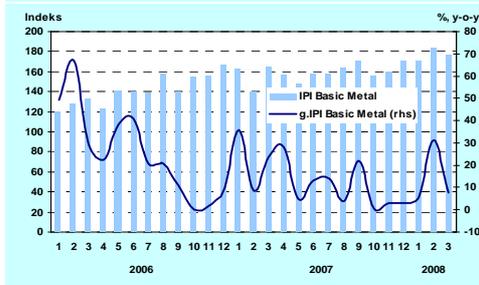
SEKTOR	2007				2008
	1	2	3	4	1
INDUSTRI PENGOLAHAN	69.3	71.1	67.7	76.1	71.9
A. Industri Non Migas					
1. Makanan, minuman dan tembakau	50.0	68.5	41.5	72.67	64.33
2. Tekstil, barang kulit dan alas kaki	75.0	72.7	70.4	84.5	75
3. Barang kayu dan hasil hutan lainnya			80.0		78
4. Kertas dan barang cetakan			100.0	100	100
5. Kimia dan barang dari karet	62.5	65.0	68.3	85	61.5
6. Semen dan barang galian bukan loga,					
7. Logam dasar, besi dan baja				20	
8. Alat angkutan, mesin dan peralatannya	60.0	55.0	60.0		
9. Barang Lainnya	100.0	100.0			
Banten	69.3	71.1	67.7	76.1	71.9



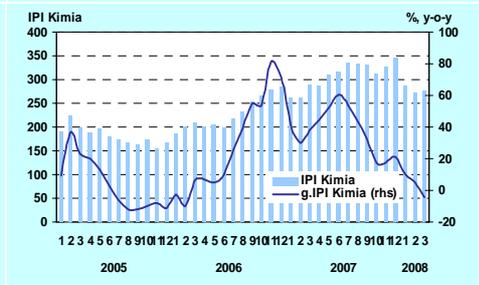
Grafik I. 34 Penggunaan Kapasitas Banten



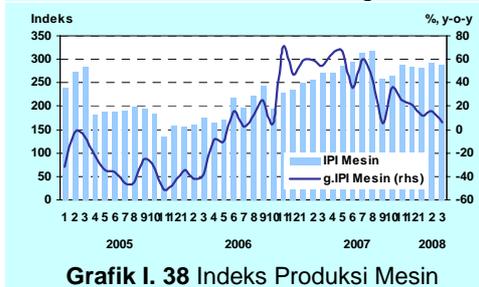
Grafik I. 35 Indeks Produksi Industri



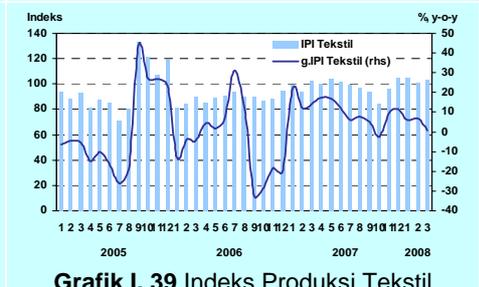
Grafik I. 36 Indeks Produksi Logam Dasar



Grafik I. 37 Indeks Produksi Kimia



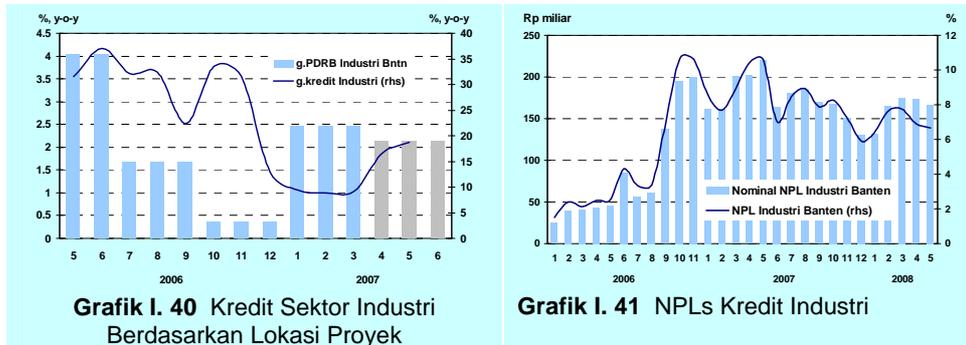
Grafik I. 38 Indeks Produksi Mesin



Grafik I. 39 Indeks Produksi Tekstil

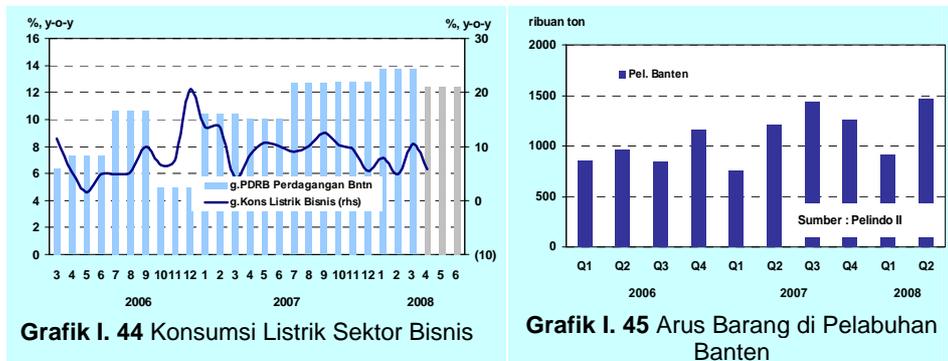
Sementara itu dari sisi pembiayaan, dukungan kredit perbankan masih meningkat cukup tinggi namun dengan tren kualitas kredit yang masih harus diperbaiki. *Outstanding* kredit lokasi proyek yang disalurkan ke sektor industri Banten pada posisi bulan Mei 2008

adalah Rp 18,9 triliun, naik 18,7% (y-o-y). Sementara itu, resiko kredit di sektor industri yang tercermin pada besaran NPLs masih cukup tinggi, yaitu sebesar 6,7%.



3. Perdagangan, Hotel dan Restoran

Sektor perdagangan hotel dan restoran pada triwulan II 2008 tumbuh sebesar 12,5% (y-o-y), melambat dibandingkan dengan triwulan I 2008 (13,7%). Faktor yang mempengaruhi perlambatan di sektor perdagangan diperkirakan adalah daya beli masyarakat yang relatif masih terbatas pertumbuhannya. Beberapa prompt indikator mendukung adanya perlambatan di sektor ini antara lain adalah perkembangan arus barang di pelabuhan Banten dan penurunan pertumbuhan konsumsi listrik sektor bisnis seperti mal, pasar, toko dan pusat bisnis lainnya.



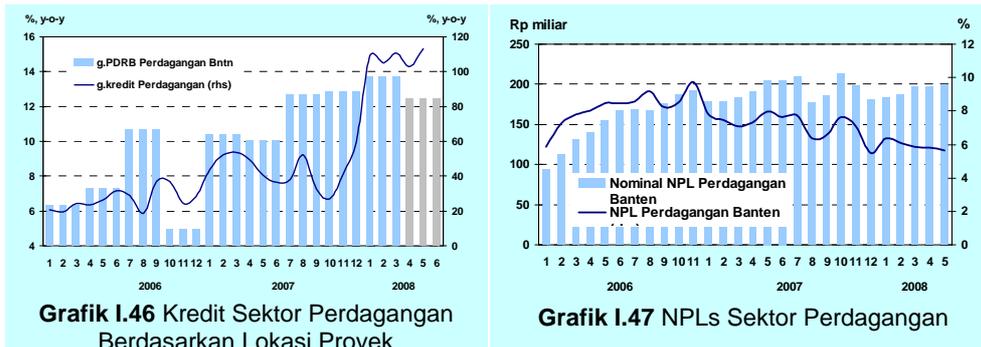
Tabel I. 5 Perkembangan Arus Barang dan Jasa di Pelabuhan Banten

Pelabuhan	Satuan	2007				2008		
		Q1	Q2	Q3	Q4	2007	Q1	Q2
Banten								
Bongkar	ton	453,774	761,935	1,113,301	674,433	3,003,443	565,625	1,097,559
Muat	ton	109,306	151,448	106,878	246,846	614,478	93,007	156,757
Ekspor	ton	14,418	7,747	8,180	104,147	134,492	47,168	22,526
Impor	ton	177,929	288,674	203,787	227,755	898,145	212,797	183,628
Pertumbuhan								
Bongkar	%	-25.15	23.98	108.87	-11.85	19.24	24.65	44.05
Muat	%	28.93	25.59	-29.35	45.93	16.87	-14.91	3.51
Ekspor	%	76.47	-12.54	101.28	2592.53	438.83	227.15	190.77
Impor	%	10.23	33.19	32.27	2.23	18.96	19.60	-36.39

Sumber : PT Persero Pelabuhan Indonesia II

Sementara itu, sub sektor hotel dan restoran diperkirakan juga masih tumbuh terbatas. Faktor yang menyebabkan perkembangan di sub sektor ini relatif lambat antara lain adalah kondisi infrastruktur,

khususnya infrastruktur jalan di Banten yang menuju ke tempat wisata hampir 40% rusak. Kerusakan jalan antara lain terlihat di jalan utama jalur pariwisata Anyer dan Carita, khususnya di kawasan Pelabuhan Cigading. Kondisi infrastruktur yang buruk mengurangi minat wisatawan yang akan berkunjung ke Banten. Faktor yang lain yang perlu diperhatikan adalah perlunya diciptakan budaya masyarakat yang dapat mendukung pariwisata, sebagaimana yang terjadi di Bali dan Yogyakarta. Masyarakat perlu ditingkatkan pemahamannya bahwa pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan yang dapat memberi nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.



Namun demikian, dukungan pembiayaan dari bank terhadap sektor perdagangan masih meningkat, dengan tren kualitas kredit yang membaik. *Outstanding* kredit lokasi proyek yang disalurkan di sektor ini tumbuh tinggi (36,7%) dan posisi akhir Mei 2008 mencapai Rp 5,5 triliun. Sementara itu, *performance* kredit yang tercermin pada NPLs menunjukkan tren yang semakin membaik, walaupun persentasenya masih tinggi (5,7%).

4. Sektor Keuangan

Sektor keuangan tumbuh 13,2 % (y-o-y), sedikit menurun dibandingkan dengan triwulan I 2008 (13,6%). Faktor yang mempengaruhi perlambatan di sektor ini diperkirakan adalah nilai tambah sektor keuangan yang relatif menurun karena penurunan pendapatan kotor (*gross output*). Namun kegiatan intermediasi perbankan relatif meningkat yang diikuti dengan sedikit menurunnya NPLs.

Tabel I.6 Perkembangan Kegiatan Bank

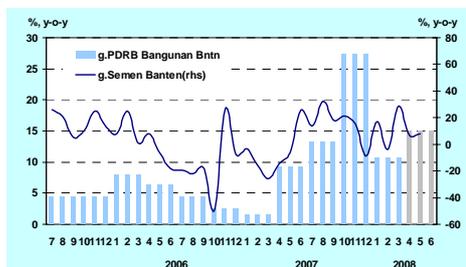
	Uraian		2007	2008	
			2	1	2*
Banten	DPK	Rp Miliar	26,537.0	28,997.6	30,431.3
	Pertumbuhan	(%, y-o-y)	14.3	2.4	13.6
	Kredit Lokasi Bank	Rp Miliar	19,712.0	22,686.4	23,718.0
	Pertumbuhan	(%, y-o-y)	27.4	22.1	23.7
	Kredit Lokasi Proyek	Rp Miliar	39,235.7	44,934.5	44,936.5
	Pertumbuhan	(%, y-o-y)	17.8	23.3	20.0
	LDR	(%)	74.28	78.24	77.94
	NPL	(%)	4.4	3.6	3.5
	UMKM (Rp Miliar)**	Rp Miliar	18,814.8	22,314.4	23,962.5
	Pert. (%, y-o-y)	(%, y-o-y)	20.2	30.6	31.0

*) s.d. Mei 2008

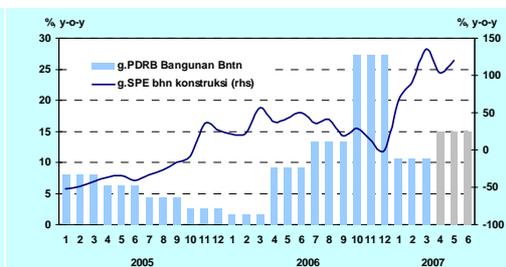
**) Sejak Triwulan 1 2007, termasuk KUMKM di Banten

5. Bangunan

Sektor bangunan pada triwulan II 2008 relatif meningkat tinggi (15,0%), dibandingkan dengan triwulan I 2008 (10,6%). Masih tingginya pertumbuhan di sektor bangunan dikonfirmasi oleh masih meningkatnya konsumsi semen dan pertumbuhan tinggi penjualan bahan konstruksi survei penjualan eceran. Faktor yang mempengaruhi masih tingginya pertumbuhan disektor ini antara lain masih tingginya permintaan masyarakat pada properti hunian (*strata title* dan *landed house*) dan masih maraknya pembangunan properti komersial di Banten, terutama di daerah-daerah yang berbatasan dengan Jakarta. Indikator lainnya adalah peningkatan kegiatan pembangunan infrastruktur seperti PLTU Labuan, pembangunan gedung perkantoran dan lain-lain.



Grafik I.48 Konsumsi Semen

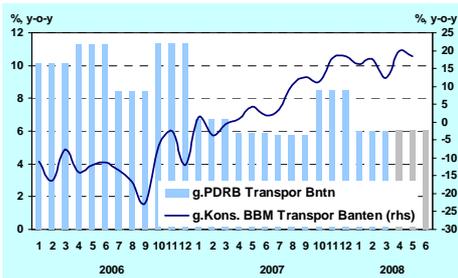


Grafik I.49 Survei Penjualan Eceran-BI

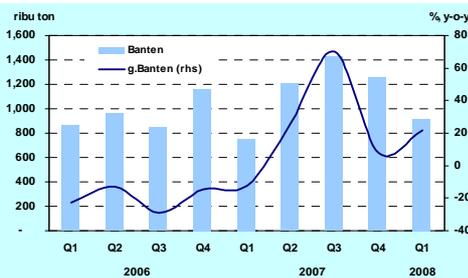
6. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

Sektor pengangkutan dan komunikasi tumbuh sebesar 6,1 % (y-o-y), relatif meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (6,0%). Di sub sektor transportasi, faktor yang mempengaruhi peningkatan di sub sektor ini antara lain adalah relatif tingginya peningkatan penyeberangan Merak-Bakauheni yang tercatat hingga lima kali lipat. Lonjakan tersebut bertepatan saat masa liburan sekolah, yang dapat mencapai 5.000 penumpang per hari dari normal yang sebesar 1.000 penumpang per hari. Lonjakan ini diantisipasi pihak Angkutan Danau Sungai dan Penyeberangan (ASDP) Merak dengan menyiapkan 10 armada tambahan. Peningkatan pertumbuhan

di sub sektor transportasi ini antara lain diindikasikan oleh masih tingginya konsumsi BBM transportasi. Konsumsi BBM transportasi meningkat 18,5% menjadi 135,5 juta liter pada triwulan II 2008. Konsumsi BBM transportasi terbesar adalah premium (86,6 juta liter) diikuti Solar (48,7 juta liter). Sementara sub sektor komunikasi diperkirakan tetap tumbuh tinggi, antara lain dipengaruhi oleh perilaku masyarakat yang sudah memasukkan sarana komunikasi sebagai kebutuhan pokok (gaya hidup), ditambah inovasi layanan sehingga mampu menjadikan harga lebih menarik dan terjangkau. Hal tersebut dapat menarik dan menjangkau masyarakat mengkonsumsi sektor komunikasi menjadi lebih besar.



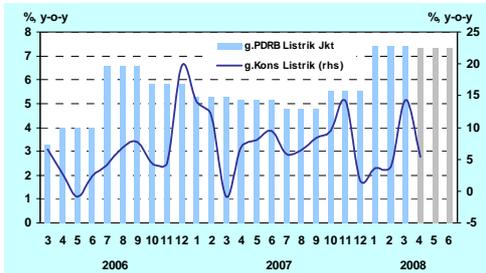
Grafik I. 50 Konsumsi BBM Sektor Transportasi Banten



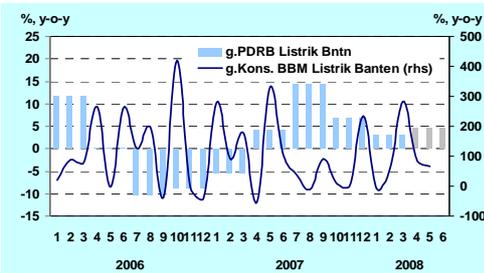
Grafik I. 51 Arus Barang di Pelabuhan Banten

7. Listrik

Sektor listrik tumbuh 4,6% (y-o-y), relatif meningkat dibandingkan triwulan I 2008 (3,1%). Faktor pendorong pertumbuhan di sektor listrik diperkirakan adalah proses percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya yang menggunakan tenaga batu bara. PLTU Banten Unit 1- 8, Suralaya dengan kapasitas 1X625 MW adalah salah satu dari 10 proyek pembangunan PLTU di Jawa, untuk menyediakan target pemenuhan 10 ribu MW.



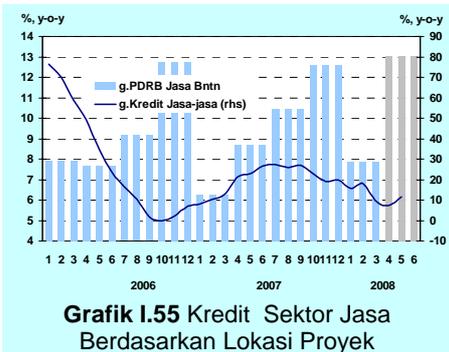
Grafik I. 52 Penjualan Listrik Jakarta dan Tangerang



Grafik I. 53 Konsumsi BBM Sektor Listrik Jakarta

8. Sektor Jasa-Jasa

Sektor jasa-jasa meningkat sebesar **13,0%**, dibandingkan triwulan I 2008 (**7,9%**). Faktor yang mempengaruhi peningkatan pertumbuhan di sektor ini terutama adalah terkait dengan datangnya musim liburan, sehingga di arus wisatawan yang ke Banten relatif meningkat. Potensi wisata yang dimiliki Banten selain wisata alam (pantai) juga wisata ziarah (seperti Keraton Surosowan, situs Banten Lama di Desa Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten dan Wihara Avalokitesvara). Pembiayaan sektor jasa masih tumbuh tinggi. Kredit dari perbankan tumbuh 11,5%, dengan *outstanding* s.d. Mei 2008 sebesar Rp 15,4 triliun.



Halaman ini sengaja dikosongkan

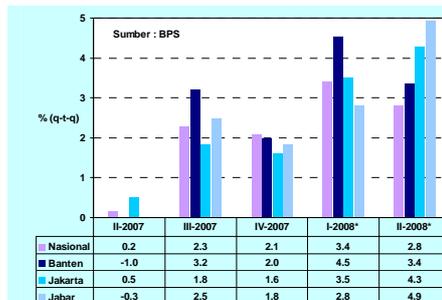
BAB II PERKEMBANGAN INFLASI BANTEN

Kestabilan harga di Banten pada triwulan II 2008 sedikit membaik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, walaupun masih pada level yang tinggi. Kenaikan harga BBM dan dampak lanjutannya, ekspektasi negatif konsumen dan meningkatnya harga beberapa komoditas penting yang di impor menyebabkan Inflasi di Banten pada triwulan II-2008 masih berada di level yang tinggi (3,4%, q-t-q), namun lebih rendah dibandingkan dengan inflasi triwulan sebelumnya sebesar 4,5%. Sementara itu, secara tahunan inflasi di Banten pada triwulan II-2008 adalah sebesar 13,8% (y-o-y) lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 9,0%. Inflasi triwulan II-2008 ini merupakan inflasi tertinggi sejak triwulan keempat 2006 baik dihitung secara triwulanan (q-t-q) maupun tahunan (y-o-y).

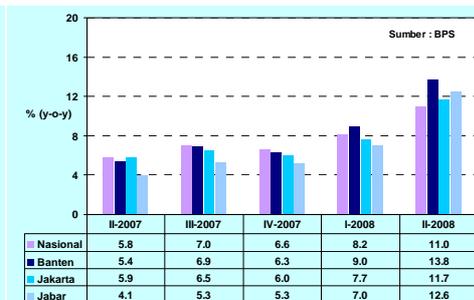
Walaupun laju inflasi cukup tinggi, namun demikian dibandingkan dengan DKI Jakarta dan Jawa Barat kestabilan harga di Banten relatif lebih baik. Secara triwulanan inflasi di Banten pada triwulan II-2008 lebih rendah dibandingkan dengan inflasi di Jakarta (4,3%) dan Jawa Barat (4,9%). Namun secara tahunan inflasi di Banten lebih tinggi dibandingkan Jakarta (11,7%) dan Jabar (12,6%).

Secara umum, faktor-faktor penyebab tekanan inflasi pada triwulan II-2008 antara lain

- Kenaikan Harga BBM dan dampak lanjutannya
- Ekspektasi inflasi yang masih tinggi.
- *Imported inflation*.
- Terdapatnya kenaikan harga minyak tanah karena program konversi minyak tanah ke gas.



Grafik II. 1 Inflasi Banten (q-t-q)



Grafik II. 2 Inflasi Banten (y-o-y)

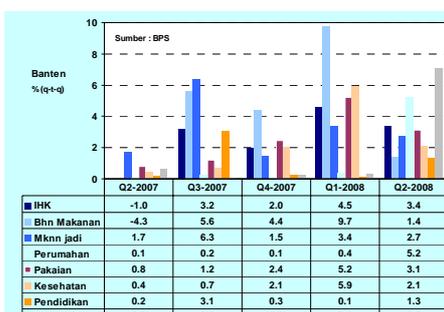
A. Inflasi Berdasarkan Kelompok

1. Inflasi Triwulanan (q-t-q)

Kenaikan harga tertinggi pada triwulan ini terjadi pada kelompok transportasi (7,1%) diikuti oleh perumahan (5,2%) dan pakaian (3,1%). Kenaikan tertinggi pada kelompok transportasi terjadi pada transportasi dalam kota serta sarana dan penunjang transportasi. Pada kelompok perumahan, kenaikan tertinggi terjadi pada jenis bahan bakar dan penerangan serta barang perlengkapan rumah tangga. Kenaikan tertinggi pada kelompok pakaian terjadi pada barang-barang pribadi dan barang sandang laki-laki.

Sumbangan terhadap inflasi tertinggi terjadi pada kelompok perumahan (5,2%), transportasi (0,9%) dan bahan makanan (0,5%). Sumbangan tersebut dihitung dari kenaikan harga dikali dengan bobot nilai konsumsi dari masing-masing kelompok komoditas. Kelompok perumahan memiliki bobot 23,7%, transportasi (13,0%) dan bahan makanan makanan (31,9%). Sumbangan kelompok perumahan terutama berasal jenis bahan bakar dan penerangan serta perlengkapan rumah tangga, yang juga mengalami kenaikan harga tertinggi. Sumbangan kelompok transportasi terutama berasal dari transportasi dan sarana penunjang transportasi. Sementara itu sumbangan kelompok bahan makanan terutama berasal dari padi-padian dan buah-buahan.

Kelompok dengan bobot nilai konsumsi tinggi belum tentu memberikan sumbangan terhadap inflasi. Kelompok makanan jadi yang mengalami kenaikan hanya sebesar 2,7% karena bobotnya hanya sebesar 17,3%, maka tidak memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap inflasi. Demikian pula kelompok pakaian, meskipun kenaikan harganya cukup tinggi (3,14%) namun dikarenakan hanya memiliki bobot sebesar 6,7% maka tidak memberikan sumbangan terhadap inflasi yang signifikan, yaitu hanya sebesar 0,2%.



Grafik II. 3 Inflasi Berdasarkan Kelompok



Grafik II. 4 Sumbangan Inflasi berdasarkan kelompok

Tabel II. 1 Komoditi Dengan Kenaikan Harga Tertinggi

	Inflasi q-t-q	
	Kenaikan	Kontribusi
UMUM	3.37	3.37
BAHAN MAKANAN	1.41	0.50
Buah - buahan	9.20	0.20
Padi-padian, Umbi-umbian dan Hasilnya	6.29	0.52
MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK	2.70	0.47
Minuman yang Tidak Beralkohol	3.74	0.12
Makanan Jadi	2.90	0.27
PERUMAHAN, AIR, LISTRIK & BH BAKAR	5.25	1.10
Bahan Bakar, Penerangan dan Air	10.22	0.66
Perlengkapan Rumah tangga	5.38	0.09
SANDANG	3.14	0.21
Barang Pribadi dan Sandang Lain	6.62	0.12
Sandang Laki-laki	2.31	0.04
KESEHATAN	2.11	0.06
Perawatan Jasmani dan Kosmetika	3.30	0.06
Obat-obatan	1.70	0.01
PENDIDIKAN, REKREASI DAN OLAH RAGA	1.33	0.07
Kursus-kursus / Pelatihan	25.13	0.04
Perlengkapan / Peralatan Pendidikan	1.98	0.01
TRANSPOR, DAN KOMUNIKASI	7.12	0.80
Transpor	11.51	1.02
Sarana dan Penunjang Transpor	0.95	0.00

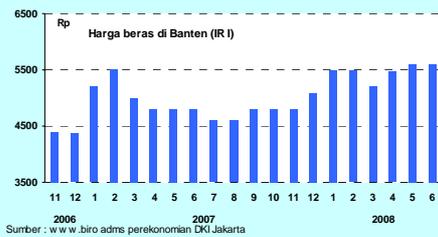
Sumber : BPS, diolah

Tabel II. 2 Komoditi Dengan Sumbangan Inflasi Tertinggi

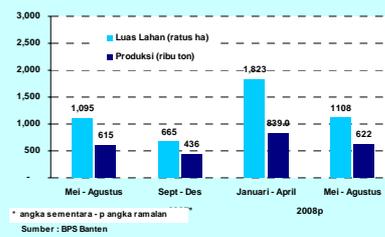
	Inflasi q-t-q	
	Kenaikan	Kontribusi
UMUM	3.37	3.37
BAHAN MAKANAN	1.41	0.50
Padi-padian, Umbi-umbian dan Hasilnya	6.29	0.52
Buah - buahan	9.20	0.20
MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK	2.70	0.47
Makanan Jadi	2.90	0.27
Minuman yang Tidak Beralkohol	3.74	0.12
PERUMAHAN, AIR, LISTRIK & BH BAKAR	5.25	1.10
Bahan Bakar, Penerangan dan Air	10.22	0.66
Biaya Tempat Tinggal	2.89	0.32
SANDANG	3.14	0.21
Barang Pribadi dan Sandang Lain	6.62	0.12
Sandang Laki-laki	2.31	0.04
KESEHATAN	2.11	0.06
Perawatan Jasmani dan Kosmetika	3.30	0.06
Obat-obatan	1.70	0.01
PENDIDIKAN, REKREASI DAN OLAH RAGA	1.33	0.07
Kursus-kursus / Pelatihan	25.13	0.04
Perlengkapan / Peralatan Pendidikan	1.98	0.01
TRANSPOR, DAN KOMUNIKASI	7.12	0.80
Transpor	11.51	1.02
Sarana dan Penunjang Transpor	0.95	0.00

Sumber : BPS, diolah

Komoditi beras sebagai komoditi dengan bobot tertinggi (24%) dalam kelompok bahan makanan mengalami inflasi sebesar 2,9% (q-t-q), naik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya 2,3%). Pasokan beras pada triwulan II-2008 mengalami penurunan akibat belum datangnya masa panen. Pada bulan Mei dan Juni 2008, pasokan beras ke Banten menurun yang lebih diakibatkan oleh belum panennya beberapa daerah Jawa Barat yang merupakan daerah lumbung padi. Jawa Barat merupakan daerah pemasok 60% padi ke PIBC. Jika pasokan padi ke PIBC terhambat, maka jumlah pasokan padi ke Banten mengalami penurunan. Sementara itu kenaikan harga beras di Banten diperkirakan tidak sepenuhnya dinikmati oleh petani setempat karena hanya sebagian petani yang menjual berdasarkan harga pembelian pemerintah (HPP) Rp 2.000 per kg gabah kering giling (GKG). Sebagian petani lainnya menjual kepada pasar dengan harga Rp 1.700 karena prosesnya lebih cepat dan tidak memerlukan syarat kadar air 25%, kadar hampa 10% dan beberapa ketentuan lain



Grafik II.5 Perkembangan Harga Beras



Grafik II. 6 Luas Lahan dan Produksi Beras di Banten

Tabel II. 3 Produksi Beras Banten

Periode Tanam	2006	2007	2008
Januari - April	920.1	828.8	838.9
Mei - Agustus	574.8	614.5	622.0
Sept - Des	256.6	372.6	377.2
Total	1,751.5	1816.0	1,838.0

Sumber : BPS Banten, diolah

Tabel II.4 Harga bahan Pokok di Banten

Komoditas	Rata-rata I-2008	Rata-rata II-2008	(%)
Banten (Rp)			
Beras IR I	5,398	5,555	2.9
Gula lokal	6,013	6,193	3.0
Minyak goreng curah	10,583	10,817	2.2
Tepung Terigu	7,357	7,453	1.3
Susu Bendera	24,790	25,400	2.5
Daging Sapi	55,500	49,000	-11.7
Telur Ayam Ras	11,390	15,333	34.6

Sumber : Departemen Perdagangan RI

Pada triwulan II 2008, rata-rata harga bahan makanan kecuali untuk tepung terigu dan minyak goreng cukup terkendali. Harga tepung terigu sempat menyentuh angka Rp 7.300 per liter dan harga minyak goreng Rp 14.000 per kg. Secara-rata-rata, harga minyak goreng dan terigu pada bulan tersebut meningkat masing-masing 40% dan 30%. Kenaikan komoditi tersebut meskipun tidak langsung memberi kontribusi pada inflasi, namun membawa dampak secara tidak langsung melalui kenaikan kelompok makanan jadi. Kenaikan harga makanan yang menggunakan tepung dan minyak goreng tertinggi terjadi pada roti tawar yang meningkat 30%, kue-kue 26% dan mie 4%. Sementara itu harga ayam potong di Banten meningkat seiring dengan kenaikan harga pakan ternak dan meningkatnya permintaan.

Harga hewan ayam broiler meningkat akibat penurunan produksi ayam sebesar 30%. Penurunan produksi tersebut sengaja dilakukan peternak di Banten karena kenaikan harga pakan ternak dan biaya perawatan ternyata tidak dapat mengangkat harga ayam ras. Saat ini harga telah mencapai angka keseimbangan, yaitu Rp 16.000 setelah

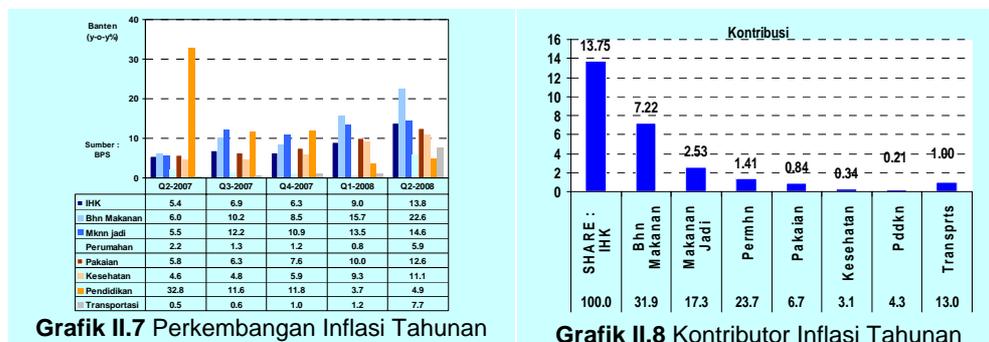
sebelumnya sempat meningkat sebesar Rp 17.000. Sementara itu Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Gondorong Cipondoh harga daging sapi kembali normal pada kisaran harga Rp 52.000 per kg.

Harga minyak goreng khususnya minyak goreng curah dipengaruhi oleh gangguan pasokan meningkat sampai 200%. Di pasar tradisional Serang, minyak goreng curah pada bulan Maret 2008 sempat mencapai harga Rp 14.000, lebih mahal dari pada minyak goreng bermerek sehingga masyarakat banyak beralih ke minyak goreng bermerek. Untuk mengurangi tekanan terhadap harga minyak goreng, pemerintah melakukan operasi pasar minyak goreng. Dalam triwulan I-2008, telah dilakukan operasi pasar minyak goreng sebanyak 4 x masing-masing ke Kab. Serang, Kab. Tangerang, Kab. Lebak dan Kota Serang dengan jumlah migor sebanyak 107.814 liter.

Sementara itu, di kelompok perumahan terjadi harga batu bata dan disisi lain harga kayu relatif stabil. Turunnya hujan menyebabkan tidak dapat diproduksinya batu bata. Di tengah-tengah permintaan yang tetap tinggi maka harga batu bata meningkat hingga 50%. Sementara itu harga kayu tetap stabil karena stok komoditi tersebut cukup banyak.

2. Inflasi Tahunan (y-o-y)

Dilihat secara tahunan, inflasi y-o-y Banten pada triwulan II-2008 13,8%, naik dibandingkan pada triwulan sebelumnya 9,0%. Secara tahunan tekanan harga tertinggi terjadi pada kelompok bahan makanan, makanan jadi dan pakaian.



Secara tahunan, sumbangan terhadap inflasi tertinggi terjadi pada kelompok bahan makanan (7,22%), makanan jadi (2,53%) dan perumahan (1,41%). Sumbangan tersebut dihitung dari kenaikan harga dikali dengan bobot nilai konsumsi masing-masing. Bahan makanan memiliki bobot 31,9%, makanan jadi (17,3%) dan perumahan (23,7%). Kelompok sandang yang meskipun mengalami kenaikan harga cukup tinggi (12,6%), namun karena memiliki bobot cukup rendah maka kelompok tersebut bukan merupakan penyumbang utama bagi inflasi di Banten secara tahunan. Dilihat dari kelompok sub komoditas, secara tahunan penyumbang inflasi terbesar adalah sub kelompok kacang-kacangan, padi-padian, makanan kaleng dan tembakau, biaya tempat tinggal dan transportasi dalam kota.

Tabel II.5 Komoditas Kenaikan Harga Terbesar

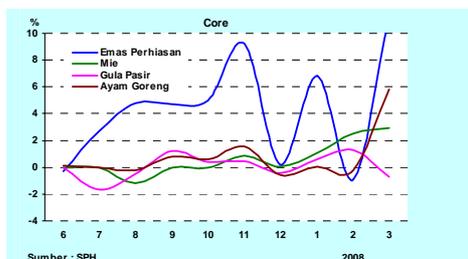
	Inflasi y-o-y	
	Kenaikan	Kontribusi
UMUM	13.76	13.76
BAHAN MAKANAN	22.61	8.03
Kacang - kacang	46.55	1.79
Bumbu - bumbu	42.15	1.30
MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK	14.58	2.56
Makanan Jadi	18.66	1.71
Tembakau dan Minuman Beralkohol	12.08	0.63
PERUMAHAN, AIR, LISTRIK & BH BAKAR	5.94	1.25
Bahan Bakar, Penerangan dan Air	7.90	0.51
Perlengkapan Rumah tangga	7.82	0.13
SANDANG	12.56	0.83
Barang Pribadi dan Sandang Lain	41.47	0.75
Sandang Laki-laki	5.12	0.09
KESEHATAN	11.10	0.34
Jasa Kesehatan	14.10	0.11
Perawatan Jasmani dan Kosmetika	11.57	0.20
PENDIDIKAN, REKREASI DAN OLAH RAGA	4.86	0.25
Kursus-kursus / Pelatihan	32.84	0.05
Perlengkapan / Peralatan Pendidikan	9.18	0.06
TRANSPOR, DAN KOMUNIKASI	7.71	0.87
Transpor	12.10	1.08
Jasa Keuangan	4.80	0.00

Tabel II.6 Komoditas Penyumbang Inflasi terbesar

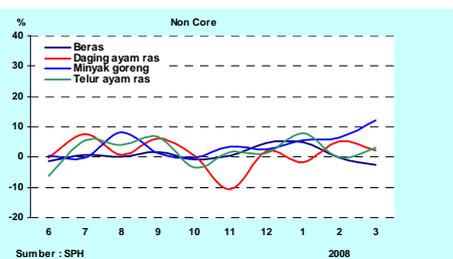
	Inflasi y-o-y	
	Kenaikan	Kontribusi
UMUM	13.76	13.76
BAHAN MAKANAN	22.61	8.03
Kacang - kacang	46.55	1.79
Padi-padian, Umbi-umbian dan Hasilnya	16.21	1.35
MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK	14.58	2.56
Makanan Jadi	18.66	1.71
Tembakau dan Minuman Beralkohol	12.08	0.63
PERUMAHAN, AIR, LISTRIK & BH BAKAR	5.94	1.25
Biaya Tempat Tinggal	4.89	0.54
Bahan Bakar, Penerangan dan Air	7.90	0.51
SANDANG	12.56	0.83
Barang Pribadi dan Sandang Lain	41.47	0.75
Sandang Laki-laki	5.12	0.09
KESEHATAN	11.10	0.34
Perawatan Jasmani dan Kosmetika	11.57	0.20
Jasa Kesehatan	14.10	0.11
PENDIDIKAN, REKREASI DAN OLAH RAGA	4.86	0.25
Pendidikan	4.22	0.14
Perlengkapan / Peralatan Pendidikan	9.18	0.06
TRANSPOR, DAN KOMUNIKASI	7.71	0.87
Transpor	12.10	1.08
Sarana dan Penunjang Transpor	4.76	0.02

B. Inflasi Berdasarkan Inflasi Inti dan Non Inti

Kenaikan inflasi IHK pada triwulan II-2008 bersumber dari non inti. Kontribusi inflasi non inti diperkirakan lebih besar terhadap Inflasi IHK, yang antara lain disebabkan oleh kenaikan harga BBM dan dampak lanjutannya, ekspektasi negatif konsumen, dan gangguan pasokan pada beberapa komoditas penting. Sementara peningkatan inflasi inti yang relatif rendah antara lain disebabkan oleh relatif rendahnya tekanan inflasi. Peningkatan harga beberapa komoditi yang tergolong komoditas inti lebih disebabkan oleh tekanan dari sisi biaya, sejalan dengan kenaikan harga beberapa komoditas penting yang diimpor dan kenaikan harga BBM.



Grafik II.9 Perkembangan Harga Beberapa Komoditi Dalam Inflasi Inti



Grafik II.10 Perkembangan Harga Beberapa Komoditi Dalam Inflasi Non Inti

Tabel II. 7 Tarif Kapal Ro Ro

Tabel II.8 Harga BBM di Pertamina UPMS III

Jenis	2006	2007	(%)	Jenis	2008	2008			I-08/II-08 (%)
					Mar	April	Mei	Jun	
Penumpang				Premium	4,500	6,000	6,000	6,000	0.00
Dewasa	7,700	9,000	16.9	Pertamax Plus	8,300	8,600	9,250	10,300	6.41
Anak-anak	4,500	5,000	11.1	Pertamax	8,100	8,300	8,950	10,000	8.72
Kendaraan				Pertamax Dex	9,100	10,200	11,100	12,700	5.81
Gol I	14,500	16,000	10.3	Minyak Tanah	2,000	2,000	7,736	7,736	0.00
Gol II	20,000	23,000	15.0	Minyak Solar	4,300	7,780	7,780	7,780	0.00
Gol III	65,000	70,000	7.7						
Mobil Pribadi	146,000	165,000	13.0						
Mobil Pengangkut Barang	145,000	155,000	6.9						
Truk	203,000	242,000	19.2						

Sumber : ASDP

*) Harga Tanpa Subsidi
Sumber : Pertamina

Tabel II. 9 Harga Bahan Pokok di Banten

No	Nama Bahan Pokok dan Jenisnya	Mar-08	Apr-08	May-08	Jun-08
1	BERAS				
	IR KW I	4,933	4,750	5,650	5,716
	IR KW II	4,567	4,367	5,217	5,378
	IR KW III	4,383	4,250	4,850	4,769
2	GULA PASIR				
	- Impor	6,450	6,450	6,450	6,833
	- Lokal	6,367	6,150	6,250	6,269
3	MINYAK GORENG				
	- Bimoli	14,192	14,000	13,746	12,600
	- Tanpa Merk	12,428	10,700	11,130	10,053
4	MINYAK TANAH	2,900	2,800	3,250	3,191
5	DAGING				
	- Daging Sapi	51,833	50,000	50,333	48,646
	- Daging Ayam Negeri	18,167	18,333	19,917	18,006
	- Daging Ayam Kampung	32,167	28,833	28,833	
	- Daging Kerbau	49,333	48,667	48,500	
6	TELUR				
	- Telur Ayam Negeri	12,250	13,000	12,250	11,989
	- Telur Ayam Kampung	1,383	1,433	1,433	1,433
	- Telur Bebek	1,433	1,325	1,325	1,325
7	IKAN ASIN TERI (Medan)	38,950	40,333	40,833	42,885
8	Susu				
	Kental Manis				
	- Merk Bendera	7,517	7,517	7,550	7,550
	- Merk Indomilk	7,217	7,400	7,383	7,383
	Susu Bubuk				
	- Merk Bendera	23,000	23,250	23,167	23,167
	- Merk Dancow	24,708	27,625	27,375	27,375
9	TEPUNG TERIGU				
	- Segi Tiga Biru	7,183	7,033	7,000	7,515
10	GARAM BERYODIUM				
	- Halus	567	567	567	567
	- Bata	963	963	963	963

Sumber : BPS Propinsi Banten

Box 1 : Struktur IHK Berdasarkan SBH 2007

Inflasi merupakan salah satu indikator penting yang memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Dalam menghitung inflasi tidak mungkin semua barang dan jasa dihitung. Pada umumnya inflasi dihitung berdasarkan sejumlah paket komoditas (*commodity basket*) dan diagram timbang survey biaya hidup (SBH). Setiap lima tahun sekali SBH dilakukan penyesuaian dengan mempertimbangkan pola konsumsi maupun biaya hidup masyarakat yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti perubahan pendapatan masyarakat, perubahan pola permintaan dan penawaran barang dan jasa, perubahan kualitas dan kuantitas barang/jasa, serta perubahan sikap dan perilaku masyarakat.

Oleh karena itu, penggantian SBH 2002 dengan SBH 2007 adalah merupakan hal wajar. SBH tahun 2007 dilaksanakan di 66 kota yang terdiri dari 33 ibukota propinsi dan 27 kota dan 6 ibukota kabupaten. Survei Biaya hidup 2007 dilaksanakan di daerah perkotaan (*urban area*) dengan *sample* sebanyak 115.830 rumah tangga. Adapun maksud dan tujuan survei SBH 2007 adalah survei pengeluaran rumah tangga di daerah perkotaan (*urban area*), yang dimaksudkan untuk mendapatkan pola konsumsi masyarakat sebagai bahan penyusunan diagram timbang IHK dan penyusunan paket komoditas baru. Dibandingkan dengan SBH 2002, terdapat beberapa perbedaan penghitungan sbb :

1. Cakupan

No.	Perbedaan	SBH 2002	SBH 2007
1	Cakupan Kota	45	66
	a. Ibukota Provinsi	30	33
	b. Kota/Kabupaten	15	33
2	Paket komoditas		
	a. Jumlah komoditas	744	774
	b. Komoditas per kota	283 - 397	290 - 450
3	Pasar		
	a. Tradisional	120	153
	b. Modern	97	98
4	Release data	Jan-04	Juli-08

Sumber : BPS

2. Perbedaan Bobot Kelompok Barang dan Jasa

a. Nasional

No.	Komoditas	SBH 2002	SBH 2007
1	Bahan Makanan	25.5	20.7
2	Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	17.9	17.0
	Total Makanan	43.4	36.12
3	Perumahan. Listrik, Gas dan Bahan Bakar	25.6	25
4	Sandang	6.4	6.7
5	Kesehatan	4.3	4.4
6	Pendidikan, rekreasi dan Olahraga	6.0	7.5
7	Transpor, Komunikasi dan jasa Keuangan	14.3	18.7
	Total Non Makanan	56.6	63.9

Sumber : BPS

b. Perbandingan Bobot kelompok Barang di Beberapa Kota Besar

No.	Komoditas	Bobot Makanan		Bobot Non Makanan	
		SBH 2002	SBH 2007	SBH 2002	SBH 2007
1	Jakarta	31.18	28.63	62.82	71.37
2	Surabaya	42.50	35.09	57.50	64.91
3	Bandung	44.17	43.48	55.83	56.52
4	Medan	45.84	38.37	54.16	61.63
5	Semarang	41.00	39.89	59.00	60.11

Sumber : BPS

3. Perbedaan Bobot Kota

No	NAMA KOTA	BOBOT KOTA (SBH 2002)	BOBOT KOTA (SBH 2007)	No	NAMA KOTA	BOBOT KOTA (SBH 2002)	BOBOT KOTA (SBH 2007)
1	Lhokseumawe	0.25	0.28	34	Palangkaraya	0.52	0.36
2	Banda Aceh	0.66	0.31	35	Banjarmasin	1.93	1.54
3	Padang Sidempuan	0.31	0.26	36	Balikpapan	1.31	1.11
4	Sibolga	0.24	0.21	37	Samarinda	1.55	1.31
5	Pematang Siantar	0.68	0.56	38	Manado	1.27	0.98
6	Medan	5.98	4.67	39	Palu	0.68	0.59
7	Padang	2.07	1.69	40	Makasar	3.06	2.56
8	Pakanbaru	1.95	1.70	41	Kendari	0.50	0.43
9	Batam	1.72	2.02	42	Gorontalo	0.46	0.37
10	Jambi	1.31	0.98	43	Ambon	0.58	0.42
11	Palembang	3.98	2.96	44	Ternate	0.32	0.28
12	Bengkulu	0.76	0.59	45	Jayapura	0.40	0.40
13	Bandar Lampung	2.25	1.91	46	Dumai		0.37
14	Pangkal Pinang	0.44	0.34	47	Tanjung Pinang		0.45
15	Jakarta	27.66	22.49	48	Bogor		2.20
16	Tasikmalaya	0.70	0.52	49	Sukabumi		0.73
17	Bandung	6.76	5.38	50	Bekasi		5.26
18	Cirebon	0.87	0.78	51	Depok		3.76
19	Purwokerto	0.69	0.47	52	Sumenep		0.34
20	Surakarta	1.58	1.27	53	Probolinggo		0.46
21	Semarang	4.36	3.48	54	Madiun		0.43
22	Tegal	0.83	0.62	55	Tangerang		3.94
23	Yogyakarta	1.22	1.03	56	Cilegon		0.69
24	Jember	0.92	0.71	57	Bima		0.21
25	Kediri	0.86	0.69	58	Maumere		0.09
26	Malang	2.05	1.77	59	Singkawang		0.23
27	Surabaya	8.90	6.47	60	Tarakan		0.36
28	Serang	2.18	0.74	61	Watampone		0.18
29	Denpasar	1.94	1.53	62	Pare-pare		0.22
30	Mataram	1.07	0.79	63	Palopo		0.19
31	Kupang	0.61	0.49	64	Mamuju		0.06
32	Pontianak	1.36	1.05	65	Manokwari		0.09
33	Sampit	0.26	0.29	66	Sorong		0.34
TOTAL BOBOT						100.00	100.00

Dengan diterapkannya SBH 2007 dalam penghitungan IHK berimplikasi pada penurunan bobot kota Serang, namun demikian untuk Banten jumlah kota yang dihitung inflasinya Bertambah menjadi tiga kota. Kota yang dihitung inflasinya adalah Serang, Cilegon dan Tangerang. Secara keseluruhan bobot inflasi di Banten menjadi 5,37%. Peningkatan bobot ini perlu untuk dicermati karena kestabilan harga di Provinsi Banten akan semakin diperlukan mengingat perannya dalam keranjang inflasi yang semakin besar, khususnya di kota Tangerang.

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB III PERKEMBANGAN PERBANKAN¹ DAN SISTEM PEMBAYARAN

Perkembangan kegiatan usaha perbankan di Banten sampai dengan Mei 2008 masih tumbuh tinggi. Penghimpunan dana masyarakat dan penyaluran kredit oleh kantor bank yang berlokasi di Banten secara triwulanan meningkat. Faktor yang mempengaruhi antara lain adalah kebutuhan transaksi kas yang relatif menurun. Sementara itu faktor yang mempengaruhi peningkatan outstanding kredit antara lain adalah suku bunga yang naik dan kebutuhan masyarakat dipenuhi dengan mengambil kredit. Namun demikian, akselerasi pertumbuhan DPK lebih cepat, sehingga rasio penyaluran kredit terhadap dana yang dihimpun bank (LDR) di Banten relatif turun dari 78,2% pada Maret 2007 menjadi 77,9% pada Mei 2008, dan di atas angka LDR Nasional 72,8%. Peningkatan LDR tersebut diikuti dengan performance kredit yang relatif baik dibandingkan dengan periode waktu yang sama pada tahun sebelumnya, sebagaimana tercermin pada angka NPLs Gross yang rendah. Perkembangan performance kredit tersebut dipengaruhi antara lain oleh berlanjutnya langkah-langkah restrukturisasi kredit terhadap beberapa debitor besar dan penyaluran kredit yang lebih berhati-hati. Secara keseluruhan, resiko likuiditas dan resiko pasar masih dapat tertangani dengan baik.

A. INTERMEDIASI PERBANKAN

Penghimpunan dana perbankan (DPK) dan penyaluran kredit perbankan di Banten pada posisi akhir Mei 2008 meningkat. Faktor yang mempengaruhi peningkatan tersebut antara lain adalah kebutuhan kas nasabah individual dan perusahaan swasta non keuangan yang relatif turun sebagaimana tercermin pada kenaikan simpanan milik ke dua kelompok nasabah dimaksud. Di lain pihak, penyaluran kredit terjadi peningkatan *outstanding* kredit yang tidak sebesar penurunan DPK, sebagai hasilnya tercatat LDR yang sedikit turun.

Tabel III. 1 Beberapa indikator perbankan Banten

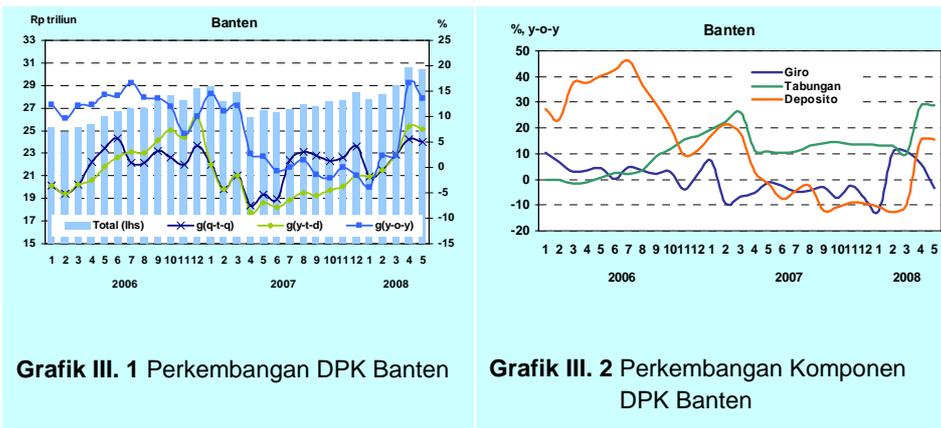
	Uraian		2007	2008	
			2	1	2*
Banten	DPK	Rp Miliar	26,537.0	28,997.6	30,431.3
	Pertumbuhan	(%, y-o-y)	14.3	2.4	13.6
	Kredit Lokasi Bank	Rp Miliar	19,712.0	22,686.4	23,718.0
	Pertumbuhan	(%, y-o-y)	27.4	22.1	23.7
	Kredit Lokasi Proyek	Rp Miliar	39,235.7	44,934.5	44,936.5
	Pertumbuhan	(%, y-o-y)	17.8	23.3	20.0
	LDR	(%)	74.28	78.24	77.94
	NPL	(%)	4.4	3.6	3.5
	UMKM (Rp Miliar) **	Rp Miliar	18,814.8	22,314.4	23,962.5
	Pert. (%, y-o-y)	(%, y-o-y)	20.2	30.6	31.0

*) s.d. Mei 2008
 **) Sejak Triwulan 1 2007, termasuk KUMKM di Banten

¹ Data yang disajikan dan dianalisis adalah data yang didasarkan pada kegiatan kantor bank yang berlokasi di wilayah Jakarta, bukan data menurut kriteria lokasi proyek. Fokusnya adalah untuk mengetahui perkembangan kegiatan kantor bank yang berlokasi di Jakarta, termasuk resiko-resiko yang dihadapi bank di Jakarta. Sumber data berasal dari Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan.

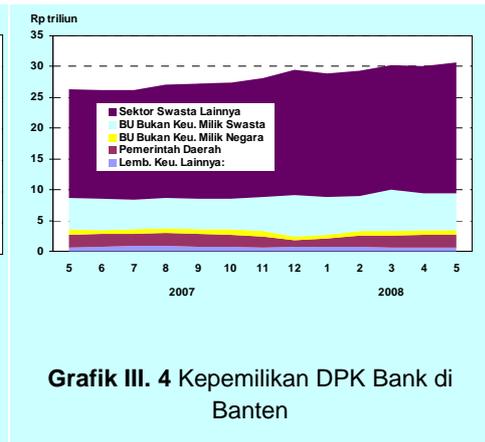
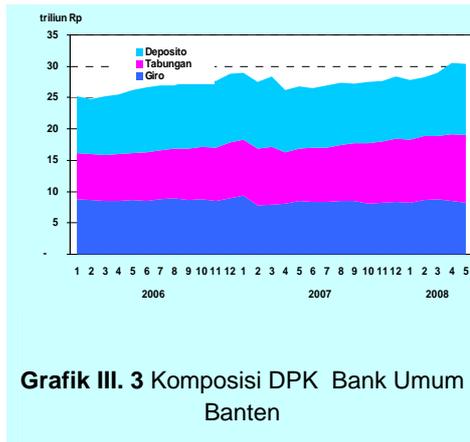
1. Penghimpunan Dana Masyarakat

Penghimpunan dana pihak ketiga oleh perbankan Banten sampai dengan Mei 2008 relatif meningkat (Grafik III.1 dan 2). Secara triwulanan penghimpunan DPK tumbuh lebih tinggi (4,9%) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (2,4%). Dengan perkembangan ini maka pertumbuhan penghimpunan DPK s.d. Mei 2008 mencapai 7,5% (y-t-d) dan secara tahunan (y-o-y) tumbuh 13,6%.



Dalam triwulan laporan, peningkatan DPK (q-t-q) terutama disebabkan oleh peningkatan tabungan dan deposito. *Outstanding* tabungan naik cukup tinggi 5,9% dari Rp 10,2 triliun pada Maret 2008 menjadi Rp 10,8 triliun pada Mei 2008. Sementara deposito naik menjadi 13,4%. Peningkatan simpanan deposito dan tabungan terutama berasal dari simpanan milik individual dan dana milik perusahaan swasta non keuangan yang antara lain dipengaruhi oleh penurunan kebutuhan kas nasabah, seiring optimalisasi *less cash society*. Sementara itu, pertumbuhan DPK giro turun 5,9%.

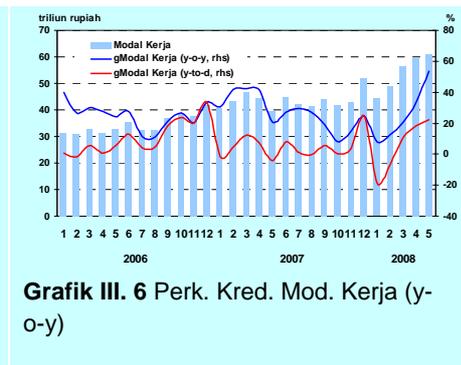
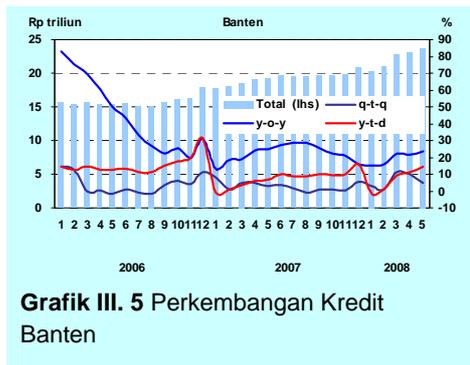
Struktur atau komposisi dana pihak ketiga (DPK) terbesar adalah deposito (Grafik III. 3-4). Deposito pada posisi Mei 2007 tetap menjadi komponen DPK dengan porsi yang tertinggi. Simpanan dalam bentuk deposito tercatat sebesar Rp 11,4 triliun (37,5%), tabungan Rp 10,8 triliun (35,5%) dan giro Rp 8,2 triliun (27%). Sementara itu, berdasarkan kepemilikannya, 69% DPK perbankan di Banten dimiliki oleh nasabah individual, 19,5% dimiliki oleh perusahaan bukan lembaga keuangan swasta. Sementara dana milik pemerintah daerah di perbankan 6,9%.

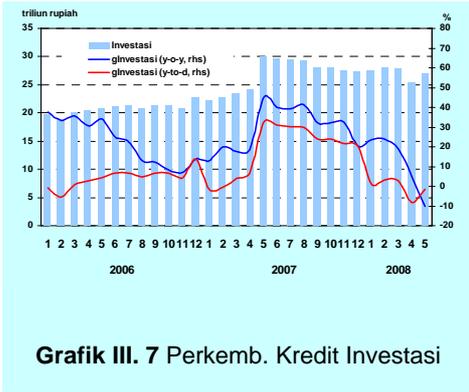


Tingginya *outstanding* DPK di Banten, menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap perbankan masih tinggi. Hal ini tidak terlepas dari upaya terus menerus untuk mengarahkan kegiatan perbankan beroperasi dengan memperhatikan azas-azas prudential sehingga kepercayaan masyarakat dapat dijaga. Layanan perbankan semakin meningkat dan inovatif, seperti layanan SMS banking, Internet banking, dan produk jasa lainnya untuk menggali pendapatan yang tidak hanya tergantung dari kredit, yaitu *fee based income*.

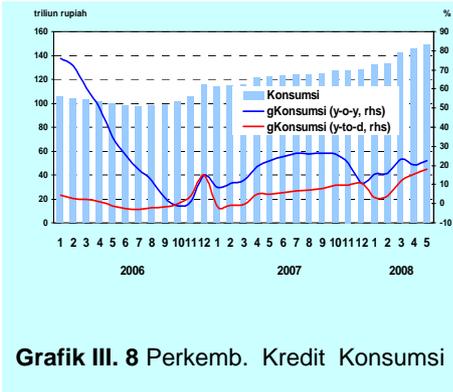
2. Penyaluran Kredit

Kredit di triwulan II masih tumbuh relatif tinggi. Faktor yang mempengaruhi peningkatan tersebut antara lain adalah tingginya realisasi persetujuan kredit baru. Pada triwulan laporan, perlambatan perekonomian Banten tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan kredit. Kredit berdasar lokasi bank secara keseluruhan justru tumbuh 23,7% (y-o-y). Di sisi sektoral kredit sektor yang porsinya besar masih tumbuh tinggi, seperti kredit di sektor perdagangan (37%), industri (20,3%) dan jasa dunia usaha (11,3%)





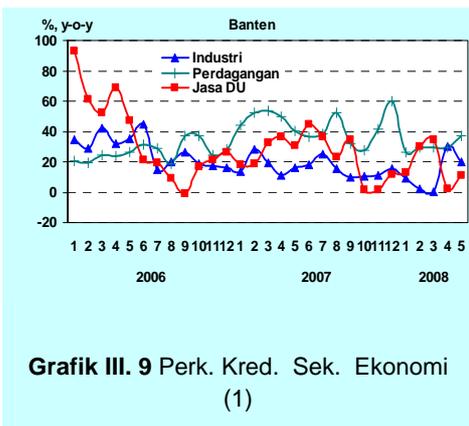
Grafik III. 7 Perkemb. Kredit Investasi



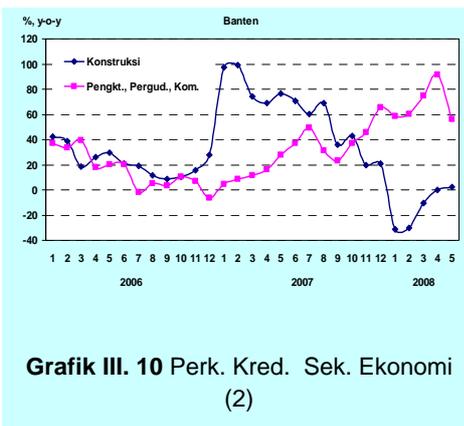
Grafik III. 8 Perkemb. Kredit Konsumsi

Berdasarkan penggunaannya, kredit konsumsi masih dominan dalam porsi penyaluran kredit (62,9%) (Grafik III. 6). Struktur penyaluran kredit ini relatif sama setiap periode, sementara kredit produktif seperti modal kerja dan investasi masing masing hanya berkisar 25,8% dan 11,4%. Outstanding per Mei 2008 kredit konsumsi Rp 13,3 triliun, kredit modal kerja Rp 6,1 triliun, diikuti oleh kredit investasi Rp 2,7 triliun (Grafik III.7). Tingginya kredit konsumsi yang disalurkan oleh perbankan di Banten tersebut tidak terlepas dari pengaruh batas kewenangan untuk memutus besarnya kredit dan juga pasar kredit perbankan di Banten yang lebih di dominasi oleh MKM. Secara sektoral hal ini dikonfirmasi oleh tingginya kredit yang disalurkan oleh perbankan di sektor lain-lain (62,9%) dan sektor perdagangan (14,9%). Sementara itu untuk kredit investasi, porsi kredit yang disalurkan oleh perbankan di Banten relatif rendah salah satu alasannya adalah jenis kredit ini pada umumnya bernominal besar, berjangka waktu panjang dan relatif beresiko sehingga kewenangan memutusnya dilakukan oleh Kantor Pusat. Sementara itu, kantor pusat badan usaha yang menerima kredit sebagian besar juga berlokasi di Jakarta.

Secara sektoral, kredit yang disalurkan oleh perbankan di Banten terkonsentrasi di sektor lain-lain dan perdagangan. Kedua sektor tersebut, yaitu sektor lain-lain (Rp 14,9 triliun) dan sektor perdagangan (Rp 3,5 triliun) secara bersama-sama memiliki porsi kredit sebesar 77,8% dari total kredit (Rp 23,7 triliun), dan selanjutnya diikuti sektor industri Rp 2,4 triliun (10,5%) dan sektor jasa dunia usaha Rp 1,7 triliun (6,9%). Secara triwulanan, dari ke 4 sektor utama, sektor perdagangan, industri dan lain-lain meningkat (q-t-q), sedangkan sektor jasa dunia usaha relatif turun (-12,2%).

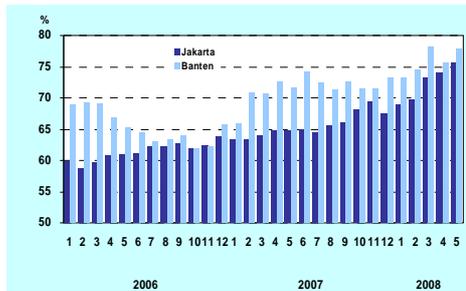


Grafik III. 9 Perk. Kred. Sek. Ekonomi (1)

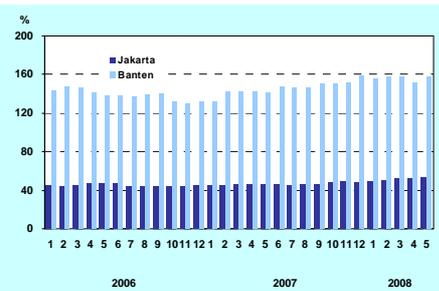


Grafik III. 10 Perk. Kred. Sek. Ekonomi (2)

Kegiatan intermediasi perbankan di triwulan II 2008 secara keseluruhan relatif stabil dengan rasio pinjaman terhadap dana pihak ketiga (*Loan to Deposit Ratio / LDR*) tumbuh moderat. LDR perbankan di Banten relatif stabil dari 78,2% menjadi 77,9% pada Mei 2008 (Grafik III. 11). Akselerasi *outstanding* DPK (4,9%, q-t-q) yang lebih tinggi dibandingkan dengan *outstanding* kredit yang meningkat sedikit rendah (4,5%, q-t-q), sehingga LDR terlihat sedikit menurun, namun pada kisaran yang relatif sama.



Grafik III. 11 LDR Perbankan Banten



Grafik III. 12 LDR Kredit Lokasi Proyek Banten

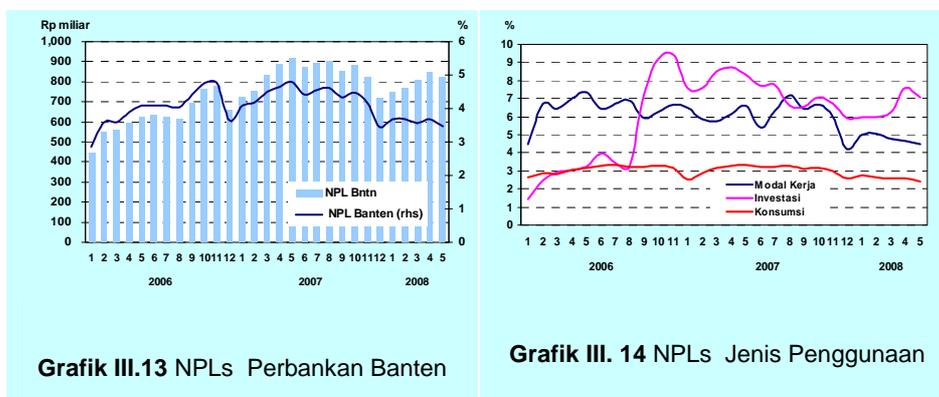
Sementara itu, LDR dengan menggunakan kredit berdasarkan lokasi proyek² menunjukkan angka rasio LDR yang lebih tinggi (Grafik III. 12). Pada posisi akhir bulan Mei 2008, penghitungan LDR dengan menggunakan jumlah kredit berdasarkan lokasi proyek di Banten 157,7%, relatif stabil dibandingkan dengan posisi pada akhir bulan Maret 2008 (157,4%). Jumlah kredit untuk membiayai proyek yang berlokasi di Jakarta pada posisi akhir Mei 2008 adalah Rp 47,9 triliun, lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah kredit yang disalurkan oleh perbankan di Banten pada posisi yang sama Rp 23,7 triliun. Artinya, sebanyak Rp 24,2 triliun kredit yang disalurkan di Banten berasal dari perbankan yang berlokasi di luar Banten.

B. RESIKO KREDIT PERBANKAN

Stabilitas makro ekonomi yang relatif terjaga namun kinerja di sektor mikro yang masih belum bergerak optimal menyebabkan ruang gerak untuk meningkatkan peran perbankan terbatas. Insentif untuk mendorong agar sektor riil bergerak perlu terus diberikan, baik yang berasal dari Bank Indonesia maupun Pemerintah. Bank Indonesia, untuk memacu perkembangan di sektor riil secara berhati-hati memberikan sinyal bahwa kebijakan di sektor moneter akan tetap berhati-hati yang disesuaikan dengan kapasitas perekonomian yang ada. Hal ini tercermin dari kebijakan Bank Indonesia yang secara berhati-hati menjaga BI rate agar tetap dalam koridor. Namun demikian, secara mikro, untuk memacu fungsi intermediasi, Bank Indonesia melonggarkan beberapa ketentuan perbankan dengan harapan dapat mendorong perbankan lebih

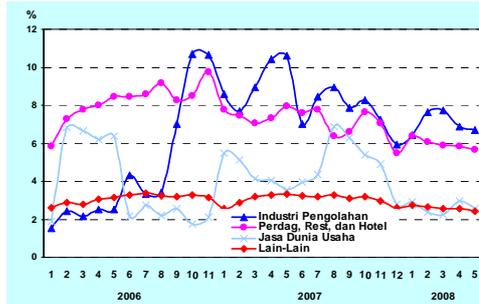
² Kredit berdasarkan lokasi proyek adalah kredit yang disalurkan di suatu daerah atau wilayah tertentu, tempat dimana lokasi proyek yang dibiayai kredit tersebut berada tanpa memperhatikan asal daerah/wilayah kantor bank yang membiayai.

ekspansif. Namun demikian, disebabkan oleh kondisi internal dan eksternal yang kurang menguntungkan menyebabkan akselerasi pertumbuhan perekonomian belum sesuai harapan yang pada gilirannya juga berdampak pada kegiatan perbankan. Dalam triwulan laporan tersebut, resiko kredit perbankan secara agregat menurun. Salah satu indikator penurunan tingkat resiko tercermin pada NPLs gross bank yang cukup rendah³ dan masih dalam batas aman *rasio Non Performing Loan*, yaitu di bawah 5%. Berdasarkan tolok ukur ini maka NPL gross perbankan di Banten per Mei 2008 relatif rendah, yaitu sebesar 3,5% (Grafik III.13). Perbaikan tersebut terutama bersumber dari semakin membaiknya *performance* kredit investasi. Faktor yang mempengaruhi perbaikan diantaranya adalah semakin intensifnya penagihan kredit bermasalah dan upaya restrukturisasi kredit nasabah-nasabah besar.

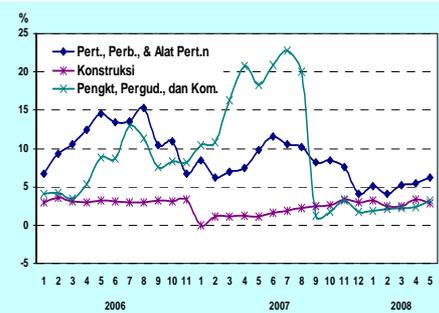


Meskipun *outstanding* kredit investasi jauh di bawah *outstanding* kredit konsumsi dan modal kerja, namun NPLs kredit investasi masih relatif tinggi dan memburuk. NPLs kredit investasi perbankan di Banten per Mei 2008 adalah 7,04% dari *outstanding* kredit Rp 2,7 triliun, diikuti oleh kredit modal kerja dengan NPLs 4,48% dari *outstanding* kredit Rp 6,1 triliun. Sementara itu, NPLs kredit konsumsi relatif rendah 2,42% dari *outstanding* kredit Rp 14,9 triliun (Grafik III. 14). Lebih tingginya NPLs kredit investasi di pengaruhi oleh *risk exposure* yang lebih tinggi, diantaranya jangka waktu kredit lebih panjang, usaha yang dibiayai relatif lebih sensitif terhadap *shock* perekonomian, dan sangat dipengaruhi oleh daya saing dari produk terhadap kompetitor, terutama di kelompok manufaktur. NPLs kredit modal kerja relatif stabil yang antara lain dipengaruhi oleh masih cukup baiknya *cash flow* debitur. Sementara itu, NPLs kredit konsumsi relatif stagnan pada level yang rendah. Terjaganya NPLs kredit konsumsi antara lain disebabkan oleh jaminan pembayaran pada kredit ini lebih terjaga, baik dalam bentuk jaminan natura maupun jaminan (kepastian) pembayaran yang berasal dari penghasilan debitur.

³ NPLs pada beberapa Bank besar menurun yang dipengaruhi oleh keberhasilan restrukturisasi dan pelunasan hutang oleh sebagian debitur besar.



Grafik III. 15 NPLs Sektor Ekonomi (1)



Grafik III. 16 NPLs Sektor Ekonomi (2)

Di sisi sektoral, relatif terjaganya NPLs perbankan di Banten antara lain tercermin pada relatif rendah dan terjaganya NPLs di 4 sektor utama seperti jasa dunia usaha dan sektor lain-lain, walaupun NPLs di sektor industri dan perdagangan relatif masih tinggi (Grafik III. 15–16). Pada posisi bulan Mei 2008, NPLs kredit perbankan di sektor sektor industri, perdagangan, jasa dunia usaha dan sektor lain-lain masing-masing 7,7%; 5,9%; 2,3% dan 2,6%. NPLs yang rendah di sektor lain-lain tersebut walaupun memiliki *outstanding* kredit tertinggi (Rp 14,9 triliun) dikarenakan komponen terbesar kredit disektor ini merupakan kredit konsumsi yang NPLs-nya juga rendah. Sementara itu, NPLs di sektor industri (7,7%) dan perdagangan (5,9%), yang masih tinggi, antara lain disebabkan oleh *risks profile* di sektor ini relatif lebih tinggi dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya.

C. RESIKO LIKUIDITAS PERBANKAN

Kemampuan bank di dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo merupakan poin penting dalam pengelolaan likuiditas. Pengelolaan likuiditas yang baik dan benar sangat diperlukan karena jika tidak akan dihadapkan pada resiko-resiko yang akan berdampak pada kontinuitas usaha bank sebagai lembaga pengelola resiko. Resiko likuiditas adalah suatu ketidakmampuan untuk mengakomodasi jatuh tempo kewajiban dan penarikan serta pembiayaan pertumbuhan aktiva dan untuk memenuhi kewajiban pada tingkat harga pasar yang layak. Dari sisi pemenuhan kewajiban terhadap dana pihak ketiga, maka komposisi dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun perbankan dapat dijadikan sebagai salah satu indikator besar kecilnya resiko likuiditas yang ditanggung oleh perbankan. Melihat struktur dana pihak ketiga perbankan di Jakarta, maka porsi dana jangka pendek memiliki *outstanding* yang cukup besar, baik dalam bentuk giro maupun deposito. Kondisi ini menyebabkan perbankan relatif berhati-hati dalam meningkatkan aktiva berupa kredit, dan kredit yang disalurkan lebih didominasi pada kredit modal kerja yang berjangka waktu pendek. Kredit konsumsi *outstanding*-nya juga cukup tinggi karena dianggap lebih aman. Sementara itu kredit investasi pertumbuhannya relatif lambat karena sifatnya yang jangka panjang, *exposure risk* yang lebih besar dan jika tidak berhati-hati dapat berpotensi menimbulkan *mismatch*. Kehati-

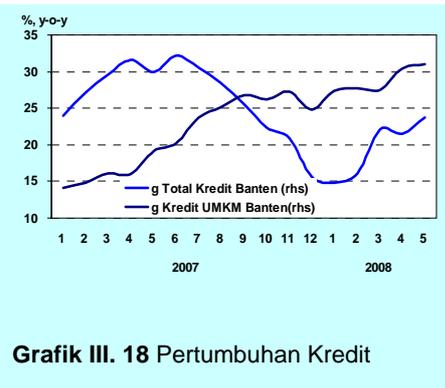
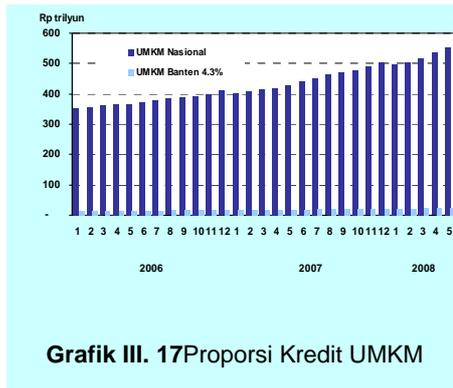
hatian Bank juga tercermin pada LDR yang tumbuh relatif lambat, CAR yang relatif tinggi dan disisi lain asset bank yang likuid (termasuk dalam bentuk SBI) masih cukup tinggi. Secara keseluruhan, memperhatikan perilaku bank di dalam mengelola asset sekarang ini dipandang masih tetap di dalam koridor asas-asas kehati-hatian dan kondisi likuiditas perbankan dipandang relatif masih terjaga.

D. RESIKO PASAR

Sebagai lembaga intermediasi, salah satu resiko yang juga dihadapi bank adalah resiko pasar. Resiko pasar adalah fluktuasi nilai asset yang disebabkan oleh perubahan harga-harga pasar dan *yields*. Bagi bank resiko itu terutama tercermin pada suku bunga dan sebagian pada nilai tukar. Untuk suku bunga, perbankan diuntungkan oleh relatif fleksibelnya suku bunga DPK, sementara suku bunga kredit relatif *rigid* untuk turun namun fleksibel untuk naik. Kondisi ini menyebabkan *spread* bunga masih cukup terjaga, walaupun bank tetap berhati-hati menyalurkan kreditnya. Kondisi lainnya adalah tingkat suku bunga SBI yang masih lebih tinggi dibandingkan suku bunga DPK sehingga menjadi alternatif investasi yang aman bagi perbankan untuk mengalokasikan kelebihan likuiditasnya. Dengan pola yang masih seperti ini, maka fluktuasi tingkat bunga secara keseluruhan masih dapat dihadapi oleh perbankan dengan resiko terbesar hanya berupa kemungkinan turunnya keuntungan (dengan catatan pengelolaan bank tetap benar). Sementara itu resiko yang terkait dengan nilai tukar, pada saat ini relatif lebih terukur. Beberapa ketentuan perbankan, seperti pembatasan *exposure* valas (PDN) dan aturan yang ketat bagi bank melakukan pinjaman luar negeri mengurangi resiko fluktuasi nilai tukar yang akan dihadapi oleh perbankan. Selain itu, dukungan Bank Indonesia dan Pemerintah untuk menjaga nilai tukar juga mampu mengurangi tekanan resiko yang berasal dari pergerakan nilai tukar.

E. KREDIT UMKM (LOKASI PROYEK)

Outstanding kredit mikro, kecil dan menengah (MKM) di Banten dalam triwulan laporan (posisi akhir Mei 2008) naik dibandingkan dengan posisi akhir Desember 2007. *Outstanding* kredit UMKM di Banten pada akhir bulan Mei 2008 tumbuh 11,7% (y-t-d) menjadi Rp 23,9 triliun dari sebelumnya pada posisi akhir Desember 2007 (Rp 21,9 triliun) (Grafik II.17–18). Porsi kredit MKM di Banten dibandingkan dengan kredit MKM Nasional relatif moderat, yaitu pada kisaran angka 4,0 - 5,0% dari total MKM nasional yang memiliki *outstanding* Rp 552,1 triliun. Sementara itu proporsi kredit MKM di banten terhadap total kredit lokasi proyek yang disalurkan di Banten (49,9%%) relatif lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi yang sama di Jakarta.



Kredit MKM di Banten memiliki *outstanding* yang tergolong tinggi dibandingkan dengan provinsi lain (Tabel III.2). Kredit MKM di Banten pada posisi akhir bulan Mei 2008 sebesar Rp 24,5 triliun (pangsa 4,3%) atau berada di peringkat ke-6 yang memiliki *outstanding* MKM terbesar. Tingginya *outstanding* MKM di Banten merupakan fenomena yang normal, terutama mengingat besarnya populasi UMKM di Banten.

Tabel III. 2 Outstanding Kredit MKM Lokasi Proyek 10 Propinsi Terbesar (miliar rupiah)

Baki Debet/Outstanding	Tw II/Qt I 2006	Tw I/Qt I 2007	Tw II/Qt II 2007	Tw III/Qt III 2007	Tw IV/Qt IV 2007	Tw I/Qt I 2008	Mei/May 2008	Pangsa/Share	Pertumbuhan/ Growth Mei 07 - Mei 08	Pertumbuhan/ Growth Des 07 - Mei 08
1. DKI Jakarta/DKI Jakarta	98.061,0	96.860,4	99.434,0	104.145,5	115.329,2	114.323,4	119.769,8	20,8%	24,9%	3,9%
2. Jawa Barat/West Java	67.319,7	68.634,0	73.143,4	77.688,7	81.399,7	84.794,2	89.916,5	15,6%	25,9%	10,5%
3. Jawa Timur/East Java	52.250,7	52.708,5	56.554,3	60.464,4	63.511,4	65.150,2	69.916,7	12,0%	25,3%	9,5%
4. Jawa Tengah/Central Java	42.609,0	43.510,5	46.088,2	49.586,3	51.538,7	53.631,9	56.545,7	9,8%	27,6%	9,7%
5. Sumatera Utara/North Sumatra	21.584,5	21.782,3	23.551,4	25.389,6	26.545,4	28.054,9	30.400,4	5,3%	32,8%	14,5%
6. Banten/Banten	17.498,7	17.911,4	19.260,3	21.254,8	21.973,7	22.865,5	24.532,3	4,3%	31,0%	11,8%
7. Sulawesi Selatan/South Sulawesi	13.779,3	14.276,9	15.522,7	16.621,8	17.363,3	18.343,9	19.693,3	3,4%	30,7%	13,2%
8. Riau/Riau	9.699,1	9.968,1	11.044,8	11.914,4	12.401,2	13.356,0	14.603,6	2,5%	39,3%	17,8%
9. Bali/Bali	10.800,9	11.069,6	11.680,0	12.098,4	12.884,8	13.293,3	14.142,0	2,5%	23,6%	9,8%
10. Lampung/Lampung	8.817,4	9.337,9	10.033,3	10.653,0	11.098,8	11.707,7	12.890,9	2,2%	32,5%	16,1%
Total 10 Propinsi/Total of 10 Provinces	342.411,3	346.699,6	369.319,3	389.816,6	414.846,3	425.529,9	451.378,1	78,4%	27,2%	9,0%
Propinsi Lainnya/Other Provinces	85.585,0	88.257,6	96.378,4	104.476,3	110.128,2	115.247,6	124.506,0		33,8%	13,1%
Total Kredit MKM Nasional/Total of National's MSM Credits	427.996,3	434.957,2	465.697,7	494.293,0	524.974,5	540.777,6	575.884,1		28,8%	9,9%

Pada triwulan laporan (s.d Mei 2008), ekspansi bersih penyaluran kredit MKM di Banten meningkat relatif tinggi (tabel III.4). Selama periode April-Mei 2008 ekspansi kredit MKM di Jakarta tumbuh tinggi menjadi Rp 1,66 triliun, dibandingkan dengan triwulan I 2008 yang minus Rp 891 miliar. Faktor yang mempengaruhi tingginya ekspansi kredit MKM di Banten antara lain adalah kinerja perbankan Banten yang membaik, intensnya program pembiayaan UMKM oleh pemerintah, serta masih masuknya sebagian besar kredit konsumsi ke kelompok MKM.

Tabel III. 3 Ekspansi Kredit MKM Lokasi Proyek 10 Propinsi Terbesar (miliar rupiah)

Net Ekspansi/Net Expansion	Tw I/Qt I 2007	Tw II/Qt II 2007	Tw III/Qt III 2007	Tw IV/Qt IV 2007	Akumulasi/Accumulation 2007	Pangsa/Share	Tw I/Qt I 2008	April-Mei/April-May 2008	Perbandingan/Comparison Mei 07 - Mei 08
1. Jawa Barat/West Java	1.314,2	4.509,4	4.545,3	3.711,1	14.080,0	14,6%	3.394,5	5.122,2	107,4%
2. Jawa Timur/East Java	457,8	3.845,8	3.910,2	3.047,7	11.261,4	11,7%	1.647,0	3.757,5	103,3%
3. Jawa Tengah/Central Java	901,5	2.577,7	3.498,1	1.952,4	8.929,8	9,3%	2.093,1	2.913,9	196,5%
4. DKI Jakarta/DKI Jakarta	-1.200,6	2.573,5	4.711,6	11.183,7	17.268,2	18,0%	-1.005,8	5.446,4	-303,2%
5. Sumatera Utara/North Sumatra	197,8	1.769,2	1.838,2	1.155,8	4.960,9	5,2%	1.509,5	2.345,5	195,8%
6. Banten/Banten	421,6	1.348,9	1.994,3	719,1	4.484,0	4,7%	891,8	1.666,9	107,8%
7. Sulawesi Selatan/South Sulawesi	-304,5	1.245,9	1.099,0	741,5	2.782,0	2,9%	980,6	1.316,4	401,7%
8. Riau/Riau	269,0	1.076,7	869,6	486,7	2.702,1	2,8%	954,8	1.247,6	181,6%
9. Lampung/Lampung	520,6	695,4	619,7	445,7	2.281,4	2,4%	608,9	1.183,1	95,5%
10. Sumatera Selatan/South Sumatra	74,3	808,3	847,5	344,4	2.074,5	2,2%	751,1	741,2	184,3%
Total 10 Propinsi/Total of 10 Provinces	2.651,8	20.450,7	23.933,4	23.788,3	70.824,2	73,6%	11.825,5	25.740,7	227,1%
Propinsi Lainnya/Other Provinces	3.669,1	7.922,8	7.668,8	6.093,2	25.353,9	26,4%	4.777,6	9.365,8	69,3%
Net Ekspansi Kredit MKM / Net Expansion of MSM Credits	6.320,9	28.373,5	31.602,2	29.881,5	96.178,2	100,0%	16.603,1	35.106,5	160,7%

Dari sisi penggunaan, sebagian besar kredit MKM digunakan untuk konsumsi dan modal kerja, sementara untuk investasi relatif rendah. Berdasarkan *outstanding* data MKM nasional, kredit MKM untuk konsumsi memiliki porsi 51,8%, modal kerja 39,5%, dan yang digunakan untuk investasi hanya 8,8% dari total *outstanding* Rp 552,1 triliun. Sementara itu, di sisi sektoral hal ini tercermin pada tingginya *outstanding* MKM pada sektor lain-lain (52,1%) dan di sektor perdagangan (25,2%).

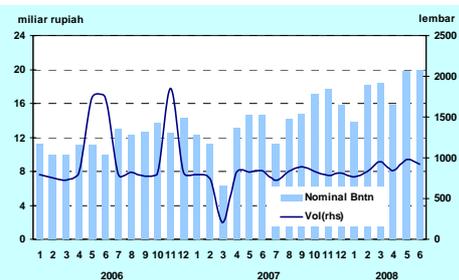
Dari sisi kinerja, kredit MKM cukup baik, sebagaimana tercermin pada kinerja MKM di level nasional dan lebih baik dari kinerja kredit non MKM. Kinerja kredit MKM dengan menggunakan NPLs sebagai ukuran kinerjanya, per akhir Mei 2008 semakin membaik dengan NPLs *gross* MKM 3,6%, relatif turun dibandingkan dengan triwulan-triwulan sebelumnya. NPLs *gross* MKM tersebut masih di bawah angka NPLs *gross* non MKM yang tercatat 3,9%. Faktor yang mempengaruhi angka NPLs di sektor MKM relatif rendah antara lain adalah resiko di sektor ini yang relatif lebih terukur, MKM lebih kuat dalam menghadapi *shock* dan komitmen dari pelaku MKM dalam pengembalian kredit cukup tinggi. Sebagian besar MKM merupakan jenis kredit konsumsi dan modal kerja.

F. TRANSAKSI KLIRING

Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, penyelesaian rata-rata transaksi harian melalui kliring di Banten menunjukkan peningkatan jumlah warkat dan nilai nominal kliring yang cukup tinggi (Tabel III. 4). Rata-rata harian nilai nominal transaksi kliring di triwulan II 2008 Rp 18,5 miliar, relatif meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (Rp 16,8 miliar). Sementara itu, rata-rata harian jumlah warkat kliring naik (7,98%) menjadi 916 lembar warkat. Meningkatnya transaksi nominal dan peningkatan jumlah warkat kliring diduga sejalan dengan kepercayaan masyarakat yang meningkat pada sistem pembayaran non tunai sejalan dengan diterapkannya sistem kliring nasional dan ketentuan yang lebih tegas mengenai daftar hitam.

Tabel IV. 4 Rata-rata Harian Transaksi Kliring

Triwulan		Volume	Nominal (jutaan rupiah)
2006	1	758	10,327
	2	1,429	10,724
	3	797	12,627
	4	1,165	13,506
2007	1	583	9,956
	2	831	14,101
	3	816	13,386
	4	810	16,872
2008	1	849	16,765
	2	916	18,473



Grafik III. 19 Rata-rata Harian Kliring

Ke depan penyelesaian transaksi melalui kliring di Serang diperkirakan akan terus meningkat. Faktor yang mempengaruhi, selain perekonomian yang membaik juga dipengaruhi oleh akan hadirnya Bank Indonesia di Serang sehingga diharapkan sistem pembayaran non tunai akan maju beberapa langkah ke depan. Kehadiran Bank akan memungkinkan diimplementasi kannya Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan diterapkannya daftar hitam nasional. *Coverage* SKNBI pada saat ini sudah mencakup lebih dari 95% nilai transaksi kliring per hari. Dengan SKNBI tersebut penyelesaian kliring dapat dilaksanakan dengan lebih baik, terutama dilihat dari sisi kecepatan dan keakuratan pembayaran. Selain itu risiko kegagalan *settlement* akan dapat dikurangi. Selain itu, dengan hadirnya Bank Indonesia di Serang akan lebih memungkinkan penyelesaian transaksi dengan RTGS dapat dilayani melalui Kantor Bank Indonesia Serang. Peningkatan pelayanan transaksi non tunai tersebut diharapkan dapat menjadi isu positif bagi dunia usaha dan meningkatkan aktifitas dunia usaha ke Banten. Secara makro pergerakan ekonomi Banten diharapkan akan lebih terakselerasi.

Melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), keuntungan yang diperoleh cukup luas. Masyarakat, perbankan dan perekonomian secara makro memperoleh keuntungan dimaksud.

Bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia yang melakukan penyelesaian transaksi melalui kliring nantinya dapat melakukan transaksi transfer dana pada hari yang sama sepanjang sistem internal bank peserta sudah sepenuhnya terhubung (*fully online*). Bagi perbankan, SKNBI akan menciptakan efisiensi biaya pencetakan dan *handling* warkat, efisiensi SDM dan peralatan penunjang lainnya. Pengintegrasian juga akan meningkatkan efisiensi pengelolaan likuiditas bank karena bank cukup memonitor satu posisi transaksi kliring secara nasional. Secara makro, transmisi arus dana melalui SKNBI secara *real time* dan otomatis akan mempercepat peredaran kembali uang (*velocity of money*) sehingga mampu mendorong aktivitas ekonomi masyarakat dan pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Tabel IV. 5 Rata-rata Harian Penarikan Cek/BG Kosong

Triwulan	Penarikan Cek/BG Kosong		Kliring Total		Persentase		
	Nominal (juta Rupiah)	Volume (lembar)	Nominal (juta Rupiah)	Volume (lembar)	Nominal (%)	Volume (%)	
2006	1	146	9	10,327	758	1.41	1.21
	2	170	8	10,724	1,429	1.59	0.54
	3	123	9	12,627	797	0.98	1.10
	4	269	8	13,506	1,165	1.99	0.73
2007	1	180	7	9,956	583	1.80	1.23
	2	466	7	14,101	831	3.30	0.87
	3	99	6	13,386	816	0.74	0.69
	4	204	7	16,872	810	1.21	0.88
2008	1	142	5	16,765	849	0.84	0.64
	2	203	6	18,473	916	1.10	0.61

Sementara itu, kualitas kliring di Serang pada triwulan II 2008 masih relatif baik tercermin pada rendahnya persentase rata-rata tolakan harian kliring, meskipun dari sisi persentase nominal sedikit meningkat (Tabel IV.5). Persentase rata-rata harian nilai volume cek dan BG yang ditolak pada triwulan II 2008 sedikit turun menjadi 0,61% dari 0,64%, sementara persentase nominal tolakan sedikit naik dibanding triwulan sebelumnya, menjadi 1,1%%. Ada kemungkinan meningkatnya persentase tolakan kliring nominal, karena relatif meningkatnya pemakaian cek/BG dalam nominal besar.

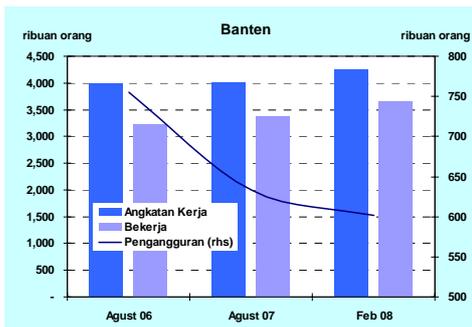
Terkait dengan upaya untuk meningkatkan kualitas kliring, Bank Indonesia memberlakukan penerbitan daftar hitam nasional penarik Cek dan/atau bilyet giro kosong. Latar belakang dari dikeluarkannya ketentuan ini adalah mengingat bahwa penggunaan instrumen cek dan atau bilyet giro sebagai alat pembayaran di Indonesia masih diminati, namun di sisi lain masih terdapat praktik penarikan cek dan atau bilyet giro kosong yang dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat. Sementara itu penerapan sanksi daftar hitam penarik cek dan atau bilyet giro kosong serta pemberlakuannya cakupan wilayah kliring lokal belum cukup efektif menurunkan tingkat pencairan cek dan/atau bilyet giro kosong sehingga perlu diterapkan prinsip *self assesment* agar penatausahaan daftar hitam dapat dilakukan dengan lebih akurat. Oleh karena itu, dalam rangka melindungi dan menjaga kepercayaan masyarakat atas penarikan cek dan atau bilyet kosong, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No.8/29/PBI/2006 tentang daftar hitam nasional penarik cek dan atau bilyet giro kosong yang berlaku efektif per 1 Juli 2007.

BAB IV KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

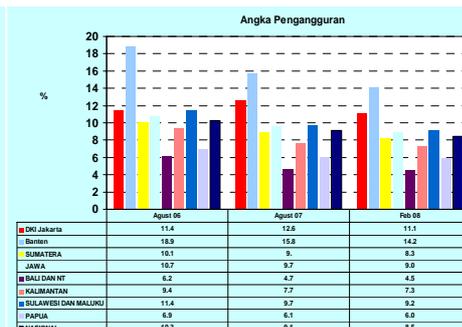
Kualitas pertumbuhan ekonomi Banten yang masih belum optimal berdampak pada belum tingginya perbaikan beberapa indikator kesejahteraan masyarakat Banten. Indikator dimaksud antara lain adalah upah/gaji, angka indeks kesengsaraan (misery indeks) dan kualitas hidup yang tercermin pada angka indeks pembangunan manusia (IPM), bahkan kesenjangan pendapatan (gini ratio) sedikit meningkat. Namun demikian angka kemiskinan dan angka pengangguran sedikit menunjukkan perbaikan. Angka pengangguran di Banten turun 15,8% pada tahun 2007 menjadi 14,2% pada tahun 2008, namun masih lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pengangguran nasional (8,6%). Tingkat kemiskinan relatif turun tipis, yaitu 8,2% dari 9,1% dan lebih rendah dibandingkan dengan nasional (15,4%). Faktor yang mempengaruhi relatif lambatnya perbaikan indikator kesejahteraan antara lain adalah kinerja perekonomian Banten yang walaupun dari sisi kuantitas pertumbuhannya cukup tinggi, namun demikian dari sisi kualitas masih belum optimal, yaitu pertumbuhan lebih didorong oleh konsumsi, sementara investasi tumbuh relatif lambat. Dari sisi sektoral hal ini juga tercermin pada lambatnya pertumbuhan di sektor ekonomi yang banyak menyerap tenaga kerja, seperti industri. Hal ini juga berdampak pada kesenjangan pendapatan yang meningkat, yaitu dari 0,356 pada tahun 2005 menjadi 0,365 pada tahun 2007 (Maret). Sementara itu, indikator kesejahteraan yang lain, yaitu Indeks Pembangunan Manusia relatif membaik. Perbaikan Indeks Pembangunan Manusia dipengaruhi oleh perekonomian yang membaik dan di sisi lain alokasi anggaran untuk pendidikan dan jaminan sosial juga meningkat. Sedangkan, indeks kesengsaraan, dengan tingginya tekanan inflasi di triwulan II 2008 diperkirakan meningkat.

A. KETENAGAKERJAAN

Jumlah angkatan kerja di Banten menunjukkan peningkatan yang relatif rendah dibandingkan penyerapan tenaga kerja membuat tingkat pengangguran terbuka sedikit turun (Grafik IV. 1). Pada posisi Februari 2008 jumlah angkatan kerja di Banten mencapai 4,25 juta jiwa, sedikit meningkat dibanding kondisi Agustus 2007 sebanyak 4,01 juta jiwa. Sementara penyerapan tenaga kerja meningkat dari 3,38 juta jiwa menjadi 3,65 juta jiwa. Kombinasi perkembangan dua hal yang positif ini menyebabkan tingkat pengangguran terbuka turun, dari 15,8% pada posisi Agustus 2007 menjadi 14,2% pada posisi Februari 2008.



Grafik IV.1 Angkatan Kerja dan Jumlah Penduduk Bekerja



Grafik IV. 2 Tingkat Angka Pengangguran Terbuka

Walaupun secara gradual persentase angka pengangguran menurun, namun demikian angka pengangguran di Provinsi Banten (14,2%) relatif lebih tinggi dibandingkan dengan angka pengangguran nasional (8,6%) (Grafik IV.2). Faktor yang mempengaruhi tingginya angka persentase pengangguran antara lain adalah pertumbuhan dan kualitas pertumbuhan ekonomi Banten yang belum optimal, berkurangnya minat penduduk yang bekerja disektor pertanian, dan kualitas SDM yang masih terbatas. Pertumbuhan ekonomi yang kurang dipacu oleh pertumbuhan investasi memiliki dampak pada penyerapan tenaga kerja yang terbatas. Dari sisi sektoral, sektor pertanian yang mampu menyerap tenaga kerja cukup tinggi secara gradual mulai ditinggalkan oleh pencari kerja karena dianggap kurang mampu memberikan imbalan yang cukup disamping faktor lainnya, seperti luas lahan yang semakin berkurang dan juga kepemilikan lahan petani yang relatif kecil. Sementara itu penyerapan tenaga kerja di sektor industri relatif terbatas karena pertumbuhan di sektor ini dipengaruhi oleh terbatasnya insentif pasar dan juga kompetisi yang meningkat terhitung lambat. Faktor lain yang cukup mengganggu di sektor ketenagakerjaan adalah kualitas SDM di Provinsi Banten yang masih kurang kompetitif. Beberapa indikator mengkonfirmasi kondisi ini seperti, masih tingginya angkatan kerja yang berpendidikan SMP ke bawah, terdapat *mismatch* ketrampilan yang dibutuhkan antara pencari tenaga kerja dengan lapangan kerja yang dibuka dan budaya masyarakat yang belum berorientasi kepada daya saing dan produktivitas.

Tabel IV. 1. Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor di Banten

Lapangan	Jumlah Tenaga Kerja			Share (%)		
	2005	2006	2007	2005	2006	2007
Pertanian	923,908	864,614	759,087	27.9	26.5	22.4
Pertambangan	15,867	14,729	8,776	0.5	0.5	0.3
Industri	633,158	660,742	695,161	19.1	20.3	20.5
Listrik	7,925	17,031	18,365	0.2	0.5	0.5
Konstruksi	101,632	100,747	158,778	3.1	3.1	4.7
Perdagangan	822,400	769,023	861,092	24.8	23.6	25.4
Transportasi	347,048	318,746	321,614	10.5	9.8	9.5
Keuangan	63,996	72,352	78,735	1.9	2.2	2.3
Jasa	398,902	443,035	482,053	12.0	13.6	14.2
Total	3,314,836	3,261,019	3,383,661	100.0	100.0	100.0

Sumber: BPS

Tabel IV. 2. Tenaga Kerja Berdasarkan Status Pekerjaan di Banten

Status Pekerjaan	Ag. 2006	Ag. 2007
Formal		
1. Berusaha di bantu buruh tetap	101,353	105,946
2. Buruh/Karyawan	1,369,944	1,355,357
Informal		
1. Berusaha sendiri	735,200	859,086
2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap	490,387	485,370
3. Pekerja bebas	332,127	291,445
4. Pekerja tak di bayar	309,794	286,457

Sumber: BPS

Lapangan	Jumlah		Share (%)	
	2005	2006	2005	2006
Tidak Sekolah	121,654	61,627	3.7	1.9
Tidak Tamat SD	253,585	296,071	7.7	9.1
SD	962,297	1,009,837	29.0	31.0
SLP	758,766	805,391	22.9	24.7
SLA	1,069,035	965,817	32.3	29.6
Diploma	46,739	38,476	1.4	1.2
Universitas	102,760	83,800	3.1	2.6
Total	3,314,836	3,261,019	100.0	100.0

Sumber : BPS

Tabel IV. 4 Ketenaga Kerjaan Kabupaten/Kota

Kab/Kota	Angk. Kerja	Bekerja	TPT	TPAK
Pandeglang	458,120	412,219	10.0	64.8
Lebak	512,576	449,252	12.4	66.9
Tangerang	1,516,178	1,282,821	15.4	62.1
Serang	694,771	575,751	17.1	58.9
Kota Tangerang	683,291	543,704	20.4	58.2
Kota Cilegon	151,487	119,914	20.8	59.4
Banten	4,016,423	3,383,661	15.8	61.6

Sumber : BPS

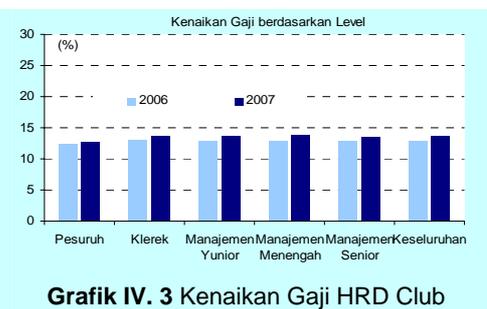
Sementara itu, dilihat per kabupaten/kota, persentase pengangguran tercatat lebih tinggi di kota-kota yang menjadi pusat kegiatan industri. Persentase pengangguran tinggi ada di kota Cilegon (20,8%), Tangerang (20,4%) dan Kabupaten Serang (17,1%). Sementara di Kabupaten yang lebih mengandalkan sektor pertanian, pengangguran relatif lebih rendah, yaitu Pandeglang (10,0%) dan Lebak (12,4%). Tingginya angka persentase pengangguran di kota/kabupaten yang menjadi pusat kegiatan industri merupakan fenomena yang cukup menarik untuk di telaah, perlu didalami penyebab tingginya persentase angka pengangguran dimaksud, apakah dikarenakan banyak industri yang tutup, urbanisasi, *mismatch* SDM, ataupun faktor penyebab lainnya. Sementara itu, fenomena besarnya penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian di wilayah selatan perlu dicermati Pemda dengan lebih meningkatkan infrastruktur pendukung dan pembinaan sehingga nilai tambah dan kesejahteraan petani dapat ditingkatkan.

Akselerasi angka pengangguran di Banten diperkirakan masih akan turun namun sangat tergantung antara lain kepada keberpihakan Pemerintah Daerah. Penyerapan tenaga kerja akan dapat diakselerasi, jika Pemerintah Daerah mengoptimalkan potensi-potensi keunggulan kompetitif, seperti lokasi geografis yang strategis dan dekat dengan pusat pemerintahan dan ekonomi Indonesia; menjalin kerjasama dengan Pemda Jakarta untuk menampung industri yang sudah tidak layak beroperasi di Jakarta ke kawasan-kawasan industri yang berlokasi di Banten. Dalam hal ini Pemda bekerjasama dengan pengelola kawasan industri harus mampu menjamin kebutuhan industri di kawasan, seperti akses ke dan dari kawasan industri; kondisi keamanan; menjamin minimnya biaya tinggi; dan fokus pada upaya perbaikan kesejahteraan publik dengan tetap memperhatikan konsistensi tata ruang.

B. UPAH

Secara agregat upah yang diterima tenaga kerja meningkat, namun peningkatan upah terutama lebih dirasakan oleh pekerja level menengah ke atas karena *base salary*-nya relatif sudah tinggi. Survei Human Resources Development Club (HRD Club) menunjukkan bahwa kenaikan gaji manajerial di sektor formal pada berbagai level jabatan mendekati angka 15%. Sementara itu, untuk golongan masyarakat berpenghasilan relatif subsisten kenaikan pendapatannya relatif kurang dapat secara cukup signifikan mampu mendorong peningkatan konsumsi. Hal ini tercermin pada

peningkatan upah buruh informal, Upah Minimum Provinsi (UMP), yang kurang cukup kuat mengimbangi kenaikan harga-harga. Peningkatan pendapatan pada berbagai level pekerjaan tersebut kurang memberikan dampak pada pengurangan disparitas pendapatan, sebagaimana tercermin pada angka gini ratio 2007 (0,365) yang meningkat dibandingkan tahun 2005 (0,356). Ke depan, disamping upaya untuk menjaga kestabilan harga dioptimalkan, kebijakan pengupahan ada baiknya lebih diarahkan pada upaya untuk dapat mengerem disparitas yang semakin membesar. Kebijakan tersebut antara lain dapat dilakukan melalui pengaturan peningkatan gaji yang lebih rendah untuk level yang lebih tinggi namun disisi lain kenaikan upah pada *low level* tetap dalam batas-batas normal dan mampu meredam ekspektasi terhadap inflasi.



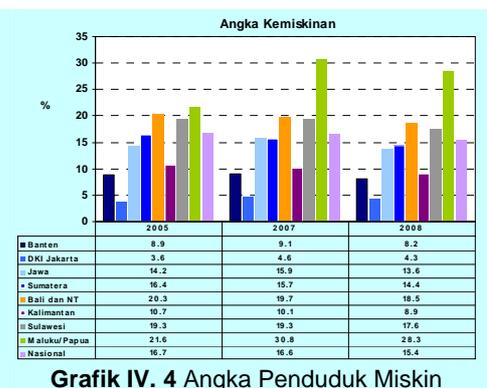
Grafik IV. 3 Kenaikan Gaji HRD Club

Provinsi	2002	2005	2007
1 DKI Jakarta	0.322	0.269	0.336
2 Banten	0.330	0.356	0.365
3 Jawa Barat	0.289	0.336	0.344
4 Jawa Tengah	0.284	0.306	0.326
5 Jogyakarta	0.367	0.415	0.366
6 Jawa Timur	0.311	0.356	0.337
7 Sumatera Utara	0.268	0.303	0.305
8 Sulawesi Selatan	0.301	0.353	0.37
9 Nasional	0.329	0.363	0.364

Sumber : BPS

C. KEMISKINAN

Persentase jumlah penduduk miskin di Banten (8,2%) masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan persentase jumlah penduduk miskin nasional, 15,4% (Grafik IV.4). Pada tahun 2008 jumlah keluarga miskin di Banten mencapai 816,7 ribu jiwa atau 8,2 % dari total penduduk Banten, yang relatif menurun dibandingkan 2007 (9,1%). Penurunan ini searah dengan penurunan jumlah penduduk miskin nasional yang turun dari 37,17 juta jiwa (16,6%) pada tahun 2007 menjadi 34,9 juta jiwa (15,4%) pada tahun 2008.



Grafik IV. 4 Angka Penduduk Miskin

Strata	Penghasilan (Rp ribu)	Banten (%)
A1	> 3.000	2
A2	2.000 - 3.000	5
B	1.500 - 2.000	11
C1	1.000 - 1.500	23
C2	700 - 1.000	32
D	500 - 700	17
E	< 500	11

Sumber : AC Nielsen, 2007

Walaupun tingkat kemiskinan menurun, permasalahan kemiskinan di Provinsi Banten perlu mendapat perhatian yang ekstra, karena kalau tidak ditangani secara serius dapat mengarah pada kemiskinan struktural. Hal ini mengingat bahwa salah satu faktor mendasar yang menyebabkan kemiskinan di Banten

cukup tinggi adalah rendahnya pendidikan sebagian masyarakat di Banten yang juga berpengaruh pada terbatasnya ketrampilan, sumber daya alam (*endowment*) yang relatif terbatas dan budaya masyarakat yang belum mengedepankan produktivitas dan daya saing. Beberapa indikator menunjukkan bahwa faktor pendidikan masih perlu dicermati antara lain adalah tingginya jumlah anak putus sekolah, yaitu pada akhir tahun ajaran 2005/2006 mencapai 9.087 siswa, dan masih tingginya jumlah penduduk yang buta huruf, yaitu mencapai 500.000 orang lebih. Ke depan, diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari Pemda Banten untuk mengubah paradigma masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan perlunya peningkatan keterampilan tanpa mengubah secara drastis budaya yang ada, terutama di era yang kompetitif.

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diluncurkan untuk mengatasi dampak kenaikan harga BBM relatif menahan bertambahnya penduduk miskin. Program BLT merupakan pengalihan subsidi BBM dengan penggantian memberikan subsidi tunai Rp 100.000/bulan yang ditujukan kepada keluarga miskin. Kenaikan harga BBM yang tanpa disertai program BLT relatif menambah jumlah penduduk miskin. Sementara dengan adanya program BLT, jumlah penduduk miskin relatif berkurang. Hal ini dikarenakan batas garis kemiskinan dengan adanya program BLT semakin tinggi, dari yang sebelumnya Rp 171.390 /kapita/bulan menjadi Rp 176.202 /kapita/bulan.

Tabel V.6 Simulasi Kenaikan Harga BBM, BLT dan Kemiskinan

	Batas Garis Kemiskinan (Rp)		
	Tanpa kenaikan Harga BBM	Dengan Kenaikan Harga BBM 28,7%	Dengan Kenaikan Harga BBM 28,7% dan Program BLT
Total	171,390	151,558	176,202
Makanan	123,418	106,436	124,315
Non Makanan	47,971	45,122	51,886

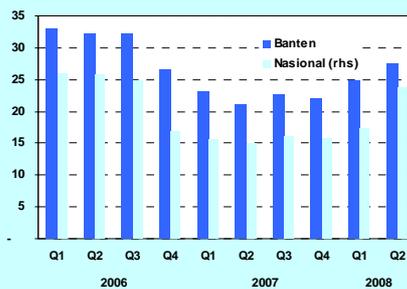
D. INDEKS KESENGSARAAN

Sejalan dengan tekanan inflasi yang meningkat, angka *misery index* (indeks kesengsaraan) menunjukkan peningkatan/memburuk (Grafik IV. 4). *Misery index* dihitung dengan cara menjumlahkan persentase tingkat pengangguran terbuka dengan tingkat inflasi. Angka Indeks ini pertama kali dikenalkan oleh Arthur Okun. Indeks ini mengasumsikan bahwa tingkat pengangguran yang tinggi dan tingkat inflasi yang memburuk akan menciptakan biaya sosial dan ekonomi suatu negara. Kombinasi dari meningkatnya inflasi dan bertambahnya angka pengangguran akan berdampak pada memburuknya kinerja ekonomi yang tercermin dari meningkatnya *misery index*. Berdasarkan indikator *misery index*, kondisi kesejahteraan masyarakat di triwulan II 2008 sedikit meningkat, didorong oleh inflasi yang relatif tinggi pada kuartal kedua tahun 2008 (Grafik IV.5).

Tabel IV. 7 Pengeluaran Penduduk miskin

Keterangan	(Persen)	
	Kota	Desa
Kebutuhan dasar Makanan		
Beras	15.5	22.0
Telur, Daging & Susu	4.44	3.36
Kebutuhan lainnya	49	46.35
Kebutuhan dasar bukan Makanan		
Perumahan	7.37	8.05
Listrik	4.06	2.35
Pendidikan	1.73	1.02
Transportasi	2.58	1.58
Kebutuhan lainnya	15.32	15.29
Total	100	100

Sumber :BPS, diolah

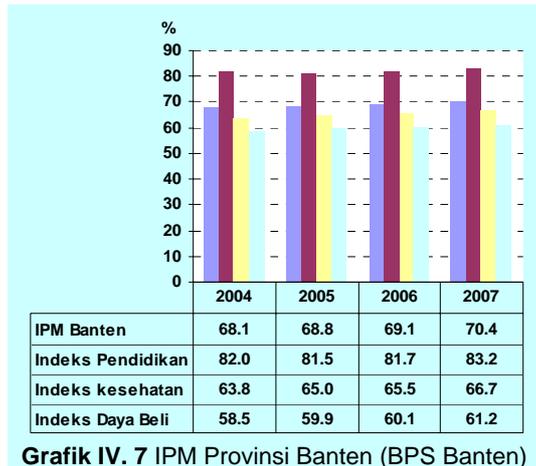


Grafik IV.5 Indeks Kesengsaraan

E. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA⁴

Indeks pembangunan manusia (IPM) adalah gabungan dari nilai yang menunjukkan tingkat kemiskinan, kemampuan baca tulis, pendidikan, harapan hidup, dan faktor-faktor lainnya di sebuah negara atau wilayah administratif tertentu (Grafik IV. 6 – 7). Indeks ini dapat digunakan untuk membandingkan *human development* antara satu negara dengan negara lainnya ataupun membandingkan *human development* antara satu Provinsi dengan provinsi lain di dalam satu wilayah negara. Terdapat tiga kriteria IPM, yaitu IPM tinggi dengan angka indeks di atas 0,800, IPM sedang dengan batas angka IPM 0,500 – 0,799, dan IPM rendah dengan nilai di bawah 0,500. Angka IPM Indonesia dan kebanyakan provinsi di Indonesia pada saat ini masuk dalam kategori IPM sedang. Berdasarkan *release* terakhir dari UNDP, IPM Indonesia pada tahun 2007 adalah 0,728 meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya 0,711. Peringkat IPM Indonesia sedikit membaik, yaitu meningkat menjadi rangking 108, namun demikian IPM Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan IPM negara tetangga, yaitu Malaysia (0,811), Thailand (0,781), Filipina (0,771), dan Vietnam (0,733). Khusus untuk di Banten, data terakhir menunjukkan bahwa IPM Provinsi Banten sedikit lebih rendah dibandingkan IPM Indonesia.

⁴ Indeks ini dikembangkan pada tahun 1990 oleh ekonom Pakistan Mahbub ul Haq, dan telah digunakan sejak tahun 1993 oleh UNDP pada laporan tahunannya. Nilai IPM menunjukkan pencapaian rata-rata pada sebuah negara dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yakni: 1. Usia yang panjang dan sehat, yang diukur dengan angka harapan hidup, 2. Pendidikan, yang diukur dengan tingkat baca tulis dengan pembobotan dua per tiga; serta angka partisipasi kasar dengan pembobotan satu per tiga, 3. Standar hidup yang layak, yang diukur dengan produk domestik bruto (PDB) per kapita pada paritas daya beli dalam mata uang Dollar AS.



Grafik IV. 7 IPM Provinsi Banten (BPS Banten)

Indeks pembangunan manusia di Provinsi Banten berdasarkan data terakhir menunjukkan adanya perbaikan, walaupun masih tetap dalam kategori sedang. IPM Provinsi Banten meningkat tipis dari 0,691 pada tahun 2006 menjadi 0,704 pada tahun 2007. Diperkirakan indeks pembangunan manusia searah dengan perekonomian yang bertumbuh dan meningkatnya alokasi belanja untuk pendidikan, kesehatan dan jaring pengaman sosial akan semakin membaik.

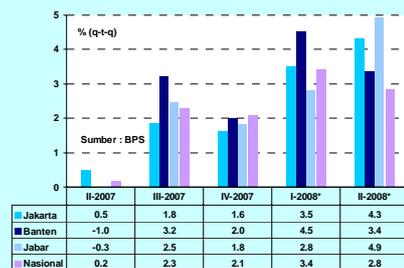
F. KESENJANGAN EKONOMI

Kesenjangan ekonomi wilayah Provinsi Banten relatif masih tinggi yang tercermin pada tingginya kesenjangan angka pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita antar kabupaten/kota. Kesenjangan pendapatan per kapita antara kabupaten/kota yang tertinggi dan terendah di Banten pada tahun 2006 hampir mencapai 9 kali lipat. Pendapatan per kapita yang tertinggi adalah Kota Cilegon (Rp 43,7 juta) dan yang terendah Kabupaten Lebak (Rp 4,8 juta). Kemudian dari sisi pertumbuhan ekonomi, beberapa kabupaten jika tidak diberikan perhatian dan pembenahan yang lebih intensif akan sulit untuk mengimbangi pertumbuhan yang telah dicapai oleh beberapa daerah kota yang pertumbuhannya tinggi, dan bahkan akan semakin tertinggal. Pertumbuhan di daerah kota setiap tahun dapat mencapai 10%, sementara pertumbuhan di beberapa kabupaten (terutama di selatan) masih berkisar 3-4%. Untuk mengurangi disparitas perekonomian, maka pembangunan di kabupaten yang tertinggal perlu diakselerasi, antara lain melalui peningkatan dan perbaikan di bidang infrastruktur, pendidikan terutama di kabupaten/kota di wilayah Banten sebelah selatan. Pada saat yang bersamaan pemda-pemda dimaksud juga diharuskan mampu menciptakan iklim investasi yang mendukung dengan tetap mempertimbangkan potensi dan kearifan lokal.

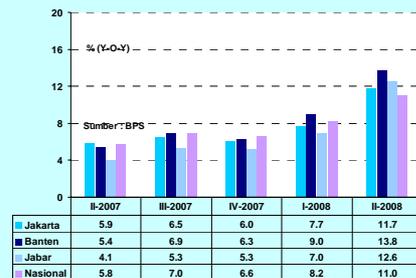
Box 2 : Kenaikan Harga BBM, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Penduduk Miskin

Kenaikan harga BBM yang diimbangi dengan penyaluran bantuan tunai kepada keluarga miskin untuk sementara akan mampu mengurangi jumlah penduduk miskin. Berdasarkan asesmen yang dilakukan, penurunan pendapatan riil masyarakat sebagai akibat tingginya inflasi untuk sementara dapat ditahan oleh kenaikan pendapatan yang berasal dari BLT.

Seiring dengan berlanjutnya kenaikan harga-harga beberapa komoditas di pasar internasional dan respon kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sebesar 28,7% berdampak pada peningkatan tekanan terhadap harga-harga. Inflasi di Banten pada triwulan II 2008 meningkat (3,4%,q-t-q), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi triwulan sebelumnya sebesar 4,5%. Sementara itu, dihitung secara tahunan inflasi di Banten pada triwulan II 2008 adalah sebesar 13,8% (y-o-y) lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 9,0%. Inflasi triwulan ini merupakan inflasi (y-o-y) tertinggi sejak triwulan keempat 2006.



Grafik I. 1 Inflasi Jakarta (q-t-q)



Grafik I. 2 Inflasi Jakarta (y-o-y)

Peningkatan inflasi tersebut dikhawatirkan akan menggerus daya beli konsumen, terutama konsumen strata menengah ke bawah. Daya beli masyarakat yang tergerus dikhawatirkan akan menambah jumlah penduduk yang jumlah konsumsinya di bawah batas garis kemiskinan. Berdasarkan skenario kenaikan harga BBM Mei 2008 sebesar 28,7% diperkirakan akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat turun dari Rp 171 ribu menjadi Rp 151 ribu, karena inflasi meningkat. Sehingga jumlah penduduk yang masuk kategori miskin akan bertambah cukup besar.

Tabel I. 1 Simulasi Penghasilan Tertinggi Penduduk Miskin, Kenaikan Harga BBM dan BLT

Daerah		Batas Garis Kemiskinan (Rp)		
		Tanpa kenaikan Harga BBM	Dengan Kenaikan Harga BBM 28,7%	Dengan Kenaikan Harga BBM 28,7% dan Program BLT
1. DKI	Total	291,823	273,699	297,146
	Makanan	191,269	177,670	192,891
	Non Makanan	100,554	96,029	104,255
2. Banten	Total	171,390	151,558	176,202
	Makanan	123,418	106,436	124,315
	Non Makanan	47,971	45,122	51,886

Sumber : BPS diolah

Penambahan penduduk miskin akan menjadi citra buruk bagi pemerintah yang tugasnya adalah mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu untuk mengurangi dampak kenaikan harga BBM terhadap penduduk miskin, pemerintah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai untuk yang kedua kalinya. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, ternyata untuk sementara BLT mampu menahan pertambahan jumlah penduduk miskin. Pendapatan penduduk miskin penerima BLT yang hidup di batas garis kemiskinan meningkat dari Rp 291 ribu menjadi Rp 297 ribu.

Kebijakan kenaikan harga BBM yang tidak dapat dihindari pada prinsipnya memang akan dapat menggerus pendapatan riil masyarakat dan dikhawatirkan akan menambah jumlah penduduk miskin. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM dan merelokasi subsidi kepada yang lebih berhak menerima adalah merupakan langkah yang tepat. Kebijakan ini ada baiknya terus dilaksanakan, yaitu mengarahkan penggunaan subsidi agar lebih tepat sasaran. Pengelolaan ekonomi yang baik, termasuk pengalokasian subsidi yang benar dan tepat akan membantu memudahkan manajemen makro ekonomi, baik fiskal maupun moneter secara lebih baik dan disisi lain sektor riil lebih memiliki kepastian.

BAB V KEUANGAN DAERAH

Perkembangan realisasi APBD 2008 Provinsi Banten hingga triwulan II 2008 cukup optimal. Pencapaian realisasi penerimaan mencapai Rp 1,03 triliun (52,0%), naik dibandingkan dengan periode sebelumnya (46,6%). Peningkatan realisasi pendapatan terutama bersumber dari realisasi pendapatan asli daerah Rp 0,79 triliun (57,7%), sementara realisasi dana perimbangan baru Rp 264,9 triliun (46,6%). Disisi belanja, realisasinya mencapai 31,5%, lebih tinggi dari pencapaian pada periode waktu yang sama tahun sebelumnya (24,8%). Dengan perkembangan tersebut di atas, APBD Banten sampai dengan Triwulan II masih mencatat surplus Rp 0,38 triliun. Secara keseluruhan pencapaian APBD 2008 Banten cukup bagus. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh relatif cepatnya pengesahan Perda APBD dan penyusunan anggaran yang relatif realistis. Perda APBD 2008 disahkan dengan Perda No. 10/2008 pada tanggal 18 Februari 2008. Sementara itu, besaran angka APBD 2008 relatif realistis yang dibandingkan dengan realisasi APBD 2007 perubahannya tidak cukup signifikan.

A. Perkembangan Keuangan Daerah

APBD 2008 relatif realistik dengan porsi pada beberapa komponen utama APBD relatif tidak mengalami perubahan. APBD Banten 2008 yang telah disahkan dengan Perda No.10/2008 pada tanggal 18 Februari 2008. Proporsi perkiraan pendapatan dari masing-masing komponen maupun proporsi masing-masing komponen di pos pengeluaran relatif hampir sama, kecuali pada pos belanja modal yang proporsi alokasinya meningkat dan pos belanja bantuan dan bagi hasil yang turun (walaupun nilai nominalnya meningkat). Dengan susunan APBD 2008 yang cukup realistik dipastikan realisasi APBD 2008 akan optimal.

Tabel VI.1 Realisasi APBD Banten 2007 dan APBD 2008 (Miliar Rupiah)

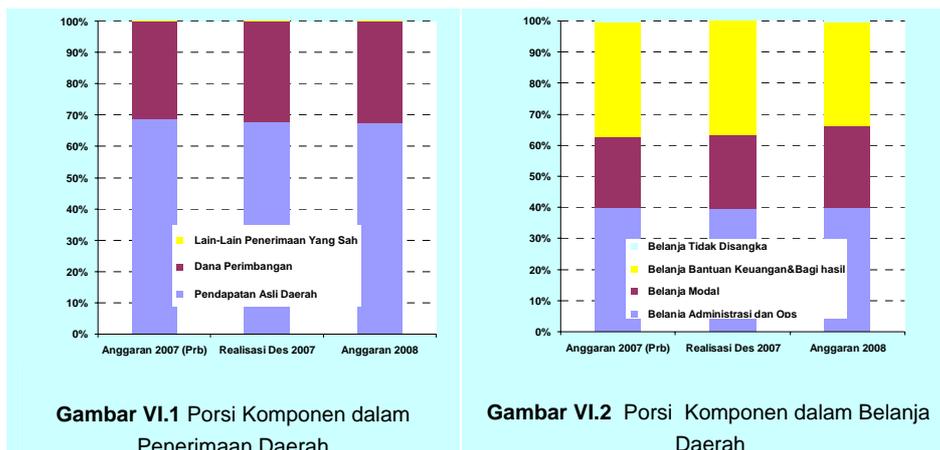
Uraian (Rp Trilyun)	Anggaran 2007 (Prb)	Realisasi Triwulan II 2007	%	Anggaran 2008	Realisasi Triwulan II 2008	%
Pendapatan Asli Daerah	1,306.9	609.5	46.6	1,367.4	788.5	57.7
Pajak Daerah	1,263.4	579.7	45.9	1,321.7	751.1	56.8
Retribusi Daerah	2.6	1.6	61.1	3.1	1.4	45.6
Laba Perusahaan Milik Daerah	17.7	17.7	100.0	18.1	21.3	117.7
Lain-Lain Pendapatan	23.3	10.6	45.6	24.5	14.6	59.8
Dana Perimbangan	590.7	274.9	46.5	658.5	264.9	40.2
Bagi Hasil Pajak	260.2	82.1	31.5	297.6	88.0	29.6
Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	0.2			-	-	
Dana Alokasi Umum	330.3	192.8	58.4	342.7	171.5	50.0
Dana Alokasi Khusus	-			18.1	5.4	30.0
Lain-Lain Penerimaan Yang Sah	2.2	0.9	41.1	3.0	1.3	43.0
Total Pendapatan Daerah	1,899.7	885.4	46.6	2,028.9	1,054.7	52.0
Belanja Administrasi dan Ops	808.6	197.0	24.4	855.8	283.3	33.1
Belanja Pegawai	376.4	115.6	30.7	374.9	143.7	38.3
Belanja Barang dan Jasa	362.6	67.1	18.5	375.9	81.6	21.7
Belanja Lain-lain	69.6	14.3	20.5	105.1	57.0	54.2
Belanja Modal	462.9	59.8	12.9	566.7	143.6	25.3
Belanja Bantuan Keuangan & Bagi Hasil	751.8	245.9	32.7	723.9	251.0	34.7
Belanja Tidak Disangka	6.5	0.2	2.6	8.0	-	-
Total Belanja dan Transfer	2,029.8	502.8	24.8	2,154.4	677.8	31.5
Surplus (defisit)	(130.1)	382.5	21.8	(125.5)	376.9	

Sumber : Sekretaris Daerah Pemprov Banten

a. Pendapatan Daerah

Pos Pendapatan APBD 2008 naik tipis jika dibandingkan realisasi APBD 2007 (6,3%). Pos pendapatan dianggarkan Rp 2.028,9 miliar, dengan porsi pendapatan tertinggi masih berasal dari PAD yang berupa pajak daerah (Rp 1.367,4 miliar) dan diikuti oleh penerimaan dana alokasi umum (DAU) Rp 342,7 miliar. Target pajak tersebut relatif realistis mengingat pencapaian pajak untuk anggaran tahun sebelumnya mencapai 98,6%. Sementara itu, pendapatan dari dana alokasi umum diperkirakan akan mampu mencapai target yang direncanakan didorong oleh pengesahaan APBD Banten yang cukup cepat dan tepat waktu.

Peran PAD (Pendapatan Asli Daerah) dalam penerimaan daerah masih dominan dan memiliki kecenderungan untuk meningkat. Pada tahun 2007 proporsi realisasi PAD di dalam pendapatan APBD Banten mencapai 68,0%, atau dua kali lipat lebih dibandingkan dengan dana perimbangan (31,8%), sementara tahun anggaran 2008 PAD mencapai 67,4%, sedikit menurun proporsinya. Namun demikian penurunan tersebut lebih disebabkan oleh peningkatan anggaran dana perimbangan yang lebih tinggi, termasuk di dalamnya peningkatan penerimaan dana alokasi khusus yang dianggarkan sebesar Rp 18 miliar. Porsi PAD yang lebih dominan mencerminkan bahwa kemampuan intern Banten cukup tinggi, namun demikian mengingat kebutuhan pembiayaan yang tinggi, maka upaya-upaya untuk meningkatkan alokasi dana perimbangan tetap harus dilakukan. Porsi terbesar PAD terutama berasal dari pajak daerah, yang diperkirakan akan mampu dicapai dengan seiring membaiknya perekonomian Banten.



Sementara itu, perkembangan realisasi pendapatan APBD 2008 sampai dengan triwulan II 2008 telah mencapai 52,0% (Tabel VI.1). Realisasi pendapatan daerah ini relatif lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2007 (46,6%). Yang menjadi sumber tingginya pencapaian realisasi penerimaan adalah relatif tingginya realisasi pendapatan asli daerah/PAD (57,7%), terutama yang berasal dari pajak daerah dan laba perusahaan milik daerah. Pencapaian realisasi yang cukup tinggi ini dipengaruhi oleh

perekonomian yang masih tumbuh sehingga pendapatan pajak daerah, terutama yang berasal dari pajak kendaraan bermotor meningkat. Data menunjukkan bahwa penjualan kendaraan bermotor di Banten masih meningkat cukup tinggi (21%). Secara nominal realisasi PAD tersebut dibandingkan dengan tahun sebelumnya juga melonjak cukup tinggi, yaitu dari Rp 609,5 miliar menjadi Rp 788,5 miliar. Semetara itu, realisasi dana perimbangan sudah mencapai 40,2% dengan sumber penerimaan utama berasal dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil pajak.

b. Belanja Daerah

Seperti halnya pada pos pendapatan, pos belanja juga dianggarkan meningkat. Anggaran belanja meningkat 15,4% dibandingkan realisasi belanja APBD 2007. Peningkatan terbesar terjadi pada pos belanja modal 27,4% menjadi Rp 566,7 miliar. Demikian pula alokasi pada pos dana transfer ke kabupaten dan kota⁵ yang meningkat 5,4%. Peningkatan dana transfer ke kabupaten/kota ini mencerminkan peningkatan perhatian Pemprov Banten terhadap pembangunan di kabupaten/kota. Secara keseluruhan peningkatan dan alokasi dana cukup realistis sehingga diyakini pencapaiannya akan cukup tinggi.

Sementara itu, realisasi belanja daerah sampai dengan triwulan II 2008 mencapai 31,5%, relatif naik dibandingkan realisasi pada periode waktu yang sama tahun sebelumnya (24,8%). Peningkatan realisasi APBD tersebut terjadi baik pada pos belanja rutin maupun modal. Pada pos belanja rutin, realisasi mencapai Rp 283,3 miliar (33,1%) terutama dari masih belanja pegawai dan belanja lain-lain. Di sisi belanja modal, realisasinya mencapai 25,3%, naik dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (12,9%). Dari jumlah belanja modal yang dianggarkan Rp 566,7 miliar telah terealisasi Rp 143,6 miliar (25,3%). Realisasi belanja modal ini cukup tinggi, dan diperkirakan pada triwulan berikutnya realisasi belanja modal akan dapat lebih optimal mengingat telah berjalannya sebagian besar pelaksanaan *dropping* anggaran dan proses tender proyek maupun tender pengadaan barang dan jasa.

c. Surplus/Defisit Anggaran

Secara keseluruhan, APBD Banten hingga triwulan II 2008 mengalami surplus Rp 376,9 miliar. Hal ini merupakan pola yang wajar, di mana realisasi APBD sampai dengan triwulan III akan lebih banyak di pos penerimaan, sedangkan realisasi belanja relatif lebih lambat. Pada triwulan empat antara realisasi penerimaan dan pengeluaran dipastikan akan lebih berimbang

⁵ Belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota merupakan belanja konsekuensi logis dari penerimaan pajak daerah (30% dari realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan bermotor (BBNKB), 70 % dari realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Industri, dan 70% dari realisasi Pajak Air Permukaan (AP) dan Pajak Air Bawah Tanah (ABT).

B. Arah Pembangunan Banten

Pemerintah Propinsi Banten dalam perencanaan pembangunan daerah menyusun RPJMD 2007-2012 sebagai arahan untuk mencapai tujuan pembangunan secara terukur. RPJMD merupakan penjabaran dari visi⁶, misi⁷ dan program Kepala Daerah serta sebagai rujukan dalam penyusunan RKP (Rencana Kerja Pembangunan Daerah), RAPBD, Penyusunan LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Kepala Daerah dan tolok ukur kinerja Kepala Daerah.

Prioritas Program Pembangunan

Arah kebijakan pembangunan daerah Propinsi Banten berdasarkan Visi, Misi dan Strategi daerah dijabarkan dalam 9 (sembilan) prioritas pembangunan daerah. Prioritas pembangunan tersebut ditetapkan sebagai berikut (a) Pengembangan ekonomi lokal berbasis pertanian (tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, kelautan dan pariwisata), (b) Penataan ulang struktur industri yang berdaya saing dengan prioritas penggunaan bahan baku lokal unggulan, (c) Peningkatan akses, mutu, relevansi dan tata kelola pelayanan pendidikan, (d) Pengembangan *Bridging Programme* (kesetaraan/ jembatan penghubung) antara dunia pendidikan dengan dunia usaha, (e) Peningkatan promosi, pelayanan kesehatan dan pengembangan usaha kesehatan berbasis masyarakat, (f) Pengembangan kapasitas kelembagaan sosial-ekonomi berbasis masyarakat, (g) Restrukturisasi, refungsionalisasi dan revitalisasi lembaga-lembaga pemerintahan, kemasyarakatan, adat sebagai wahana kearah terwujudnya *Entrepreneurial Government* (Pemerintah yang Berjiwa Kewirausahaan), (h) Pengembangan wilayah produktif (wilayah pertumbuhan ekonomi tinggi) dengan infrastruktur yang memadai, (i) Pengembangan kawasan dan wilayah strategis melalui pola *multigates system* (3 pintu keluar-masuk wilayah Banten).

Prioritas pembangunan yang dicanangkan diatas cukup strategis dan dengan tetap mempertimbangkan unsur kearifan lokal. Prioritas pembangunan betul-betul mempertimbangkan kekurangan dan potensi ekonomi daerah. Secara sektoral, pendekatan pembangunan berupaya mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimiliki dan pada saat yang bersamaan penguatan kelembagaan ditingkatkan sehingga lebih efisien dan efektif.

Pemprov pada tahun 2008 berupaya untuk menarik investasi lebih tinggi. Upaya Pemprov meningkatkan investasi dilakukan

⁶ Visi pembangunan Propinsi Banten adalah "Rakyat Banten Sejahtera".

⁷ Misi pembangunan Propinsi Banten 2007-2012 adalah (a) melakukan revitalisasi dan refungsionalisasi lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan, (b) meningkatkan peran aktif dan menggalang semangat kebersamaan, solidaritas dan kemitraan seluruh komponen pelaku pembangunan, (c) memperkuat struktur ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha agribisnis dan memperluas kesempatan kerja, (d) meningkatkan taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat Banten, (e) menjadikan masyarakat Banten yang bersandar pada moralitas agama dalam kerangka negara Kesatuan Republik Indonesia, (f) mengembangkan dan menata ulang hubungan antar industri dengan orientasi pada penciptaan iklim yang kondusif bagi investasi, penggunaan bahan baku lokal unggulan dan penciptaan peluang usaha, (g) merevitalisasi kawasan dan antar kawasan dengan dukungan infrastruktur yang memadai melalui pengembangan "Tiga Pintu Keluar Masuk Wilayah Banten"

dengan membentuk Tim *Task Force* investasi yang memfasilitasi dan membantu para investor untuk merealisasikan proyek di Provinsi Banten. Tim tersebut didalamnya melibatkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Peternakan dan Pertanian, Aparat kepolisian serta aparat Bea cukai dan instansi lainnya. Sementara itu, beberapa kabupaten/kota telah membentuk pelayanan satu atap untuk lebih mempermudah izin investasi di Banten.

Pertumbuhan ekonomi terus dipacu dengan upaya untuk terus melakukan perbaikan sektor industri, perdagangan dan pertanian. Di sektor industri yang menyumbang hampir separoh dari jumlah PDRB daya saingnya terus ditingkatkan. Pengembangan di sektor industri ini diharapkan akan dapat dicapai mengingat infrastruktur cukup mendukung, seperti Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta, Pelabuhan Merak, Jalan Bebas Hambatan Jakarta - Merak, dan Jaringan Jalan Kereta Api Jakarta - Rankasbitung – Merak. Selain itu, upaya pembangunan pelabuhan Bojonegara terus dilakukan, walaupun realisasinya relatif lambat. Di sisi penyediaan energi, jaminan pasokan tenaga listrik diupayakan untuk ditingkatkan dengan dukungan jaringan distribusi interkoneksi Jawa - Bali yang salah satu pembangkit utamanya berada di Suralaya, Cilegon. Ada pula pembangkit yang juga dijual untuk publik yang dimiliki oleh PT. Krakatau Daya Listrik (KDL), anak perusahaan dari PT. Krakatau Steel (KS) dan juga pembangkit listrik milik swasta lainnya. Saat ini 3 PLTGU juga sedang dilaksanakan pembangunannya sebagai bagian dari proyek 10000 MW listrik berbahan bakar batu bara. Untuk pengembangan di sektor industri, pada saat ini di Banten juga telah tersedia 19 (sembilan belas) Kawasan Industri yang tersebar di Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang dan Kota Cilegon. Pemerintah Daerah masih akan memperluas kawasan industri hingga mencapai 8.003 Ha.

Di sektor perdagangan pembangunan pesat terjadi di wilayah yang berbatasan dengan Jakarta. Pembangunan kawasan perniagaan di Tangerang tumbuh cukup pesat, seperti di kawasan BSD City, kawasan Lippo Karawaci, Gading Serpong, Bintaro, Balaraja-Cikupa dan Ciputat. Selain itu, proyek Pamulang Square yang hampir selesai 95% kini berlanjut kembali. Sementara itu, disektor pertanian upaya-upaya pengembangan anatara lain dilakukan dengan pemberian subsidi benih, pupuk dan upaya-upaya lainnya, termasuk perbaikan infrastruktur di sektor pertanian.

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB VI OUTLOOK KONDISI EKONOMI DAN INFLASI

A. PERTUMBUHAN EKONOMI

Pada triwulan III-2008 di tengah-tengah pertumbuhan ekonomi dunia dan domestik yang melambat, pertumbuhan ekonomi di Banten diperkirakan kembali tumbuh melambat. Perekonomian diproyeksikan tumbuh pada kisaran angka 5,3% (y-o-y), melambat dibandingkan dengan periode sebelumnya (5,9%). Perlambatan tersebut terutama dipengaruhi oleh konsumsi dan kegiatan investasi yang mengalami sedikit tekanan. Konsumsi menurun dipengaruhi oleh daya beli yang belum berubah signifikan, ekspektasi konsumen yang melemah, inflasi yang masih tinggi dan disisi lain belanja pemerintah masih rendah. Investasi sejalan dengan pelemahan ekonomi internasional dan domestik diperkirakan masih tumbuh rendah, walaupun disisi lain tingkat suku bunga masih cukup rendah. Sementara itu, seiring dengan penurunan permintaan dunia, kegiatan ekspor sedikit tumbuh melambat. Impor diperkirakan tumbuh lebih melambat yang dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan konsumsi dan produksi yang melambat.

Pertumbuhan ekonomi Banten pada triwulan III-2008 diperkirakan masih ditopang oleh Konsumsi dan Investasi, walaupun pertumbuhannya melambat. Pertumbuhan di kedua komponen permintaan domestik ini terutama dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal yang memang sedang kurang menguntungkan. Kegiatan ekspor dipengaruhi oleh permintaan dunia yang relatif menurun, tumbuh melambat. Sementara itu, impor sejalan dengan perlambatan permintaan domestik tumbuh melambat.

Tabel VI. 1 Pertumbuhan Ekonomi dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi

Banten	2006	2007*	Q1-2008*	Q2-2008p	Q3-2008p
Konsumsi	6.4	6.6	6.7	6.6	6.2
Investasi	4.5	5.0	5.1	4.9	4.8
Ekspor	7.8	8.0	7.9	7.6	7.5
Impor	8.7	8.4	8.4	8.4	8.2
PDRB	5.5	5.9	6.0	5.9	5.3

* angka sementara

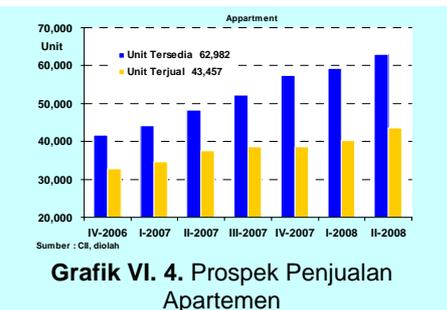
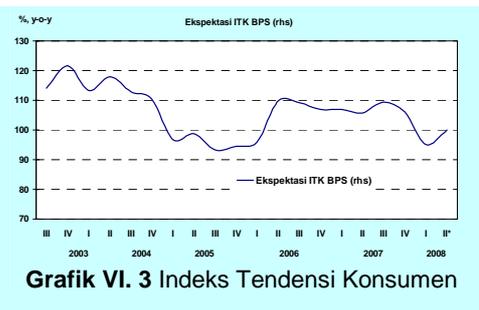
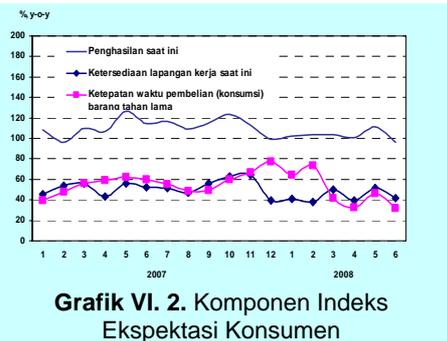
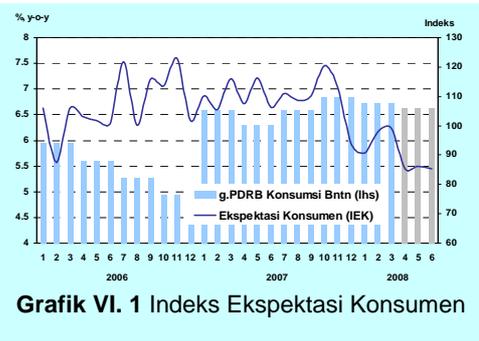
p proyeksi Bank Indonesia

1. Sisi permintaan

Konsumsi pada triwulan III-2008 diperkirakan sedikit melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (6,6%) dengan laju pertumbuhan sebesar 6,2% (y-o-y). Perlambatan pertumbuhan konsumsi dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti prompt, hasil survei, dan informasi anekdotal yang menunjukkan bahwa trend pertumbuhan konsumsi diperkirakan melambat. Hasil survei menunjukkan bahwa pertumbuhan konsumsi mulai melemah antara lain adalah indeks ekspektasi konsumen dan indeks tendensi konsumen. Indeks ekspektasi konsumen menunjukkan bahwa pada triwulan III-2008 konsumsi menurun. Penurunan terjadi baik pada komponen kondisi lapangan kerja, penghasilan maupun kondisi ekonomi. Sementara itu indeks tendensi konsumen oleh BPS masih

menunjukkan kecenderungan menurun meskipun terdapat sedikit perbaikan dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Kenaikan daya beli juga terhambat mengingat sebagian perusahaan pada tahun 2008 tidak menaikkan gaji karyawannya, sementara inflasi tinggi. Dari laporan Jamsostek, di wilayah Jabotabek terdapat 40% perusahaan yang tidak pernah menaikkan gajinya. Penurunan penghasilan masyarakat juga diindikasikan dari besarnya jumlah masyarakat yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor hingga bulan Juni 2008 yang mencapai 9.987 kendaraan roda empat dan 76.669 roda dua dengan potensi kehilangan pajak sebesar Rp 7 milyar.



Investasi pada triwulan III-2008 diperkirakan sedikit melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (4,9%), dengan laju pertumbuhan 4,8%. Perlambatan ini terkait dengan kondisi perekonomian nasional dan internasional, serta ekspektasi dunia usaha terhadap prospek perekonomian yang masih cenderung belum membaik. Investasi pemerintah pada triwulan III-2008 dipastikan mulai tumbuh mengingat seiring realisasi proyek pemerintah. Sementara itu investasi yang bersifat multiyears berupa proyek prasarana masih tetap berjalan, antara lain proyek jalan tol lingkaran selatan dan pembangunan pembangkit tenaga listrik di Banten.

Peningkatan investasi, terutama investasi swasta dalam beberapa hal diperkirakan masih dihadapkan pada beberapa hambatan. Sebagai contoh, pembangunan pabrik Semen PT Boral Indonesia di kabupaten Lebak masih terganjal oleh pembebasan lahan yang akan digunakan untuk akses jalan menuju pabrik. Sementara itu pembangunan PLTU Banten 2 di Labuan sempat mengalami hambatan berkaitan dengan masalah sosial dan lingkungan hidup.

Walaupun peningkatan investasi masih relatif terbatas, namun demikian di tahun 2008 investasi diperkirakan akan lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya, khususnya investasi bangunan. Beberapa proyek yang terkait dengan investasi bangunan tersebut antara lain adalah berlanjutnya pembangunan properti Komplek Green Office BSD City dan *Serpong Town Square* di Serpong serta *Bellanova Country Mall* di Tangerang. Sementara itu investasi dalam bentuk mesin dan peralatannya, peningkatannya relatif masih terbatas yang antara lain disebabkan oleh masih relatif belum optimalnya pertumbuhan pasar domestik dan luar negeri. Kenaikan permintaan oleh sebagian besar industri masih direspon melalui peningkatan penggunaan kapasitas.

Ke depan, sejalan dengan semangat pemerintah yang semakin pro investasi dan bisnis, investasi diperkirakan akan dapat dipacu lebih tinggi. Semangat pemerintah tersebut antara lain tercermin pada dikeluarkannya beberapa produk Peraturan Pemerintah yang ditujukan untuk mendukung peningkatan investasi, seperti :

- (1). UU penanaman modal pada bulan Mei 2007.
- (2). Inpres No. 3/2006 tentang paket kebijakan perbaikan iklim investasi dan peraturan selanjutnya yang mengeluarkan wewenang bagi pemda untuk mengeluarkan ijin investasi penanaman modal bagi PMDN sepanjang ketentuannya mengacu kepada ketentuan investasi BKPM.
- (3). Peraturan Presiden 4/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Modern dan Toko Modern yang memberikan peluang kepada investor asing untuk masuk ke bisnis eceran dan lokal.
- (4). Pemerintah Kabupaten Serang menerapkan pola perijinan satu atap dibawah satu satuan kerja Badan Perijinan dan Penanaman Modal Terpadu (BPPMT).
- (5). Pemerintah Kabupaten Lebak mengedepankan Visi “Kabupaten Lebak menjadi Daerah yang Menarik Untuk Berinvestasi Tahun 2009” dengan menggalakkan kantor pelayanan perijinan terpadu (KPPT) yang dibentuk berdasarkan Perda 3 tahun 2005.
- (6). PP No. 1 / 2008 tentang investasi pemerintah yang diharapkan akan mempercepat penyerapan dana investasi pemerintah yang selama ini terhambat oleh masalah pengesahan APBD. Selain itu, PP tersebut juga dapat digunakan untuk menyalurkan dana investasi pemerintah untuk mendirikan Lembaga Pembiayaan Investasi.
- (7). Pemerintah Kota Tangerang sedang membangun zona khusus sektor industri di kecamatan Jatiuwung, Periuk, Benda dan Batu Ceper sebagai upaya untuk menarik investor
- (8). Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) dari Pemerintah pusat untuk Banten mengenai Free Trade Zone (FTZ), mengingat Banten sebelumnya diperuntukkan sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK). untuk Banten. Hal ini diperlukan untuk mengantisipasi masuknya investor kilang minyak dari Iran dan Produsen Kendaraan dari Perancis, yang akan menanamkan investasinya jika ada FTZ.
- (9). Pemerintah juga sudah akan membentuk tim *Task Force* Investasi yang fungsinya memberikan fasilitas dan menarik investor dari luar.

Sementara itu Perda yang berpeluang hambatan investasi antara lain :

- (1). Perbup Pandeglang No 1/2007 yang melarang truk tronton untuk melintas di wilayah Pandeglang, menyebabkan saluran distribusi hasil-hasil alam dari Pandeglang dan Lebak menuju ke Serang terganggu. Selain itu, pelarangan tersebut juga menyebabkan rusaknya ruas jalur alternatif Cileles – Gunung Kencana, yang tidak dipersiapkan untuk melayani kendaraan berat.
- (2). Kepmendagri No 24 tahun 2006 yang mengharuskan pemda menyediakan layanan satu atap bagi pengurusan investasi. Meskipun pelaksanaannya paling lambat bulan Juli 2007, namun ketentuan ini belum ditindak lanjuti oleh pemda di propinsi Banten karena kekurangan sumber daya manusia. Selain itu penerapannya dikhawatirkan akan mempengaruhi pendapatan daerah dari sektor perijinan.
- (3). SK Menteri Keuangan perihal “Penyesuaian harga materian untuk setiap kegiatan fisik yang didanai APBD” menyebabkan sekitar 3.000 proyek fisik pemerintah daerah Banten menunda pelaksanaan proyek fisik.

Pada tahun 2008 pemerintah melalui kementerian koordinator bidang perekonomian berencana mengeluarkan paket kebijakan baru rencana tindak yang merupakan kelanjutan dari inpres No. 6 tahun 2007. Sebelumnya, inpres No 6 th 2007 tersebut merupakan tindak lanjut inpres No 3 tahun 2003.

Ekspor pada triwulan III-2008 diperkirakan tetap tumbuh, walaupun dengan laju pertumbuhan yang melambat (7,5%)
 Perlambatan pertumbuhan ekspor Banten dipengaruhi oleh permintaan dunia yang menurun serta pasar dalam negeri yang walaupun meningkat tetapi tumbuh lambat.

Sementara itu, impor di triwulan III-2008 diperkirakan tumbuh sedikit melambat dengan laju pertumbuhan sebesar 8,2%. Faktor yang mempengaruhi perlambatan impor, baik impor yang berasal dari propinsi lain (domestik) maupun impor dalam rangka perdagangan internasional terutama adalah kondisi perekonomian nasional yang masih tumbuh melambat.

2. Sisi Penawaran

Respon di sisi sektoral terhadap perkembangan disisi permintaan tercermin pada perkembangan beberapa sektor ekonomi utama. Sektor-sektor ekonomi utama yang tumbuh relatif tinggi antara lain adalah sektor perdagangan; sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan; sektor transportasi dan komunikasi; dan sektor bangunan. Sedangkan sektor pertanian dan industri diperkirakan tumbuh relatif rendah.

Tabel VI. 2. Pertumbuhan Ekonomi dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi

Banten	2006	2007*	Q1-2008*	Q2-2008p	Q3-2008p
Pertanian	-2.1	4.2	5.6	2.6	2.5
Pertambangan	2.2	12.7	13.1	7.6	7.5
Industri	5.5	3.1	2.5	2.1	2.2
Listrik	-3.0	4.7	3.1	4.6	1.2
Bangunan	5.2	13.1	10.6	15.0	10.5
Perdagangan	7.3	11.5	13.7	12.5	12.7
Pengangkutan	11.2	6.7	6.0	6.1	4.8
Keuangan	7.3	13.2	13.6	13.2	12.0
Jasa-jasa	9.4	9.6	7.9	13.0	12.9
PDRB	5.5	6.0	6.0	5.9	5.3

* angka sangat sementara
p proyeksi BI

Sektor Pertanian

Sektor Pertanian pada triwulan III-2008 diperkirakan akan tumbuh sebesar 2,5%. Perkiraan pertumbuhan di sektor pertanian masih didukung oleh sub sektor tanaman pangan khususnya padi. Dari sasaran produksi padi seluruh Banten sebesar 1.981 ribu ton, diperkirakan hanya akan terealisasi sebesar 1.838 ribu ton, namun masih lebih tinggi dari realisasi tahun sebelumnya 1816 ribu ton. Perkiraan tidak tercapainya target realisasi akibat adanya gangguan banjir, kekeringan dan hama tanaman. sekitar 8.117 Ha areal sawah di Banten mengalami gagal panen namun. Areal yang terbanyak mengalami gagal panen adalah Kabupaten Pandegelang 5.921 ha dan Kabupaten Lebak 1.882 yang merupakan lumbung padi di Banten.

Tabel VI.3 Target Produksi dan Luas Lahan Padi 2008

Daerah	Produksi	Luas Lahan
Pandegelang	605,262	122,783
Serang	501,409	104,806
Lebak	460,791	95,858
Tangerang	381,391	74,690
Kota Tangerang	16,168	3,186
Kota Cilegon	16,773	3,305
BANTEN	1,981,794	404,628

Sumber : Berbagai Media

Tabel VI.4 Perkiraan Produksi Beras Triwulanan

Periode Tanam	2006	2007	2008
Januari - April	920.1	828.8	838.9
Mei - Agustus	574.8	614.5	622.0
Sept - Des	256.6	372.6	377.2
Total	1,751.5	1816.0	1,838.0

Sumber : BPS Banten, diolah

Sektor Industri

Sektor industri diperkirakan tumbuh relatif melambat dengan perkiraan laju pertumbuhan sebesar 2,2%. Sub sektor yang mengalami penurunan produksi khususnya terjadi pada industri tekstil dan industri alas kaki. Menurut API, sampai bulan Mei 2008 sudah ada tiga perusahaan tekstil yang kolaps yang dapat menyebabkan PHK bagi 4.700 karyawan. Penyebabnya adalah meningkatnya biaya dan disisi lain permintaan lokal dan permintaan luar negeri menurun. Pasar domestik juga terdistorsi karena konsumsi lokal 78% dipenuhi oleh garmen impor termasuk impor ilegal. Khusus untuk industri garmen, permasalahan yang menghadang industri Garmen di wilayah Tangerang antara lain adalah:

- Meningkatnya biaya akibat harga BBM
- Menurunnya permintaan ekspor dari Amerika dan Eropa
- Menurunnya permintaan domestik akibat daya beli
- Membanjirnya impor ilegal
- Terganggunya pasokan energi listrik

Tabel VI.5 Konsumsi Garmen Dalam Negeri

Keterangan	2005	2006	2007	2008*
Produksi Lokal	303	456	270	324
Impor Legal	44	51	88	106
Impor Ilegal	489	509	862	1034
Total Konsumsi	836	1016	1220	1464

Sumber : API

Sampai bulan Mei 2008, sudah ada 1.300 pekerja yang di PHK. Sementara itu, sedikitnya 420 industri dari 1200 industri di Tangerang terancam gulung tikar akibat kenaikan harga BBM. Sebagian besar adalah industri padat karya seperti tekstil, garmen dan sepatu. Ke 420 industri tersebut memiliki 15.000 karyawan,

Walaupun sebagian perusahaan dihadapkan bada beragam permasalahan namun masih banyak perusahaan yang melakukan investasi. Sebagai contoh PT Chandra Asri Cilegon melakukan investasi senilai Rp 1,21 triliun untuk membangun pabrik butadiena dan tangki penyimpanan afta dengan pembangunan pada akhir tahun 2008. Dengan investasi ini diperkirakan produksi sektor industri kimia Banten berupa bahan *polyethelene* akan meningkat.

Sektor Bangunan

Sektor Bangunan diperkirakan tumbuh melambat menjadi sebesar 10,5% dari triwulan sebelumnya 15,0%, namun masih pada level yang tinggi. Masih tingginya pertumbuhan di sektor tersebut seiring dengan pertumbuhan yang terjadi di sub sektor perumahan, properti komersial dan infrastruktur termasuk beberapa pembangunan beberapa megaproyek. Beberapa proyek infrastruktur yang akan dibangun antara lain pembangunan tanggul dan bendungan di Pandegelang, yaitu di sepanjang sungai Ciliman dan Cilemer, pembangunan dermaga penyeberangan Margagiri senilai Rp 20 miliar yang diperkirakan selesai tahun 2008. Pembangunan dermaga ini diperkirakan akan mengurangi kepadatan dermaga Merak yang selama ini merupakan satu-satunya dermaga yang melayani penyeberangan pulau Jawa ke Sumatera.

Proyek Pelabuhan Int'l Bojonegara

Perspective of Bojonegara Port (2025)



Sementara itu, pembangunan megaproyek yang masih dalam tahap penyelesaian administrasi cukup banyak. Proyek tersebut antara lain proyek pelabuhan International Bojonegara Proyek Kota Baru Tangerang, Proyek Jalan Tol Serpong Balaraja (Seraja), Proyek

Kilang Bojonegara. Pembangunan Pelabuhan International Bojonegara masih dalam proses tender untuk mendapatkan investor. Proyek tender juga akan dilakukan terhadap investor yang akan membangun proyek Jalan Tol Serpong Balaraja sedangkan pemerintah daerah berpartisipasi dengan menyediakan lahannya. Untuk proyek kilang minyak, baru pada tahap penandatanganan MoU. Proyek besar yang sudah berjalan adalah pembangunan PLTU di Labuan yang diperkirakan akan dapat beroperasi pada tahun 2008.

Sedangkan perbaikan infrastruktur yang bersifat rehabilitasi pada tahun 2008, terutama akan dilakukan perbaikan terhadap jalan-jalan yang rusak akibat banjir pada bulan Februari 2008 di seluruh Kabupaten/Kota di Banten. Di Serang sebanyak 11 ruas jalan akan diperbaiki yang meliputi Jl Serdang – Waringinkurung, Jl Ciruas – Ranjeng, Ciwuru Raya, Melati – Penacangan, Perum Korem Ciracas, Jl Makmur Jaya, Jl Masuk Permata, Jl Ki Fathoni Pegantongan, Jl Empat Lima dan Jalan Tb Ma'mun. Khusus untuk kerusakan jalan tol Bandara yang rusak akibat banjir Februari 2008 justru menimbulkan investasi di bidang infrastruktur berupa perbaikan dan pelebaran Jalur Tol Sediatio sepanjang 12 km dari Pluit menuju Kamal dengan nilai investasi Rp 260 miliar. Proyek tersebut dimulai Maret 2008 dan diperkirakan akan selesai selama 12 bulan.

Perkiraan pertumbuhan sektor bangunan, juga diwarnai oleh pertumbuhan yang pesat pada bidang perumahan. BTN cabang Cilegon Serang mencatat bahwa tahun 2008 diperkirakan tidak kurang dari 6.874 unit rumah akan dibangun di Banten, tidak termasuk perumahan di Kabupaten Tangerang. Hal tersebut dibuktikan dengan hadirnya 13 perumahan baru di Serang dan Cilegon.

Tabel VI. 6 Target Pembangunan Rumah di Banten (diluar Kab Tangerang)			Tabel VI. 7 Perumahan Baru di Banten (diluar Kab Tangerang)		
Keterangan	satuan	jumlah	Tahun 2007	Tahun 2008	
Developer	perusahaan	22	Media Raya	Graha Asri	Metro Cilegon
Rumah Sederhana Sehat	rumah	4567	Bumi Mutiara	Taman Widya Asri	Putri Krakatau Hijau
KPR Non Subsidi	rumah	1740	Wanayasa	Taman Banten Lestari	Taman Krakatau
Rumah Real Estate	rumah	567		Banten Indah Permai	Griya Permata Asri
Total Rumah	rumah	6874	Taman Mutiara	Citra Gading	Pejaten Mas Estate
Total Akad Kredit	rumah	1875	Serang	Permata Banjar Asri	Persada Banten
				Serang Hijau	
Sumber : BTN Cilegon-Serang					

Sektor Perdagangan

Sektor Perdagangan Hotel dan Restoran walaupun diperkirakan tumbuh melambat namun diperkirakan masih tumbuh cukup tinggi (12,7%). Pertumbuhan ini terjadi baik di sub sektor perdagangan besar maupun perdagangan kecil. Indikasi peningkatan antara lain adalah terjadinya peningkatan arus barang di pelabuhan. Sebagai informasi, arus bongkat muat yang terus meningkat di Pelabuhan Tanjung Priok tidak dapat ditampung oleh dua pelabuhan di Banten yaitu pelabuhan Mas Indah Kiat dan Pelabuhan PT Pelindo II Ciwandan. Untuk mengantisipasi kebutuhan bongkar muat kapal yang terus meningkat, dibangun perluasan Pelabuhan Pelindo II di Ciwandan seluas 6 Ha, di Cilegon juga tengah mulai dibangun Pelabuhan Kubangsari seluas 66 Ha, yang diharapkan dapat

melayani arus bongkar muat kapal yang tidak terserap di pelabuhan Tanjung Priok Jakarta.

Per Juni 2008 Sebanyak 59 cabang minimarket dibuka dan tersebar di kabupaten dan kota Serang. Pertumbuhan yang pesat antara lain dipengaruhi oleh ditutupnya ijin pembukaan minimarket di propinsi DKI Jakarta sehingga pengusaha mendirikan tokonya di Banten. Sebuah pusat perdagangan, yaitu Sumaercon Mall Serpong seluas 65.000 m juga telah mulai beroperasi.

Sementara itu, untuk menyeimbangkan perkembangan antara pasar tradisional dan pasar modern, pemerintah kota Tangerang menerapkan ketentuan Zonasi bagi Ritel Modern sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden No 112 tahun 2007 tentang pasar modern. Pemda mengatur lokasi pasar modern dan memperbaiki infrastruktur pasar tradisional untuk menjaga kelangsungan hidup pasar tradisional dan pedagang-pedagangnya. Saat ini di kota Tangerang jumlah pasar modern sudah mencapai 16 buah, lebih banyak dibandingkan pasar tradisional yang berjumlah 11 buah.

Tabel VI. 7 Jumlah Pasar Modern dan Tradisional di Banten

Pasar Tradisional	Pasar Modern		
	Nama	Jenis	Jumlah
Pasar Anyar	Giant	Hypermart	1
Pasar Malabar	Carefour	Hypermart	3
Pasar Grendeng	Hypermart	Hypermart	1
Pasar Ramadani	Tip Top	Supermarket	1
Pasar Babakan	Ramayana	Supermarket	2
Pasar Ciledug	Aneka Subur	Supermarket	1
Pasar Bandeng	Sabar Subur	Supermarket	2
Pasar Induk Tanah Tinggi	Robinson	Supermarket	1
	Indogrosir	Supermarket	1
Pasar Taman Royal	Superindo	Supermarket	1
	Ramayana	Supermarket	2
Sumber : Tangerang Tribun			

Sektor Listrik

Sektor listrik diperkirakan tumbuh sebesar 1,2%, melambat dibandingkan pertumbuhan periode sebelumnya. Pada triwulan ke depan diperkirakan pasokan Batubara ke PLTU Suralaya belum sepenuhnya normal setelah mengalami kekurangan pasokan sebanyak 20% akibat cuaca buruk yang mengganggu pengiriman batubara melalui kapal tongkang. Kondisi ini memaksa PLN melakukan pemadaman bergilir di 41 titik di Kabupaten dan Kota Tangerang. Selain itu PLTGU Cilegon juga mengalami gangguan akibat terhambatnya pasokan gas yang jaringannya rusak di Pabelokan Kep Seribu.

Di Kabupaten Serang Banten, sampai bulan April 2008 sebanyak 16 ribu pemohon listrik belum terlayani karena keterbatasan dana APBD. PLN Area Pelayanan Jaringan Banten memasang target pada tahun 2008 akan melayani penambahan konsumen sehingga menjadi sebanyak 50.000 pelanggan dibandingkan dengan 35.000

pada tahun 2007. Untuk melayani keterbatasan daya pada saat beban puncak, PLN bekerjasama dengan PT Krakatau Steel yang juga memiliki pembangkit tenaga listrik akan melayani pada saat beban puncak.

Saat ini, proyek PLN Labuhan senilai Rp 4 triliun telah selesai 70% dan sudah memasuki pekerjaan tahap kedua yakni pembuatan boiler (pemanas cairan). PLTU yang berkekuatan 2x300 megawatt (MW) itu akan menyuplai aliran listrik ke daerah Jawa-Bali. PLTU yang direncanakan juga akan dibangun adalah PLTU Suralaya Baru dengan kapasitas 1 X 600 MW, dan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Suralaya unit VIII dengan kapasitas 630 MW yang tengah dibangun di Merak. Pembangunan PLTU di Banten tersebut merupakan bagian dari program Pemerintah untuk menambah pembangkit dengan kapasitas 10.000 MW.

Sektor Pengangkutan

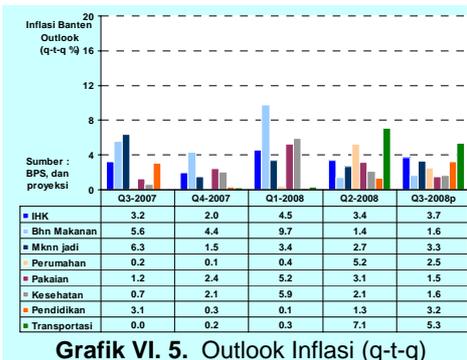
Sektor Pengangkutan diperkirakan masih akan tumbuh melambat (4,8%). Walaupun pertumbuhannya melambat, namun pertumbuhan di sub sektor transportasi dipastikan masih positif, antara lain dipengaruhi oleh pertumbuhan angkutan udara yang meningkat sejalan dengan adanya tambahan route penerbangan dari Jakarta dan tambahan jumlah armada oleh beberapa perusahaan penerbangan. Sektor angkutan laut meningkat dengan adanya tambahan 2 armada kapal RoRo yang melayani angkutan penyeberangan Merak-Bakaheuni. Jumlah kapal tersebut masih perlu ditambah mengingat dari 25 kapal yang ada, 5 diantaranya operasionalnya relatif minim karena sudah tua dan sering rusak. Sementara itu transportasi kereta api meningkat sejalan dengan adanya tambahan trayek baru KA Ciujung Semi Express dalam jalur ganda jurusan Jakarta Serpong. Arus transportasi barang dan manusia juga semakin lancar dengan sudah dapat digunakannya jalan lingkar selatan (JLS) sepanjang 31 km senilai Rp 81 miliar dari Serpong menuju ibukota kabupaten Tangerang di Tigaraksa. Saat ini pemerintah sedang mengupayakan pembangunan KA Bandara dan jalur ganda Serpong – Rangkasbitung. Dalam jangka panjang, pemerintah pusat akan menghidupkan kembali jalur KA sepanjang 132 km dari Jakarta menuju pelabuhan Bojonegara. Jalur yang akan dioperasikan lagi meliputi jalur Rangkasbitung-Pandegelang-Labuhan sepanjang 56 km dan Rangkasbitung-Anyer sepanjang 76km.

Sementara itu, ditargetkan pada awal Agustus 2008 surat izin trace (bodi) jalan tol Kunciran-Bandara Soekarno-Hatta (BSH) sudah bisa dikeluarkan. Nantinya, jalan tol sepanjang lebih dari 26 kilometer itu akan melewati Perumahan Alam Sutera, Kunciran, Duta Bintaro, Perumahan Banjar Wijaya lalu tembus ke Batuceper hingga BSH. Proyek ini akan dikerjakan oleh perusahaan patungan antara PT Jasa Marga dan sebuah perusahaan asal Malaysia.

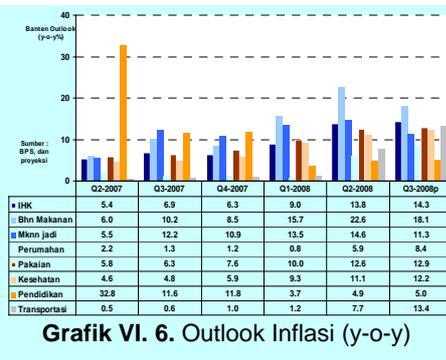
Sub sektor komunikasi dipastikan pertumbuhannya juga melambat. Faktor yang mempengaruhi pelambatan pertumbuhan di sub sektor ini adalah pertumbuhan ekonomi domestik yang melambat yang akan berdampak pada perlambatan pertumbuhan konsumsi masyarakat, termasuk konsumsi di sub sektor telekomunikasi.

B. INFLASI

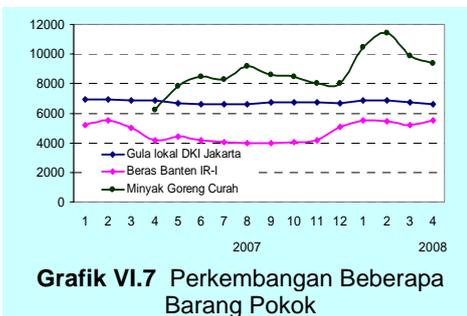
Inflasi regional Banten (q-t-q) pada triwulan III-2008 diperkirakan lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, namun masih di level yang tinggi. Secara triwulanan angka inflasi diperkirakan mencapai 3,7% (q-t-q) dan secara tahunan 14,3% (y-o-y). Masih tingginya inflasi di triwulan III-2008 diperkirakan berasal dari masih tingginya tekanan inflasi di kelompok bahan makanan, makanan jadi, perumahan, dan pendidikan. Ekspektasi konsumen, kenaikan biaya produksi dan masuknya tahun ajaran baru, serta memasuki hari besar keagamaan yang pada umumnya akan diikuti dengan peningkatan permintaan diperkirakan menjadi faktor pemicu inflasi.



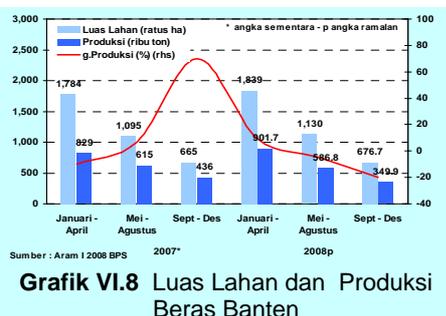
Grafik VI. 5. Outlook Inflasi (q-t-q)



Grafik VI. 6. Outlook Inflasi (y-o-y)



Grafik VI.7 Perkembangan Beberapa Barang Pokok



Grafik VI.8 Luas Lahan dan Produksi Beras Banten

Potensi tekanan inflasi yang masih tinggi harus diwaspadai. Hal yang harus diperhatikan adalah menyangkut ketersediaan pasokan komoditas pokok, pengelolaan ekspektasi masyarakat yang lebih moderat, mengarahkan agar kenaikan biaya pendidikan memasuki tahun ajaran baru tetap wajar, dan menghimbau produsen untuk meningkatkan supply dan tidak menaikkan harga.

Tabel VII. 5. Perkembangan Harga Rata-Rata Beberapa Komoditas Makanan

No	Nama Bahan Pokok dan Jenisnya	Mar-08	Apr-08	May-08	Jun-08
1	BERAS				
	IR KW I	4,933	4,750	5,650	5,716
	IR KW II	4,567	4,367	5,217	5,378
	IR KW III	4,383	4,250	4,850	4,769
2	GULA PASIR				
	- Impor	6,450	6,450	6,450	6,833
	- Lokal	6,367	6,150	6,250	6,269
3	MINYAK GORENG				
	- Bimoli	14,192	14,000	13,746	12,600
	- Tanpa Merk	12,428	10,700	11,130	10,053
4	MINYAK TANAH	2,900	2,800	3,250	3,191
5	DAGING				
	- Daging Sapi	51,833	50,000	50,333	48,646
	- Daging Ayam Negeri	18,167	18,333	19,917	18,006
	- Daging Ayam Kampung	32,167	28,833	28,833	
	- Daging Kerbau	49,333	48,667	48,500	
6	TELUR				
	- Telur Ayam Negeri	12,250	13,000	12,250	11,989
	- Telur Ayam Kampung	1,383	1,433	1,433	1,433
	- Telur Bebek	1,433	1,325	1,325	1,325
7	IKAN ASIN TERI (Medan)	38,950	40,333	40,833	42,885
8	Susu				
	Kental Manis				
	- Merk Bendera	7,517	7,517	7,550	7,550
	- Merk Indomilk	7,217	7,400	7,383	7,383
	Susu Bubuk				
	- Merk Bendera	23,000	23,250	23,167	23,167
	- Merk Dancow	24,708	27,625	27,375	27,375
9	TEPUNG TERIGU				
	- Segi Tiga Biru	7,183	7,033	7,000	7,515
10	GARAM BERYODIUM				
	- Halus	567	567	567	567
	- Bata	963	963	963	963

Sumber : BPS Propinsi Banten

Faktor penentu perkiraan inflasi tahun 2008 :

1. Kenaikan harga beras sejak bulan Desember tahun lalu diperkirakan pada triwulan kedua dan ketiga akan relatif normal seiring dengan meningkatnya pasokan beras ke Banten yang antara lain dipengaruhi oleh datangnya musim panen.
2. Kenaikan harga kedelai pada awal tahun 2008 diperkirakan akan mulai menurun sehingga mengakibatkan kembali turunnya harga tempe dan tahu, walaupun harganya tidak serendah pada periode-periode sebelum harga kedelai naik.
3. Kenaikan harga tepung terigu sebesar 100% telah mengakibatkan kenaikan harga di awal tahun 2008 tetapi berangsur-angsurakan turun seiring dengan menurunnya harga tepung.
4. Kebijakan stabilisasi harga pangan pemerintah terhadap komoditi pangan pokok seperti beras, minyak goreng, kedelai, terigu dan daging.

Pada bulan Februari 2008 pemerintah mengeluarkan kebijakan stabilisasi harga pangan untuk meredam kenaikan harga komoditi pokok seperti beras, minyak goreng, terigu dan kedelai. Pada

mulanya kebijakan stabilisasi harga pangan ditujukan untuk menurunkan harga dan mengembalikan harga kepada level semula. Akan tetapi, penurunan harga tersebut tidak efektif mengingat harga beberapa komoditi tersebut dipengaruhi oleh harga di pasar dunia. Oleh karena itu maka program stabilisasi harga pangan difokuskan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk tetap dapat membeli bahan makanan pokok sesuai dengan kemampuan mereka.

Tabel VI.8 Daftar Kebijakan Stabilisasi Harga Pangan

No	Komoditi	Kebijakan	Dampak
1.	Beras	Penurunan Bea Masuk Beras dari Rp 550/kg menjadi Rp 450 per kg	Meningkatkan stok beras di daerah untuk mencegah kenaikan harga beras. Namun kebijakan ini menyebabkan harga gabah petani turun Rp 100 per kg.
2.	Operasi Stabilitas Harga Beras (OSHG)	Dilakukan penjualan beras murah kepada masyarakat untuk mengatasi kekurangan pasokan beras	Masyarakat dapat membeli beras dengan harga murah di pasar tradisional
3.	Beras Raskin	Tambahan alokasi raskin dari 10 kg menjadi 15 kg per KK per bulan	Meningkatkan kesejahteraan rakyat miskin
4.	Minyak Goreng	Subsidi Rp 2.500 per kg serta pembebasan PPN 10%	Dengan subsidi, masyarakat yang memiliki kartu dapat memperoleh migor lebih murah PPN dilakukan dengan asumsi harga Rp 8.000 per kg.
5.	Kedelai	Penghapusan Bea Masuk 10%, PPh turun dari 2,5% menjadi 0,5% dan BLT kepada pengrajin tempe	Harga kedelai turun dari Rp 8.000 menjadi Rp 6.000. Ratusan pengrajin tempe di yang telah tutup diharapkan dapat kembali beroperasi
6.	Terigu	Penghapusan Bea Masuk Terigu PPN ditanggung pemerintah.	
7.	Daging	Enam perbaikan tata niaga daging : 1. pedagang bisa membeli langsung 2. pedagang bekerjasama dengan ADDI 3. Dibuka jalur transportasi darat dari WIT ke WIB 4. pengawasan kualitas daging oleh Deptan.	Harga Daging sapi mulai menurun dari Rp 8.000 menjadi Rp 55.000. Pemda DKI telah mengkoordinasikan supply daging di Jakarta melalui PD Darmajaya.

Operasi pasar murah minyak goreng dilakukan dalam bentuk minyak goreng non subsidi dan minyak goreng subsidi. Untuk minyak goreng non subsidi, pemerintah bekerjasama dengan distributor menyediakan minyak goreng bermerek seharga Rp 8.000, lebih murah dibandingkan dengan harga di pasar yang mencapai Rp 13.000. Operasi pasar minyak goreng telah dilaksanakan masing-masing di Kab. Serang, Kab. Tangerang, Kab Lebak dan Kota Serang dengan jumlah migor sebanyak 107.814 liter.

Tabel VI.9 Harga Bahan Bakar Minyak di Banten						Tabel VI.10 Tarif Angkutan Antar Pulau RoRo			
Jenis	2008		2008			Jenis	2007	2008	(%)
	Mar	April	Mei	Jun	Jul				
Premium	4,500	6,000	6,000	6,000	6,000	Penumpang			
Pertamax Plus*	8,300	8,600	9,250	10,300	10,750	Dewasa	9,000	10,000	11.1
Pertamax*	8,100	8,300	8,950	10,000	10,600	Anak-anak	5,000	5,500	10.0
Pertamax Dex*	9,100	10,200	11,100	12,700	13,500	Kendaraan			
Minyak Tanah	2,000	2,000	7,736	7,736	7,736	Gol I	16,000	17,000	6.3
Minyak Solar	4,300	7,780	7,780	7,780	7,780	Gol II	23,000	27,000	17.4
						Gol III	70,000	72,000	2.9

*) Harga Tanpa Subsidi
Sumber : Pertamina

Sumber : ASDP

Dari sisi *administered price*, kenaikan harga beberapa komoditas perlu diwaspadai. Beberapa komoditas yang harganya di atur oleh pemerintah dan diperkirakan akan dinaikkan tarifnya diantaranya adalah :

1. PDAM Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang menaikkan tarif air minum sebesar 36,7% yang berlaku bagi kelompok rumah sederhana, rumah mewah dan kalangan industri.
2. Kenaikan harga BBM akan disusul kenaikan tarif angkutan penyeberangan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Merak dan Bakauheni. Kenaikan tersebut akan diterapkan pada bulan Agustus 2008.
3. Kenaikan tarif angkutan kereta api. PT KA telah mengusulkan tarif KA ekonomi naik sebesar 45% namun belum direalisasikan.
4. Kenaikan harga minyak tanah yang terpengaruh oleh program konversi minyak tanah ke gas.

Dari sisi *core inflation*, terdapat beberapa hal yang patut diwaspadai, antara lain yang berasal dari penerimaan tunjangan hari raya (THR), kenaikan gaji karyawan secara umum sebesar 13,58% dan kenaikan UMP. Kenaikan gaji pegawai negeri Banten (15,0%), dan khususnya adanya tuntutan penyesuaian UMP sebagai dampak kenaikan BBM jika dipenuhi diperkirakan akan meningkatkan tekanan inflasi dari sisi permintaan dan sebagian produsen merespon dengan cara kenaikan harga produknya. Sebagai informasi, upah buruh yang tercermin dari UMP pada tahun 2008 sudah meningkat 12,8% dari Rp 661.613 menjadi Rp 746.500. Secara sektoral, upah buruh pabrik dan upah buruh pelabuhan juga meningkat rata-rata 5% dari Rp 48.300 per hari menjadi Rp 50.300 per hari. Sementara itu upah tukang derek naik dari Rp. 55.545 per hari menjadi Rp 57.085 per hari dan upah mandor dari Rp 64.740 per hari menjadi Rp 65.390 per hari.

Tabel VI.11 Kenaikan Gaji Karyawan			
(%)	2005	2006	2007
Pesuruh	9.9	12.3	12.7
Klerik	9.8	13.1	13.8
Manajemen Yuniior	9.8	13	13.7
Manajemen Menengah	9.6	12.8	13.9
Manajemen Senior	9.4	12.8	13.6
Keseluruhan	9.7	13	13.8
Rata-rata	9.70	12.83	13.58

Sumber : HRD Club 2007



Grafik VI.9 Upah Minimum Regional

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB VII KESIMPULAN DAN USULAN TINDAK LANJUT

Masih berlanjutnya perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia mempengaruhi kondisi perekonomian nasional yang juga tercermin pada perkembangan perekonomian Banten. Berdasarkan hasil Kajian Ekonomi Regional Banten di triwulan II 2008, beberapa kesimpulan yang dapat diambil antara lain adalah :

1. Perekonomian Provinsi Banten pada triwulan II 2008 masih menunjukkan perlambatan pertumbuhan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya. Faktor penyebabnya adalah terganggunya daya beli masyarakat yang antara lain dipengaruhi oleh tingginya angka inflasi dan ekspektasi masyarakat terhadap kondisi perekonomian, walaupun disisi lain dukungan pembiayaan dari sektor keuangan masih cukup tinggi.
2. Pertumbuhan investasi yang masih terbatas menyebabkan pengangguran dan jumlah kemiskinan belum dapat berkurang secara signifikan. Sementara itu disisi sektoral, sektor ekonomi yang tumbuh tinggi adalah sektor yang padat modal. Kondisi ke dua hal tersebut menyebabkan kualitas pertumbuhan belum optimal dan turut berkontribusi terhadap peningkatan kesenjangan pendapatan (*gini rasio*). Di triwulan II, kondisi kesejahteraan juga tertekan oleh tingginya inflasi di triwulan laporan, yang antara lain akan tercermin pada tingginya angka Indeks kesengsaraan.
3. Seperti juga pada triwulan sebelumnya, tantangan pembangunan ekonomi di Banten terutama terletak pada upaya peningkatan peran investasi, terutama disektor *tradable* guna menggerakkan pertumbuhan ekonomi lebih berkualitas, disamping meningkatkan level pertumbuhan yang masih di bawah sasaran.
4. Laju inflasi mengalami tekanan yang disebabkan oleh : kenaikan harga BBM, meningkatnya *imported inflation*, gangguan pasokan minyak tanah dan beberapa komoditas sayur-sayuran. Imported inflation berasal dari kenaikan harga BBM dan kenaikan harga beberapa komoditas pokok di pasar internasional seperti kedelai, gandum, dan CPO. Kenaikan komoditas ini juga berdampak pada kenaikan harga produk turunannya, seperti tempe, roti, mie dan lainnya. Komoditas emas juga melonjak paralel dengan perkembangan harga minyak dunia.
5. Pada triwulan-triwulan mendatang, tantangan ekonomi masih relatif berat. Faktor eksternal sangat berpengaruh terhadap prospek ekonomi ke depan. Berlanjutnya tanda-tanda pelemahan ekonomi Amerika dan beberapa negara maju lainnya sebagai dampak lanjutan dari kasus *subprime mortgage* dikhawatirkan akan berdampak pada perekonomian Indonesia dan regional. Permintaan terhadap beberapa komoditas unggulan di sektor manufaktur dikhawatirkan akan terganggu. Perekonomian Indonesia juga akan terganggu oleh kenaikan beberapa produk bahan baku makanan, seperti kedelai dan gandum di pasar internasional, serta kenaikan beberapa komoditas primer internasional, seperti minyak bumi. Walaupun dalam beberapa waktu terakhir tekanan kenaikan harga komoditas di pasar internasional agak menurun, namun kewaspadaan tetap harus dijaga.

Usulan tindak lanjut :**1. Terkait dengan pertumbuhan ekonomi :**

- a. Peningkatan daya saing kota Banten untuk menarik minat investasi dari Jakarta dan juga investasi di daerah lain di luar Jakarta dengan jalan mengoptimalkan pelayanan perizinan satu atap, dan perbaikan infrastruktur.
- b. Banten harus mampu memanfaatkan kedekatannya dengan ibukota negara. Salah satu yang dapat dilakukan adalah menjalin kerjasama yang lebih erat di bidang-bidang tertentu dengan Pemerintah propinsi DKI Jakarta. Di bidang investasi, Pemerintah Banten dapat memanfaatkan Jakarta sebagai salah satu pintu gerbang investasi di Banten. Selain itu, Banten ada baiknya juga melakukan pendekatan kepada industri yang dinilai sudah tidak layak beroperasi di Jakarta untuk direlokasi ke Banten. Di bidang perhubungan dan transportasi perlu dilakukan koordinasi yang erat sehingga kelancaran arus manusia dan barang diantara kedua propinsi dapat berjalan lancar. Di bidang perdagangan banten harus mampu memanfaatkan potensi pasar DKI yang besar.
- c. Mengupayakan percepatan pembangunan infrastruktur yang dibiayai dengan dana dari pemerintah pusat, seperti listrik, pelabuhan dan lainnya.

2. Terkait dengan inflasi :

- a. Kebijakan moneter dan fiskal (lokal dan pusat) yang kredibel, terutama untuk menjaga ekspektasi inflasi. Contoh kebijakan yang bersifat lokal antara lain adalah, tidak mengakomodasi kenaikan permintaan tushlah angkutan lebaran dan jika perlu menambah pasokan angkutan, melaksanakan program *discount day* menjelang dan pada perayaan hari besar keagamaan, dan menghimbau masyarakat untuk tetap berkonsumsi secara normal.
- b. Perlunya pelaksanaan secara konsisten kebijakan di bidang pangan dan menjamin kelancaran pasokan. Khusus untuk komoditas beras, kenaikan harga beras di pasar internasional perlu diwaspadai, stok yang cukup perlu dijaga dan kebocoran diminimalisir sekecil mungkin. Selain itu, perilaku pedagang dalam menentukan harga beras perlu dicermati secara seksama. Pemerintah disamping menjaga stok juga perlu lebih intensif melakukan monitoring terhadap arus komoditas beras dan komoditas pokok lainnya.
- c. Meneruskan upaya-upaya yang dilakukan oleh Tim Ketahanan Pangan Banten dalam menjaga kestabilan harga pangan seperti melalui operasi pasar dan kerjasama dengan BUMD dalam menjaga pasokan barang.
- d. Dengan diterapkannya SBH 2007 dalam penghitungan IHK, maka sudah pada waktunya tugas Tim Ketahanan Pangan diperluas cakupan tugasnya, terutama terait dengan bertambahnya kota di Banten yang dihitung IHK-nya.

3. Terkait dengan kesejahteraan masyarakat :

- a. Kebijakan lokal fiskal yang mampu memberi dampak pada redistribusi pendapatan yang lebih merata sehingga kesenjangan pendapatan dapat ditekan.
- b. Di bidang pengupahan, untuk memperlambat peningkatan kesenjangan pendapatan, ada baiknya di atur agar peningkatan gaji untuk level yang lebih tinggi persentase kenaikannya lebih rendah namun disisi lain kenaikan upah pada *low level* diupayakan dengan persentase yang lebih tinggi namun tetap dalam batas-batas normal dan berdaya saing, serta mampu meredam ekspektasi terhadap inflasi.
- c. Mengoptimalkan CSR, termasuk diantaranya mendorong dunia usaha untuk membangun kemitraan dengan UKM.
- d. Mendorong perluasan nasabah KUR di Banten.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Lampiran

Tabel 1. Indikator Makro Terpilih Provinsi Banten

Indikator Banten	Satuan	Periode	
PDRB		2006	2007
Atas Dasar Harga Berlaku	Rp Trilyun	97.87	107.30
Atas Dasar Harga Konstan	Rp Trilyun	61.32	64.93
Per Kapita*	Rp Juta	10.8	11.7
Pertumbuhan Ekonomi	(%)	5.5	5.9
Inflasi		Jun-07	Jun-08
Atas dasar y-o-y (Jun-Jun)	(%)	5.4	13.8
Atas dasar m-t-m (Ap-Jun)	(%)	0.5	2.2
Atas dasar y-t-d (Jan-Jun)	(%)	1.0	8.1
Pengangguran		Aug-07	Feb-08
Jumlah Penganggur	orang	633,150	601,840
Angka Pengangguran	(%)	15.8	14.2
Kemiskinan		2007	2008
Jumlah Pdd miskin	orang	886,200	816,700
Angka Kemiskinan	(%)	9.1	8.2

Sumber : BPS

Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Banten Menurut Sektor Atas Dasar Harga Berlaku

Sektor	2004	2005	2006	2007*
Pertanian	6,530,642.1	7,219,036.2	7,604,853.8	8,462,205.8
Pertambangan	79,474.4	88,457.2	95,648.6	113,823.1
Industri	36,972,196.9	42,098,680.3	48,642,336.7	51,634,859.0
Listrik	3,737,228.5	4,119,407.4	4,137,473.8	3,872,965.9
Bangunan	1,898,331.4	2,306,353.9	2,828,380.8	3,232,565.2
Perdagangan	12,605,813.7	14,499,930.6	17,081,607.5	20,531,921.0
Pengangkutan	5,889,081.5	7,257,845.0	9,182,131.3	9,982,933.8
Keuangan	2,329,052.1	2,782,823.5	3,278,935.9	3,777,703.7
Jasa-jasa	3,671,963.8	4,249,754.4	5,015,905.0	5,695,662.6
PDB	73,713,784.4	84,622,288.5	97,867,273.4	107,304,640.0

Sumber BPS *) angka sementara

Tabel 3. Produk Domestik Regional Bruto Banten Menurut Sektor Atas Dasar Harga Konstan

Sektor	2004	2005	2006	2007*
Pertanian	4,930,266.8	5,061,650.4	5,005,861.6	5,206,876.0
Pertambangan	56,557.6	59,286.0	61,508.9	68,508.3
Industri	27,749,175.8	28,975,547.1	30,548,566.6	31,596,185.0
Listrik	2,416,794.0	2,567,049.9	2,510,895.1	2,396,640.6
Bangunan	1,443,158.8	1,580,487.7	1,662,420.2	1,864,796.6
Perdagangan	9,830,054.8	10,699,437.6	11,478,134.2	12,885,103.8
Pengangkutan	4,540,508.6	4,910,855.7	5,417,133.6	5,796,860.9
Keuangan	1,557,896.6	1,744,477.3	1,888,037.8	2,116,922.1
Jasa-jasa	2,355,993.5	2,508,156.4	2,744,950.6	2,994,883.5
PDB	54,880,406.5	58,106,948.2	61,317,508.7	64,926,776.7

Sumber BPS *) angka sementara

Tabel 4. Indeks Harga Konsumen Provinsi Banten

IHK	Bahan Makanan		Perumahan	Pakaian	Kesehatan	Pendidikan	Transportasi	
	Makanan	Jadi						
Jan-04	111.85	108.22	110.43	122.1	109.86	106.65	121.52	103.55
Feb-04	112.31	108.79	111.06	122.87	109.54	106.66	121.59	103.56
Mar-04	114.07	111.9	111.22	125.64	110.01	107.55	121.67	103.87
Apr-04	114.43	112.77	111.29	125.65	109.7	109.48	121.7	104.01
May-04	114.86	111.44	111.85	126.32	111	109.68	121.72	108.68
Jun-04	115.75	113.36	111.76	126.66	111.75	111.16	121.72	109.51
Jul-04	115.86	113.24	112.04	126.88	112.34	111.08	122.25	109.36
Aug-04	114.74	109.41	112.01	126.98	112.86	110.95	123.49	109.57
Sep-04	114.87	108.67	113.53	127.19	112.83	111.22	124.4	109.48
Oct-04	115.85	110.52	114.65	127.75	112.96	111.5	124.4	109.68
Nov-04	116.83	113.03	114.96	127.82	113.41	111.66	124.62	110.11
Dec-04	117.81	114.91	115.47	128.7	113.94	111.25	125.22	110.31
Jan-05	119.78	119.49	116.16	129.93	114.14	111.67	125.49	110.68
Feb-05	119.58	118.79	116.35	129.85	114.08	111.77	125.49	110.73
Mar-05	122.75	118.82	117.67	130	114.52	113.22	129.18	135.04
Apr-05	122.79	117.88	117.71	130.94	114.97	113.32	129.25	135.86
May-05	122.96	118.01	118.03	131.12	115.16	113.46	129.47	135.9
Jun-05	124.58	118.84	120.9	134.53	115.38	113.95	129.4	136.06
Jul-05	125.61	121.59	120.92	134.72	116.6	114.01	129.28	136.02
Aug-05	126.22	122.33	121.53	134.71	117.16	114.03	134.06	136.09
Sep-05	126.67	122.68	122.09	135.1	118.15	114.69	134.06	136.55
Oct-05	135.38	131	122.92	145.94	119.08	115.53	135.49	166.9
Nov-05	136.74	133.56	125.38	146.22	119.37	114.69	135.84	166.9
Dec-05	136.79	133.58	125.9	145.75	120.07	114.74	135.77	166.85
Jan-06	139.47	140.66	127.60	145.64	120.22	116.25	136.07	166.87
Feb-06	140.59	142.64	129.20	145.67	120.18	116.67	136.82	168.03
Mar-06	139.91	139.87	129.43	146.11	120.91	116.65	136.93	168.22
Apr-06	140.60	138.56	129.27	150.89	121.83	116.98	137.03	168.25
May-06	140.66	138.17	129.35	150.79	123.67	117.03	137.34	168.56
Jun-06	141.12	139.55	129.42	150.67	123.69	117.17	137.45	168.66
Jul-06	141.31	139.84	129.42	150.88	124.37	117.27	137.69	168.56
Aug-06	143.03	140.93	129.50	151.69	124.75	117.32	163.57	168.61
Sep-06	143.64	141.73	129.46	152.34	124.56	117.72	168.65	168.52
Oct-06	144.35	143.05	129.50	152.84	124.89	117.96	168.65	169.72
Nov-06	144.58	144.08	129.88	152.48	125.71	118.93	168.40	168.03
Dec-06	147.28	150.24	132.96	152.70	126.17	118.88	168.73	168.25
Jan-07	148.41	151.54	133.44	153.29	127.89	120.59	175.14	168.39
Feb-07	149.87	154.32	133.63	153.66	129.43	120.90	182.09	168.40
Mar-07	150.19	154.55	134.24	153.86	129.84	122.00	182.29	168.47
Apr-07	148.54	148.44	135.34	153.99	130.49	122.16	182.29	168.91
May-07	148.02	146.64	135.43	153.91	130.27	122.56	182.42	169.44
Jun-07	148.73	147.91	136.56	154.03	130.86	122.52	182.58	169.52
Jul-07	150.41	151.66	138.62	154.08	131.12	122.61	183.30	169.57
Aug-07	152.39	156.10	140.02	154.21	131.39	123.00	188.17	169.59
Sep-07	153.53	156.15	145.23	154.39	132.46	123.33	188.17	169.60
Oct-07	154.71	158.38	145.76	154.40	134.76	124.51	188.29	170.81
Nov-07	155.08	159.40	146.19	154.42	135.35	124.99	188.25	169.80
Dec-07	156.57	162.95	147.39	154.49	135.70	125.88	188.71	169.96
Jan-08	159.50	169.17	148.33	155.44	138.59	132.54	188.81	170.41
Feb-08	162.25	176.80	150.84	153.92	140.16	132.78	188.97	170.38
Mar-08	163.68	178.83	152.36	155.05	142.81	133.30	188.95	170.46
Apr-08	164.04	177.74	155.35	155.71	143.86	134.09	189.48	169.35
May-08	165.53	179.03	155.76	158.57	143.93	135.63	189.81	171.92
Jun-08	169.19	181.36	156.48	163.18	147.30	136.12	191.46	182.59

Sumber : BPS